

Dakwah dan Pemikiran Politik Islam: Kajian Teoritis dan Empiris

Dr. Abdur Razzaq, M.A

Penerbit dan Percetakan



**Dilarang memperbanyak, mencetak atau menerbitkan
sebagian maupun seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit**

Ketentuan Pidana

Kutipan Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**Dakwah dan Pemikiran Politik Islam:
Kajian Teoritis dan Empiris**

Penulis : Dr. Abur Razzaq, M.A

Layout : Haryono

Desain Cover : Haryono

Hak Penerbit pada **NoerFikri**, Palembang

Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KDT)

Anggota IKAPI (No. 012/SMS/13)

Dicetak oleh:

NoerFikri Offset

Jl. KH. Mayor Mahidin No. 142

Telp/Fax : 366 625

Palembang – Indonesia 30126

E-mail : noerfikri@gmail.com

Cetakan I : November 2017

Hak Cipta dilindungi undang-undang pada penulis

All right reserved

ISBN : 978-602-447-087-6

PENGANTAR PENULIS

Alhamdulillah wahdah. Wa ba'du.

Buku ini adalah pengembangan dari buku yang ditulis sebelumnya dengan judul *Manhaj Dakwah 2 Imam*, Hasan al-Banna & Mohammad Natsir. Penambahan yang signifikan dari buku ini adalah beberapa bab yang difokuskan pada kajian literatur agar dapat digunakan sebagai bahan dalam proses pembelajaran. Kajian teoritis lebih memfokuskan pada literatur tentang konsep dakwah dan pemikiran Islam. Sedangkan kajian empiris, lebih menekankan pada perbandingan konsep dakwah dan pemikiran politik Islam Hasan al-Banna dan Mohammad Natsir sebagaimana dalam karya terdahulu.

Menulis karya ini sungguh merupakan pengalaman ruhiyah dan intelektual yang mengasyikkan tetapi juga melelahkan. Mengasyikkan karena selama meneliti pemikiran kedua tokoh ini, penulis menyelami tidak hanya konsep dan teori, tetapi juga pengalaman kedua tokoh ini yang banyak memberikan contoh dengan bahasa amal. Sebagai sebuah tulisan komparatif penulis mencoba membandingkan pemikiran kedua tokoh ini dalam manhaj dakwah dan pemikiran politik Islam. Hasan al-Banna dengan gerakan dakwah Ikhwanul Musliminnya telah banyak melakukan perubahan di Mesir khususnya dan hampir seluruh dunia Islam pada umumnya. Demikian juga dengan Mohammad Natsir melalui Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), telah memberikan sentuhan baru bagi perkembangan dakwah dan politik di Indonesia. Dalam membandingkan kedua tokoh ini, penulis menilai ada beberapa persamaan yang meliputi visi dan misi tentang dakwah dan Islam, dakwah *fardiyah* dan *amar*

ma'ruh nahi munkar, konsep dakwah melalui pendidikan, politik dalam Islam dan pentingnya jamaah dalam berdakwah. Selanjutnya penulis mengungkapkan perbedaan-perbedaannya yang terdiri dari pemanfaatan sarana dan pelaksanaan program dakwah, pembentukan kader dan pemimpin, dan pelaksanaan pendidikan. Setelah menganalisa persamaan dan perbedaannya, sebagai langkah selanjutnya daripada proses komparatif, penulis menganalisa hubungan antara kedua manhaj yang ada. Penulis berharap tulisan ini bermanfaat untuk menjadi pertimbangan dan bahan pemikiran kepada para mujahid dakwah, tokoh Islam, para pemimpin, cendekiawan dan seluruh ummat Islam yang punya perhatian terhadap dunia dakwah.

Penulis bersyukur karena dalam hidup yang sekali ini penulis banyak bertemu dengan orang-orang baik dan mulia yang kepada merekalah penulis layak berterima kasih atas segala pemberian dan kebaikannya. Kebaikan mereka secara langsung dan tidak langsung telah berjasa membantu penulis sehingga menjadi seperti hari ini. Ucapan terima kasih pertama untuk ayahanda almarhum Drs. H. Ali Mas'ud yang sejak kami berumur 5 tahun mengajarkan kami anak-anaknya untuk selalu sholat berjamaah di masjid, Ibunda Hj. RA.Sri Wahyudiyah yang dengan kebersahajaannya mengajarkan kami menjadi orang yang berjiwa besar, Almarhum Kyai Tijani yang menghargai penulis untuk menjadi teman diskusi dan sering menyuruh menjadi imam sholat subuh di mesjid, Kyai Idris yang selalu mengajarkan kesederhanaan dalam hidup yang justru dengan kesederhanaanlah kita akan mulia, Kyai Maktum yang mengajarkan kesabaran dalam keadaan apapun, Kyai Mahmad Aini yang begitu menghargai penulis dengan selalu

menyediakan waktu untuk menjadi tempat bertanya, diskusi dan berkeluh kesah, Ayah mertua Prof. DR. Ir. H. Zainal Ridho Djafar MSc yang membantu dan mendorong penulis untuk melanjutkan studi S3, Ibu mertua Dra. Hj Amalia Bahri, M.Pd dan banyak lagi yang tidak mungkin penulis sebutkan semuanya.

Ucapan terima kasih juga untuk mas Herul, mbak Dini, Shodiq, Neneng, Anshari, Ida, Khadijah dan Wawan atas dukungan dan doanya. Dukungan moril istri penulis Dr. Hj. Sari Lestari, ZR. SE. MEc dan anak-anak penulis Hudzaifah al Mutaz Billah, Izzah Imani, Miqdad al Mubarak, Zahid al Arif Billah dan Dhiaurrahman al Fatih, yang telah membantu penulis menciptakan suasana bahagia dan gembira. Sahabat-sahabat seperjuangan sejak di PII Pamekasan, PPI Malaysia, Genostieca al-Amien dan IKANSA'90 Pamekasan.

Akhirnya, *tiada gading yang tak retak* demikian juga dengan buku ini. Dengan penuh kerendahan hati penulis akui bahwa buku ini jauh dari kesempurnaan. Karena itu saran dan kritik demi penyempurnaan karya ini sangat penulis harapkan. Mudah-mudahan buku ini memberi manfaat bagi pembaca dan menjadi amal sholeh penulis di sisi Allah SWT. Amin

Palembang, September 2017 M

Penulis

KATA PENGANTAR EDISI II

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga buku dengan judul 'Dakwah dan Pemikiran Politik Islam: Kajian Teoritis dan Empiris' telah dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad SAW semoga kita termasuk diantara ummatnya yang selalu menjaga, memelihara dan mengamalkan sunnahnya. Buku yang merupakan bahan ajar ini adalah perbaikan dari edisi sebelumnya, Ada beberapa perbaikan dan penambahan dalam edisi kedua ini sebagai salahsatu proses penyempurnaan tanpa merubah dan mengurangi dari edisi sebelumnya.

Terima kasih disampaikan kepada Prof. Badlihisaham Mohd Nasir sebagai penyarah dan pembaca yang telah memberikan kritik dn sarannya dalam edisi perbaikan ini, yang nantinya buku ini akan dijadikan sebagai salah satu bahan ajar di Fakulti Tamadun Islam pada Universiti Teknologi Malaysia. Terima kasih juga disampaikan kepada Dr. Sari Lestari ZR, M.Ec atas kontribusi dalam penyempurnaan buku ini. Terima kasih kepada Dr. Kusnadi, Ibu Dra. Dalinur M. Nur, Muslimin, M. Kom I, dan rekan-rekan di Fakultas Dakwah UIN Raden Fatah Palembang yang telah berkontribusi dan semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyelesaian buku ini.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam buku ini untuk itu kritik dan saran terhadap penyempurnaan buku ini sangat diharapkan. Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang khususnya dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Palembang, Februari 2018

DAFTAR ISI

	Halaman
Pengantar Penulis	iii
Pengantar Edisi II.....	vi
Daftar Isi	vii
BAB I KONSEP DAKWAH	1
Pengertian Dakwah.....	1
Definisi Dakwah Menurut Istilah	2
Urgensi Dakwah	4
Media Dakwah	6
Peran dan Tujuan Dakwah	7
Manhaj Dakwah	8
Dakwah Bil Hal	11
BAB II TEORI PEMIKIRAN POLITIK ISLAM	15
Politik Dalam Islam	15
Pengertian Politik Islam	17
Sistem Khilafah Dalam Institusi Politik Islam	21
Demokrasi Dalam Politik Islam	22
Periodisasi Pemikiran Politik Islam	24
Periode Klasik	24
Periode Pertengahan	27
Periode Modern	29
BAB III KAJIAN EMPIRIS MANHAJ DAKWAH	
HASAN AL-BANNA DAN MOHAMMAD NATSIR...	31
Biografi dan Manhaj Hasan al-Banna	31
Pendidikan Hasan al-Banna	35

Biografi Mohammad Natsir	39
Pendidikan Mohammad Natsir	46
Manhaj Dakwah Hasan al-Banna	50
Persepsi Dakwah Hasan al-Banna	51
Dakwah Fardiyah Hasan al-Banna.....	59
Tarbiyah Sebagai Manhaj Dakwah	61
Hasan al-Banna dan Ikhwanul Muslimin	69
Peran Dakwah Hasan al-Banna	78
Pelopor Dakwah dan Gerakan Islam	79
Wawasan Politik Islam Hasan al-Banna	81
Dakwah Melalui Pendidikan	85
Manhaj Dakwah Mohammad Natsir	87
Dakwah melalui Dakwah Fardiyah M. Natsir	95
Dakwah Melalui Pendidikan	95
Dakwah Melalui Media Massa	97
Dakwah Melalui Jamaah	99
Masyumi	100
Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia	104
Mohammad Natsir dan DDII	106
Peranan dan Perjuangan M. Natsir Dalam DDII	110
Dakwah Fardiyah dan Amar Ma’uf Nahi Mungkar.....	121
Dakwah Melalui Pendidikan	128
Kepentingan Jamaah Dalam Berdakwah.....	131
Perbedaan Manhaj Dakwah Hasan al-Bannah dan Mohammad Natsir	134
Pemanfaatan Sarana dan Pelaksanaan Program Dakwah	135
Pembentukan Kader dan Pemimpin	137
Tentang Pelaksanaan Pendidikan	142

Perbandingan Manhaj Dakwah Hasan al-Banna Dengan

Mohammad Natsir	145
-----------------------	-----

**BAB IV KAJIAN EMPIRIS PEMIKIRAN POLITIK
ISLAM HASAN AL-BANNAH DAN**

MOHAMMAD NATSIR	149
------------------------------	------------

Politik Islam Dalam Pandangan Hasan al-Banna	149
--	-----

Negara dan Khilafah Dalam Perspektif Hasan al-Banna.	156
--	-----

Demokrasi Dalam Pandangan Hasan al-Banna	164
--	-----

Partai Politik Dalam Pandangan Hasan al-Banna	168
---	-----

Perjuangan Politik Hasan al-Banna Dalam Ikhwanul Muslimin	173
--	-----

Pandangan Politik Islam Mohammad Natsir	175
---	-----

Negara Dalam Pandangan Mohammad Natsir	177
--	-----

Demokrasi Dalam Pandangan Mohammad Natsir	180
---	-----

Perjuangan Politik Islam Mohammad Natsir Dalam Masyumi	181
---	-----

Persamaan Pemikiran Politik Islam Hasan al-Banna Dan Mohammad Natsir	185
---	-----

Perbedaan Pemikiran Politik Islam Hasan al-Banna Dan Mohammad Natsir	189
---	-----

BAB V PENUTUP.....	197
---------------------------	------------

DAFTAR PUSTAKA	201
-----------------------------	------------

BAB I

KONSEP DAKWAH

Pengertian Dakwah

Perkataan dakwah ditinjau dari segi bahasa (etimologi) berasal dari bahasa Arab الدعوة dari kata الدعاء (panggilan) yaitu memanggil atau mengajak manusia kepada suatu urusan. Sedangkan pengertian dakwah secara terminologi (istilah) adalah mengajak kepada Allah dan beriman denganNya sebagai Tuhan yang satu tidak mensyirikkan-Nya, beriman kepada para malaikatNya, kitab-kitabNya, para nabi dan rasulNya, beriman pada hari akhirat dan kepada takdirNya sama ada yang baik ataupun yang buruk (Abdul Naim Muhammad Husein 1984: 17). Menurut kamus besar bahasa Arab: dakwah berasal dari kata دعا – يدعو - دعوة yang artinya : panggilan, ajakan, seruan. Pengertian seperti di atas banyak terdapat di dalam ayat Al-Qur'an, salah satunya :

قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه

Artinya: "Yusuf berkata: Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan kepadaku" (Q.S. Yusuf : 33) .

Demikian juga dengan ayat:

وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Artinya: "Allah menyeru [manusia] menuju Darussalaam [Surga], dan memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus [Islam]" (Q.S. Yunus: 25).

Definisi Dakwah Menurut Istilah

Ulama memberikan definisi dakwah dengan berbagai macam definisi, antara lain Masdar Helmy (1989: 16) yang mengemukakan dakwah adalah, "Mengajak dan menggerakkan manusia mentaati ajaran Islam termasuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar untuk bias memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat". Sementara Hamzah Ya'qub (1981: 13) merumuskan pengertian dakwah adalah, "Mengajak manusia dengan hikmah kebijaksanaan untuk mengikuti petunjuk Allah dan RasulNya". Kemudian A. Hasymi (1974: 28), merumuskan pengertian dakwah adalah, "Mengajak orang lain untuk meyakini dan mengamalkan aqidah dan syari'ah Islam yang terlebih dahulu telah diyakini dan diamalkan oleh pendakwah sendiri". Pengertian dakwah menurut Syaikhul Islam Ibnu Taymiyyah Rahimahullah sebagaimana dikutip oleh Nasruddin Harahap menyatakan bahwa dakwah kepada Allah adalah dakwah menuju keimanan kepada-Nya dan terhadap apa yang dibawa oleh Rasul-Nya dengan meyakini apa yang dihobarkan olehnya dan mentaati perintahnya. Dakwah merupakan konsep yang sepenuhnya mengandung pengertian menyeru kepada yang baik, yaitu baik menurut Islam. Pengertian dakwah sebagaimana dipahami dalam suratan-*Nahl* ayat 125 mempunyai makna yang luas dan mendalam, begitu juga pelbagai definisi yang telah dibaca tentang pengertian-pengertian dakwah. Jelas bahwa dakwah adalah tugas agama yang luhur dan mulia karena merupakan suatu upaya dan usaha merubah manusia dari suatu kondisi yang kurang baik kepada kondisi yang lebih baik (Nasruddin Harahap, 1992: 2). Kerja dakwah adalah kerja menggarami kehidupan manusia dengan nilai-nilai iman dan taqwa untuk kebahagiaan dunia

dan akhirat. Kerja ini tidak akan pernah selesai selama kehidupan dunia masih berlangsung, selama itu umat berkewajiban menyampaikan pesan-pesan kenabian dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun coraknya. Isi pesan dakwah pada hakekatnya merupakan tuntunan abadi manusia sepanjang masa (Ahmad Syafi'i Ma'arif, 1994: 45).

Di tengah pembangunan masa kini yang banyak membawa perkembangan baru dalam bidang agama, sosial, sains dan teknologi akan membawa pengaruh semakin berkembangnya sifat-sifat konsumerisme, materialisme beserta pendangkalan rohani dan moral, dakwah senantiasa dituntut untuk terus berupaya merubah suatu kondisi negatif ke kondisi yang positif atau perubahan dari kondisi yang sudah positif menuju kondisi yang lebih positif lagi, tentu saja dengan penuh *hikmah* dan *mau'idhoh hasanah*.

Dakwah merupakan kewajiban bagi muslim dan muslimah pada setiap masa dan keadaan. M. Natsir sebagai tokoh umat Islam Indonesia dalam buku monumentalnya *Fiqhud Da'wah*, menyatakan bahwa dakwah dalam arti luas, adalah kewajiban yang harus dipikul oleh tiap-tiap muslim dan muslimah. Tidak boleh seorang muslim dan muslimah menghindarkan diri darinya (M. Natsir, 1991). Tentang konsep dakwah ini beliau mengutip beberapa ayat al-Qur'an sebagai panduan yang menguatkan tentang hukum kewajiban berdakwah bagi setiap muslim dan muslimah antara lain QS. Ali 'Imran 3: 110, QS. Al-Nashr 103: 1-3) Mengenai tujuan dakwah, beliau menulis (1989) yang menyatakan bahwa tujuan dakwah adalah: Memanggil kita kepada syariat, untuk memecahkan persoalan hidup, baik persoalan hidup perseorangan atau persoalan berumah tangga, berjemaah-

bermasyarakat, bersuku bangsa, bernegara, berantarnegara. Memanggil kita kepada fungsi hidup kita sebagai hamba Allah di atas dunia yang terbentang luas ini, berisikan manusia berbagai jenis, bermacam pola pendirian dan kepercayaannya, yakni fungsi sebagai *syuhada' ala al-nas*, menjadi pelopor dan pengawas bagi ummat manusia. Memanggil kita kepada tujuan hidup kita yang hakiki, yaitu menyembah Allah. Konsep pemikiran ini tidak jauh berbeda dengan yang pernah diungkapkan Hamka (1984: 30) mengatakan bahwa dakwah merupakan soalan penting dalam Islam karena berfungsi untuk mengawal tegaknya *al amr bi al-ma'ruf wa an nahy an al-munkar*. Selain itu, aktivitas dakwah dapat menggerakkan semangat beragama masyarakat Islam. Agama Islam akan menjadi hidup di tengah-tengah umat ketika Islam dapat dipahami dengan baik oleh masyarakatnya. Pemahaman terhadap agama Islam sebagai kebenaran yang datangnya dari Allah s.w.t. antara lain melalui aktivitas dakwah. Selanjutnya menurut beliau kehidupan Muslim akan bermakna dalam pandangan Allah s.w.t. apabila diisi dengan aktivitas dakwah.

Urgensi Dakwah

Hamka menyebutkan bahwa dakwah harus menjadi gerakan yang hidup dalam masyarakat muslim. Al-Quran telah mempertegas bahwa dalam keadaan perang sekalipun perlu ada kelompok yang belajar agama secara sungguh-sungguh. Kemudian mereka diberikan tugas untuk berdakwah, yaitu mendakwahkan kelompok tentara ketika mereka kembali dari peperangan. Ini hanya satu contoh yang baik sekali dikemukakan oleh al-Quran. Dalil inilah menurut Hamka bahwa pendakwah itu adalah orang-orang yang harus

profesional (Hamka, 1984: 70). Lebih tegas beliau mengatakan: Kalau sudah jelas agama Islam adalah agama untuk manusia seluruhnya, tidak membedakan bangsa atau warna kulit, suatu agama yang kekal mereka menyeru generasi demi generasi, niscaya jelaslah bahwa Islam memerlukan ahli dakwah yang terampil dan dakwah yang tidak boleh terhenti. Dakwah harus berjalan terus, dan selalu diperbaharui. Ahli dakwah pun mesti gigih dan harus selalu memperbaiki diri menghadapi perubahan-perubahan yang ada dalam masyarakat (Ibid: 47).

Pendapat lain mengenai urgensi dakwah yang layak untuk dikemukakan adalah apa yang disampaikan oleh Ahmad Dahlan. Konsep dakwah Ahmad Dahlan bisa dilihat dari tulisan Mulkhan (1990: 6) yang menyatakan bahwa gagasan dasar Ahmad Dahlan terletak pada kesejajaran kebenaran tafsir al-Quran, akal suci, temuan iptek, dan pengalaman universal kemanusiaan. Belajar filsafat baginya adalah kunci pengembangan kemampuan akal suci, selain belajar pada pengalaman beragam bangsa dan pemeluk agama. Dari sini diperoleh pengetahuan tentang bagaimana mencapai tujuan penerapan ajaran Islam, yaitu penyelamatan kehidupan umat manusia di dunia berdasarkan cinta kasih. Pemikiran ketiga tokoh Islam modernis ini memandang penting dakwah sebagai wasilah terhadap pembangunan umat Islam. Prinsip *syumuliah* Islam sebagai agama yang lengkap telah mempertemukan ketiganya dalam pemahaman yang sama, bahwa dakwah adalah kewajiban bagi umat Islam untuk tegaknya agama Allah di muka bumi. Secara teori konsep perbaikan umat melalui dakwah pada masyarakat sebagai kesadaran dapat dianalogikan dengan teori bottom-up yang secara literal, *bottom-up* berarti dari bawah ke atas. Implementasi dari konsep

ini adalah proses perbaikan masyarakat dengan memperbaiki pemahaman dan kesadarannya untuk menjadi umat yang lebih baik. Alasan inilah yang kemudian K.H. Ahmad Dahlan berpendapat bahwa pembentukan kepribadian sebagai target penting dari tujuan-tujuan pendidikan. Ia berpendapat bahwa tak seorangpun dapat mencapai kebesaran di dunia ini dan di akhirat kecuali mereka yang memiliki kepribadian yang baik. Seorang yang berkepribadian yang baik adalah orang yang mengamalkan ajaran-ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Karena Nabi merupakan contoh pengamalan Al-Qur'an dan Hadis, maka dalam proses pembentukan kepribadian siswa harus diperkenalkan pada kehidupan dan ajaran-ajaran Nabi saw. (H.Suja'i, 1989: 17). Pendapatnya ini menguatkan konsep perbaikan umat melalui perbaikan masyarakat melalui dakwah dan pendidikan yang baik. Demikian juga dengan Hamka (1984: 30) yang mengatakan bahwa dakwah merupakan soalan penting dalam Islam karena berfungsi untuk mengawal tegaknya *al amr bi al-ma'ruf wa an nahy an al-munkar*. Selain itu, aktivitas dakwah dapat menggerakkan semangat beragama masyarakat Islam. Agama Islam akan menjadi hidup di tengah-tengah umat ketika Islam dapat dipahami dengan baik oleh masyarakatnya. Pemahaman terhadap agama Islam sebagai kebenaran yang datangnya dari Allah s.w.t. antara lain melalui aktivitas dakwah.

Media Dakwah

Media dakwah adalah segala sesuatu yang berupa alat, perantara, dan sarana yang digunakan dalam kegiatan dakwah yang menjadi penunjang dalam kelangsungan proses penyampaian pesan dari komunikator (*da'i*) kepada khalayak

(*mad'u*) secara efektif (Nuridin: 2010). Sebagai suatu aktivitas, dakwah berupaya mengubah suatu situasi tertentu kepada situasi yang lebih baik menurut ajaran Islam. Dengan kata lain dakwah, berarti menyampaikan konsepsi Islam kepada manusia mengenai pandangan dan tujuan hidup di dunia ini (Endang Saifuddin Anshari. 1969: 85).

Media dakwah adalah instrumen yang dilalui oleh pesan atau saluran pesan yang menghubungkan antara *da'i* dan *mad'u*. Pada prinsipnya dakwah dalam tataran proses, sama dengan komunikasi, maka media pengantar pesan pun sama. Media dakwah berdasarkan jenis dan peralatan yang melengkapinya terdiri dari media tradisional (gendang, rebana, bedug, siter, suling, wayang, dll), media modern (telephone, radio, tape recorder, surat kabar, buku, majalah, brosur, poster, dan pamflet), dan perpaduan kedua media tradisional dan modern (wayang, sandiwara yang bernuansa Islam dan ditayangkan televisi).

Peran dan Tujuan Dakwah

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa dakwah berperan dalam mewarnai hidup manusia dengan iman dan takwa, dengan demikian termasuk di dalamnya adalah menjauhkan umat dari kekafiran. Salah satu faktor yang mendekatkan manusia pada kekafiran adalah kefakiran, sehingga pengentasan kefakiran merupakan bagian dari kerja dakwah dalam rangka menjaga iman dan takwa umat. Kefakiran dapat diberantas melalui pembangunan umat, baik jasadnya (kesehatan) yang juga akan mempengaruhi jiwanya, akalnya (pendidikan) dan kesejahteraan secara umum. Juga telah disebutkan di atas, bahwa dakwah sebagai suatu aktivitas,

berupaya mengubah suatu situasi tertentu kepada situasi yang lebih baik menurut ajaran Islam. Dengan demikian upaya-upaya dan atau kegiatan-kegiatan dalam rangka pembangunan umat, merupakan bagian dari dakwah. Tujuan dakwah menurut Hasan al-Banna (1997) mempunyai dua sasaran dasar yang ingin dicapai:

1. Agar negara muslim merdeka dari setiap penjajahan bangsa asing. Hal ini merupakan hak dasari bagi setiap manusia. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang yang zalim lagi durhaka atau para penjajah terlaknat.
2. Agar tertegak didalam negara sebuah daulah Islamiyah merdeka yang menerapkan hukum Islam, merealisasikan prinsip-prinsipnya yang lurus dan menyampaikan dakwahnya yang bijak kepada seluruh manusia. Selama daulah ini belum tertegak, maka seluruh kaum muslimin berdosa. Mereka bertanggung jawab di hadapan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung karena mengabaikan untuk menegakkan dan enggan untuk mewujudkannya.

Selain tujuan diatas, bagi Hasan al-Banna ada tujuan utama dalam dakwah yang menyatakan, "Bahwa tujuan utama dakwah adalah memunculkan al-haq. Apabila tujuan utama itu telah tercapai, maka kita dapat membangun individu, keluarga dan masyarakat. Kemudian membangun ummat. Kemudian kita menjadi saksi (syuhada) atas manusia dan seluruh manusia" (Badr Abdur Razzaq al-Mash 1995: 81).

Manhaj Dakwah

Menurut Faishal Ali Yahya (1989) *al-manhaj* atau *al-manhaaj*, adalah dua kata yang semakna, baik dari segi bahasa ataupun istilahnya. *Al-manhaj* artinya suatu jalan yang sudah

terang dan jelas. Sedangkan *al-manhaaj* ialah suatu jalan lempang dan lurus. Ibnu Mandzur dalam menafsirkan kedua kata tersebut dengan mengutip dari ayat Al-Qur'an, sebagai berikut:

لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجا

Artinya: 'Untuk tiap ummat diantara kalian. Kami berikan aturan dan jalan yang terang' (QS. Al-Maidah 5: 48).

Dari pengertian diatas penulis sependapat dengan kesimpulan pengertian *manhaj* dakwah ialah cara atau aturan yang dianjurkan atau harus diikuti dalam kerja-kerja atau kegiatan berdakwah atau di bidang pengajaran atau tuntunan (Said Ramadhan al-Buthy 1997: 70). Hasan al-Banna (1999: 227) menyatakan dalam mudzakirahnya: Ciri-ciri khusus dakwah antara lain:

1. *Bina'* dan positif, karenanya dakwah ini bersifat membangun bukan merusak, berusaha melakukan hal-hal positif. Kewajiban kami membina diri sendiri terlebih dahulu.
2. Lisan yang sesuai dengan perbuatan. Karena itu kami harus mempelajari undang-undang (syariat-red) kami yang didalamnya tercantum segala sesuatunya. Kami juga berusaha untuk bisa menerapkan apa yang kami pelajari dan kami ucapkan.
3. Rabbaniyah. Karena itu kami harus menjalin hubungan erat dengan Allah sekuat kemampuan kami melalui dzikir dan doa-doa *ma'tsurat*.
4. *Tajammu'*. Yaitu kami selalu saling bertemu dan merindukan pertemuan serta menunaikan hak-hak ukhuwah.

5. *Ihtiwal* dan *kifah* (saling menanggung beban berat dan berjuang). Karena itu kami mesti ridha dan melapangkan dada untuk menerima semuanya.

Manhaj Dakwah sama artinya dengan metode atau cara berdakwah. Untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan, kita memerlukan metode. Strategi menunjuk pada suatu perencanaan untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan metode adalah cara yang digunakan untuk melaksanakan strategi. Dalam penerapan metode dibutuhkan beberapa teknik.

Ada beberapa pendapat tentang definisi metode dakwah, antara lain:

1. Al-Bayanuni (1993: 47) mengemukakan definisi metode dakwah (*asalib al-dakwah*) sebagai “*cara-cara yang ditempuh oleh pendakwah dalam berdakwah atau cara menerapkan strategi dakwah*”.
2. Said bin Ali Al-Qahthani (1994: 101) membuat definisi metode dakwah sebagai berikut. “*uslub (metode) dakwah adalah ilmu yang mempelajari bagaimana berkomunikasi secara langsung dan mengatasi kendala-kendalanya*”.
3. Hampir sama dengan definisi ini, menurut ‘Abd al-Karim Zaidan (1993: 411), metode dakwah (*uslub al-da’wah*) adalah: “*ilmu yang terkait dengan cara melangsungkan penyampaian pesan dakwah dan mengatasi kendala-kendalanya*”(Aziz, 2015: 357).

Dalam kamus ilmiah populer, metode adalah cara yang sistematis dan teratur untuk melaksanakan sesuatu atau cara kerja (Paus A. Partanto, 1994; 461). Dari beberapa definisi ini, setidaknya ada tiga karakter yang melekat dalam metode dakwah.

1. Metode dakwah merupakan cara-cara sistematis yang menjelaskan arah strategi dakwah yang telah ditetapkan. Ia merupakan bagian dari strategi dakwah.
2. Karena menjadi bagian dari strategi dakwah yang masih berupa konseptual, metode dakwah bersifat lebih konkret dan praktis.
3. Setiap strategi memiliki keunggulan dan kelemahan, metode berupaya menggerakkan keunggulan tersebut dan memperkecil kelemahannya.

Dakwah bil Hal

Makna dakwah bil hal diungkapkan oleh Dahlan Iskan dalam sebuah tulisan, "Istilah 'dakwah *bil hal*' yang sudah begitu populer ternyata merupakan istilah yang hanya digunakan di Indonesia yang kemudian merembet ke Malaysia. Sebagaimana istilah '*halal bil halal*' istilah dakwah *bil hal* bukan istilah yang dikenal di dunia Islam seperti di Timur Tengah," ujarnya dalam pidato orasi ilmiah penerimaan Gelar Doktor Honoris Causa di Auditorium IAIN, Semarang, Jawa Tengah (Harahap, 2013). Lebih lanjut Dahlan menjelaskan bahwa,

Namun tidak ada yang tahu siapa yang memulai menggunakannya. Prof. Dr. KH Quraisy Shihab, ahli tafsir Al Qur'an yang semula dikira sebagai ulama pertama yang menggunakan istilah "dakwah bil hal", mengirim jawaban dari luar negeri sebagai berikut: bukan saya yang pertama mempopulerkan istilah itu. Rasanya MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang mempopulerkannya..... Prof. Dr. Amin Aziz yang zaman itu menjadi tokoh muda intelektual Islam yang mulai

ikut berkecimpung di MUI juga tidak ingat persis siapa orang pertama yang melahirkan istilah “dakwah bil hal”..... Tapi dari hasil penelusuran saya, patut diduga istilah “dakwah bil hal” itu terucapkan pertama kali oleh intelektual muda yang juga mulai aktif di MUI zaman itu. Namanya Dr. Effendy Zarkasi. Setidaknya itulah yang diduga oleh tokoh yang juga sangat aktif dan juga terlibat dalam kegiatan pemberdayaan umat Adi Sasono (Iskan, 2013).

Selanjutnya Dahlan mengungkapkan penelusuran makna istilah dakwah bil hal dalam tulisannya,

Dalam literasi yang banyak berkembang di dunia Islam, istilah dakwah bil lisan dan dakwah bil hal tidak banyak dikenal. Menurut kiai muda lulusan Yaman dari Pondok Pesantren Al Azziziyah, Denanyar, Jombang, KH Abdul Muiz Aziz, di dunia Arab dan dunia Islam pada umumnya, dakwah bil lisan dikenal dengan ungkapan ‘*bil maqal*’ dilaksanakan dalam bentuk harakah-harakah. Kebanyakan gerakan ini sebenarnya tidak bisa disebut murni dakwah karena tujuan akhirnya adalah untuk merebut kekuasaan.... Dalam tradisi Arab pun, dakwah bil maqal atau dakwah bil lisan dianggap kurang efektif dibanding dakwah dengan perbuatan yang diistilahkan bi lisan al hal. Ungkapan yang populer di dunia Arab, *lisaanul hal afshahu min lisanil maqal*. Berkata dengan perbuatan jauh lebih efektif dibanding berkata dengan ucapan” (Ibid).

Inilah sejarah istilah dakwah bil hal yang dapat penulis kutip yang pada intinya dapat disimpulkan dan menjadi kesepakatan umum adalah bentuk dakwah dengan menggunakan pendekatan secara amal nyata dan langsung ditujukan dan menyentuh kepada mad'u. Pendekatan dakwah secara langsung menggunakan amal nyata ini dapat diimplementasikan dalam berbagai hal yang salah satunya dengan kegiatan amal seperti filantropi. Filantropi yang merupakan bentuk dari kedermawanan sosial dapat dikategorikan sebagai bagian dari dakwah bil hal, karena kegiatan amal yang dilaksanakan dan berkaitan langsung dengan masyarakat adalah bentuk nyata dari sebuah kegiatan dakwah.

BAB II

TEORI PEMIKIRAN POLITIK ISLAM

Politik Dalam Islam

Pembahasan Islam dan politik yang sering dipertanyakan para pengkaji teori-teori politik adalah bagaimana timbulnya pemikiran dan perkembangan politik dalam Islam. Sebagai sebuah entitas keagamaan, Islam lahir dengan konsep perbaikan kehidupan manusia secara utuh dan menyeluruh yang didalamnya membangun struktur sosial kemasyarakatan. John L. Esposito dalam *Islam and Politics*, dengan jujur mengakui realitas sejarah umat Islam di masa awal hingga keruntuhannya senantiasa berpaku kepada aqidah Islam. Esposito menyatakan bahwa Agama (Islam) memberikan pandangan dunia, gagasan untuk kehidupan pribadi dan bersama, baik pada masa khulafaurrasyidin, Umayyah dan Abbasiyah, menurutnya dasar ideologi masyarakat maupun Negara saat itu adalah Islam. Lebih lanjut dia merincikan bahwa legitimasi dan otoritas penguasa, lembaga-lembaga peradilan, pendidikan dan sosial berakar pada Islam. (Esposito, 1990). Pengakuan jujur dari seorang orientalis tentunya bukan hanya Esposito saja, para orientalis –terlepas dari kesimpulan yang diambilnya- lainnya pun tidak membutakan mata akan Islam sebagai agama spiritual juga agama politik.

Seorang tokoh ilmuwan di universitas Yordania, Fathi al-Durayni dalam bukunya, *Khasa'is al-Tashri' al-Islami fi al-Siyasah wa al-Hukm*, berpendapat bahwa Islam telah menimbulkan satu revolusi terhadap konsep agama. Berbeda dengan agama lain, Islam menghubungkan agama dengan politik, agama dengan

sains, dunia dengan akhirat. Hal-hal yang biasanya dilihat secara terpisah. Al-Durayni juga menjelaskan bahwa segala aktivitas seorang Muslim terutamanya aktivitas politik dihitung sebagai ibadah. Pendapat al-Durayni ini sejajar dengan ungkapan Ibn Taymiyyah bahwa kekuasaan politik merupakan *min a'zam wajibat al-din* (satu kewajiban agama yang utama). Pandangan serupa juga dikemukakan oleh al-Qaradawi, yang mengatakan bahwa terdapat hubungan simbiosis antara Islam dengan politik sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan daripada hakikat Islam itu sendiri. Penolakan dan pemisahan politik daripada Islam, menurut beliau merupakan satu kejahatan dan miskonsepsi terhadap hakikat Islam (Muamar, 2005). Karena hakikat Islam yang sempurna merangkum urusan-urusan materi dan ruhani, dan mengurus perbuatan-perbuatan manusia dalam kehidupannya di dunia dan akhirat. Bahkan filsafat umumnya merangkum kedua hal itu, dan tidak mengenal pemisahan antara keduanya, kecuali dari segi perbedaan pandangan. Sedangkan kedua hal itu sendiri, keduanya menyatu dalam kesatuan yang tunggal secara solid; saling beriringan dan tidak mungkin terpisah satu sama lain. Fakta tentang sifat Islam ini amat jelas, sehingga tidak membutuhkan banyak kerja keras untuk mengajukan bukti-bukti. Hal itu telah didukung oleh fakta-fakta sejarah, dan menjadi keyakinan kaum Muslimin sepanjang sejarah yang telah lewat. Namun demikian, ada sebagian umat Islam sendiri, yang mengklaim diri mereka sebagai 'kalangan pembaru', dengan terang-terangan mengingkari fakta ini!. Mereka mengklaim bahwa Islam hanyalah sekadar 'dakwah agama' ¹(3):

¹ Diantara tokoh mengusung pendapat ini dan membelanya adalah Ali Abdurraziq, mantan hakim pengadilan agama di Manshurah, dan mantan menteri

maksud mereka adalah, Islam hanyalah sekedar keyakinan atau hubungan ruhani antara individu dengan Rabb-nya. Dan dengan demikian tidak memiliki hubungan sama sekali dengan urusan-urusan yang kita namakan sebagai urusan materi dalam kehidupan dunia ini. Di antara urusan-urusan ini adalah: masalah-masalah peperangan dan harta, dan yang paling utama adalah masalah politik. Di antara perkataan mereka adalah: "agama adalah satu hal, dan politik adalah hal lain".

Pengertian Politik Islam

Islam adalah agama, namun Islam bukanlah agama semata. Islam bukan hanya sekedar keyakinan semata, yang hanya mengatur hubungan makhluk dengan penciptanya, namun hubungan manusia dengan manusia lainnya, dengan negara atau pemerintah, hubungan pemimpin dengan rakyat, hubungan hakim dengan terdakwa, dan hubungan kekuasaan dengan masyarakat juga merupakan bagian dari bentuk hubungan (penghambaan) pencipta dengan ciptaannya. Sedikit berbeda, politik di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *siyasah*. Oleh sebab itu, di dalam buku-buku para ulamasalafush shalih dikenal istilah *siyasah syar'iyah*, misalnya dalam Al Muhith, *siyasah* berakar kata *sâsa - yasûsu*. Dalam kalimat *Sasa addawaba yasusuha siyasatan* berarti *Qama 'alaiha wa radlaha wa adabbaha* (mengurusinya, melatihnya, dan mendidiknya). Bila dikatakan *sasa al amra* artinya *dabbarahu*

perwakafan, dalam bukunya yang dipublikasikan pada tahun 1925, dan berjudul: Al Islam wa Ushul al Hukm. Di samping bantahan-bantahan yang kami ketengahkan saat ini, kami akan kembali mendiskusikn pendapat-pendapatnya dan memberikan bantahan atasnya nanti secara lebih terperinci dalam pasal-pasal berikutnya. (lihat, terutama, pasal keempat, dalam buku ini, di bawah sub-judul: bantahan atas klaim-klaim beberapa penulis kontemporer). Buku Teori Politik Islam oleh Dr. Dhiauddin Rais

(mengurusi/mengatur perkara). Kata *sasa-yasusu-siyasatan* yang berarti memegang kepemimpinan masyarakat, menuntun atau melatih hewan dan mengatur dan memelihara urusan. Politik (siyâsah) adalah pengaturan urusan umat di dalam dan luar negeri. Politik dilaksanakan oleh Negara dan umat, karena negaralah yang secara langsung melakukan pengaturan ini secara praktis, sedangkan umat mengawasi Negara dalam pengaturan tersebut (An Nabhani, 2005). Politik Islam berarti pengaturan urusan umat di dalam dan luar negeri dengan hukum Islam

Istilah politik menurut (Al-Qaradhawi, 1995: 34) dimaknai dengan dua arti: 1. Makna umum, yaitu: menangani urusan manusia dan masalah kehidupan dunia mereka berdasarkan syariat agama. Karena itu dikenal istilah Khilafat yang berarti perwakilan Rasulullah untuk menjaga agama dan mengatur dunia. 2. Makna khusus, yaitu pendapat yang dinyatakan pemimpin, hukum dan ketetapan-ketetapan yang dikeluarkannya, untuk menjaga kerusakan yang akan terjadi, membasmi kerusakan yang sudah terjadi atau untuk memecahkan masalah khusus.

Bidang ilmu yang mendalami hukum Islam mengenai hubungan individu dengan negara atau pemerintah, hubungan pemimpin dengan rakyat, hubungan hakim dengan terdakwa, hubungan kekuasaan dengan masyarakat, atau dengan kata lain hukum Islam yang berkenaan dengan sistem ketatanegaraan, sistem keuangan, sistem pemerintahan, dan sistem hubungan internasional disebut dengan Fiqih Siyasa Syar'iyah atau aturan hukum dalam politik Islam (Al-Qaradhawy, 1999).

Politik dalam pandangan ulama klasik, menurut Al-Qaradhawy (1999), memiliki dua makna: makna umum dan

makna khusus. Makna umum dari politik adalah mengelola urusan manusia dan masalah kehidupan dunia manusia berdasarkan syariat agama. Sedangkan makna khusus politik yaitu pendapat yang dinyatakan imam, hukum dan ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan imam dengan tujuan mencegah kerusakan yang akan terjadi, membasmi kerusakan yang sudah terjadi atau untuk memecahkan masalah khusus. Menurut Al Mawardi (1996: 36), konsep politik Islam didasarkan akan adanya kewajiban mendirikan lembaga kekuasaan, karena ia dibangun sebagai pengganti kenabian untuk melindungi agama dan mengatur dunia. Dan juga al Mawardi menulis ada lima unsur pokok dalam suatu negara, yaitu: Agama sebagai landasan negara dan persatuan rakyat, wilayah, penduduk, pemerintah yang berwibawa, dan keadilan dan keamanan.

Ibnu Aqil al-Hambaly dalam kitabnya *Al-Funun* sebagaimana dikutip al-Qaradhawy (1999: 39) menyatakan teorinya bahwa "Politik adalah suatu upaya yang dilakukan manusia untuk lebih dekat dengan kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, yaitu dalam perkara-perkara yang tidak ditetapkan Rasul dan tidak disebutkan wahyu. Selanjutnya beliau (Ibid) memperjelas dengan tulisannya, "Jika yang engkau maksudkan dari perkataan, 'Kecuali yang sejalan dengan syariat', adalah yang tidak bertentangan dengan ketetapan syariat, maka itu benar. Tapi jika yang engkau maksudkan tidak ada politik kecuali yang dibicarakan syariat, maka itu salah dan samam dengan menyalahkan para sahabat (Nabi)."

Politik Islam diibaratkan sebagai sistem pemerintahan yang dilaksanakan oleh umat Islam selaku khalifah Allah S.W.T. di muka bumi (Mawdudi, 1979: 14). Politik Islam secara kasarnya terangkum dalam tiga kategori: (1) *Siyasah Diniyyah*,

yang berdasarkan wahyu, dan ditegakkan dalam jalur Khilafah dan Imamah (2) *Siyasah 'Aqliyyah*, yang terhasil dari pemikiran manusia, dan berasaskan kekuatan wilayah (*Mulk*) (3) *Siyasah Madaniyyah*, negara unggul (*fadhilah*) yang diutarakan oleh ahli falsafah Muslim, al-Farabi dalam al-Madinah al-Fadilah dan ahli falsafah Yunani, Plato dalam Republic (Mohd Kamal Hassan, 1982: 119).

Para ahli fiqih mengungkapkan maksud *siyasah al-shar'iyah* sebagai: "Keluasan bagi *wulat al-amr* (pemerintah) untuk melaksanakan sesuatu (urusan pemerintahan) bagi meraih kemaslahatan yang tidak menyalahi kaidah agama walaupun tidak ada dalil khusus tentangnya." *Siyasah Islam* menggarap tujuan untuk mempertahankan *masalih al-'ibad* (kelangsungan beribadah atau penghambaan), mencapai *maqasid al-shari'ah* dan *masalih al-mursalah*. (Khalaf, 1984: 6).

Para pemikir Islam telah mengemukakan pandangan yang ideal dan gagasan besar dalam pemikiran *siyasah* sepertimana diungkapkan oleh Imam al-Mawardi (365-450 H./991-1031 M.) dalam *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah* yang membahas pemikiran dasar tentang wizarah dan imarah, hubungan antara penganut Islam dan bukan Islam, jihad, dan cukai yang dipungut dari hasil tanah (Lambton, 1991: 83). Imam al-Ghazali (450-505 H./1058-1111 M) dalam *Nasihah al-Muluk*, Ibn Taymiyyah (661-728 H./1263-1328 M.) dalam *al-Siyasah alShar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*, Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam *al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Shar'iyah*, Ibn Khaldun (732-808 H./1332-1405 M.) dalam *al-Muqaddimah* dan Muhammad Rashid b. 'Ali Rida al-Qalmuni (1282-1354 H.) dalam *Tafsir al-Manar*.

Pemerintahan dalam Islam

Konsep pemerintahan dalam Islam menurut Haikal (Kesuma, 2013: 464), tidak pernah dibahas secara rinci. Al-Qur'an hanya menerangkan secara garis besarnya saja. Apakah Islam lebih mementingkan system republik atau kerajaan, justeru menurutnya khilafah mendekati kepada negara sebuah republik, sebab kepala negara dipilih setelah para tokoh ahli bermusyawarah terlebih dahulu.

Islam memiliki pandangan tersendiri mengenai pemerintahan. Pemerintahan yang legal konstitusional sesuai dengan syariat Islam disebut imamah. Imamah dapat didefinisikan secara utuh sebagai pemerintahan yang menjadikan syariat Islam sebagai undang-undang pokok atau konstitusi; yaitu yang prinsip-prinsipnya bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas (Rais, 2001). Berdirinya sistem keimamahan atau kekhalifahan tersebut merupakan salah satu yang masih diperdebatkan, atau masih terdapat perbedaan pendapat mengenai hal tersebut, walaupun mayoritas umat Islam berpendapat bahwa berdirinya kekhalifahan yang sesuai syariah merupakan kewajiban agama yang mendasar.

Sistem Khilafah dalam Institusi Politik Islam

Beragam argumen memperdebatkan masalah Khilafah sebagai sistem pemerintahan Islam yang merupakan kajian dalam politik Islam. Menurut Adhayanto (2011), sistem Khilafah, merupakan bentuk pemerintahan tunggal yang berbeda dengan Republik ataupun kerajaan serta bentuk pemerintahan lainnya. Lebih lanjut beliau berargumen bahwa dalam pemerintahan Islam, sistem yang ada dijalankan

berdasarkan ketentuan syara' di mana setiap rakyat memiliki hak untuk menjalankan pemerintahan.

Demokrasi dalam Politik Islam

Demokrasi berasal dari bahasa latin demos dan kratos. Demos memiliki arti rakyat dan kratos berarti pemerintahan, sehingga seringkali demokrasi dipahami sebagai suatu sistem pemerintahan, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Syaikh Fadhallah Nuri berpendapat bahwa demokrasi adalah persamaan semua warga negara, dan hal ini menurutnya sangatlah tidak mungkin dalam Islam. Dalam demokrasi, perbedaan yang luar biasa yang tidak mungkin dihindari pasti terjadi. Misalnya; antara yang beriman dan yang tidak beriman, antara yang kaya dan miskin, antara faqih (ahli hukum) dan penganutnya. Tidak hanya itu, ia juga menolak legislasi oleh manusia. Agama Islam menurutnya tidak memiliki kekurangan yang memerlukan penyempurnaan dan dalam Islam tidak ada seorang pun yang diizinkan mengatur hukum. Karena itu, ia menegaskan bahwa demokrasi sangatlah bertentangan dalam Islam (Esposito, 1990: 118). Nada mengecam terhadap demokrasi juga disampaikan oleh Sayyid Qutub, ia mengatakan bahwa demokrasi adalah sebuah pelanggaran terhadap kekuasaan Tuhan dan merupakan suatu bentuk tirani sebagian orang kepada yang lainnya. Menurutnya mengakui kekuasaan Tuhan berarti melakukan penentangan secara menyeluruh terhadap kekuasaan manusia dalam seluruh pengertian, bentuk, sistem dan kondisi. Ia menambahkan bahwa agresi menentang kekuasaan Tuhan adalah bentuk jahiliyah. Ia menandakan bahwa negara Islam harus berlandaskan pada prinsip musyawarah, karena Islam sebagai sebuah sistem hukum dan

moral sudah lengkap, sehingga dengan demikian tidak ada lagi legislasi lain yang mengatasinya. Pendapat serupa pula dikatakan oleh Mutawali al-Sya'rawi seorang ulama besar asal Mesir yang mengatakan bahwa Islam dan demokrasi tidak bersesuaian, dan *syura* tidak dengan sendirinya demokrasi mayoritas kepada yang lainnya. Menurutnya mengakui kekuasaan Tuhan berarti melakukan penentangan secara menyeluruh terhadap kekuasaan manusia dalam seluruh pengertian, bentuk, sistem dan kondisi. Ia menambahkan bahwa agresi menentang kekuasaan Tuhan adalah bentuk jahiliyah. Ia menandakan bahwa negara Islam harus berlandaskan pada prinsip musyawarah, karena Islam sebagai sebuah sistem hukum dan moral sudah lengkap, sehingga dengan demikian tidak ada lagi legislasi lain yang mengatasinya. Pendapat serupa pula dikatakan oleh Mutawali al-Sya'rawi seorang ulama besar asal Mesir yang mengatakan bahwa Islam dan demokrasi tidak bersesuaian, dan *syura* tidak dengan sendirinya demokrasi mayoritas (Kamil, 2002: 48). Ali Benhadji (Dalam Esposito, 1999: 214) seorang pemimpin FIS (*Front Islamique du Salut*) mengatakan bahwa konsep demokrasi adalah sebuah konsep Yudeo-Kristen yang harus diganti dengan prinsip-prinsip kepemimpinan yang inhern dalam Islam. Para teotitisi politik Barat sendiri, kata Benhadji mulai melihat sistem demokrasi adalah sistem yang cacat. Menurutnya demokrasi hanya dinilai baik jika lebih menguntungkan Barat daripada negara Islam itu sendiri. Muhammad Husein Heikal (1993: 95) berusaha menjembatani dengan berpendapat bahwa kebebasan, persaudaraan, dan persamaan yang merupakan semboyan demokrasi dewasa ini juga termasuk di antara prinsip-prinsip utama Islam. Kaidah-

kaidah yang ditetapkan oleh paham demokrasi sekarang sebenarnya juga merupakan kaidah-kaidah Islam.

Periodisasi Pemikiran Politik Islam

Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di kalangan umat Islam telah melahirkan pemikiran-pemikiran politik di masa selanjutnya, yang merupakan respon terhadap peristiwa dan hasil refleksi para pemikir politik. Hal ditandai dengan munculnya sejumlah pemikir politik Islam seperti Ibn Abi Rabi', Al-Ghazali, Al-Farabi, Ibn Taymiyah dan lain-lain. Pemikiran Islam terbagi menjadi tiga periode besar, yakni periode klasik, pertengahan, dan modern. Periode klasik berlangsung sejak abad ke-7 hingga abad ke-13 (1258M), periode pertengahan berlangsung sejak abad ke-14 hingga abad ke-19 (periode kejatuhan Abbasiyah hingga zaman kolonialisme), dan periode modern yang berlangsung sejak abad 19 (kolonialisme) hingga sekarang (Iqbal, 2001: 20) .

Periode Klasik

Ciri yang menandai perkembangan kajian fiqh siyasah pada periode klasik adalah kemapaman yang terjadi di dunia Islam. Secara Politik Islam memegang kekuasaan dan pengaruhnya di pentas Internasional. Masa ini merupakan masa ekspansi, integrasi dan keemasan Islam. Masa awal pada periode ini dimulai di masa Nabi Muhammad Saw masa dimana seluruh semenanjung Arabia telah tunduk di bawah kekuasaan Islam. Ekspansi ke daerah-daerah keluar Arabia dimulai di zaman khalifah Abu Bakar as-Siddiq hingga masa kekuasaan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah sebagai puncak kejayaan Islam.

Pada masa awal-awal Islam hingga masa Dinasti Umayyah, pemikiran politik Islam belum begitu kuat muncul di kalangan intelektual Islam, meskipun sudah ada gerakan oposisi dari kelompok Khawarij dan Syi'ah. Hal ini disebabkan oleh konsentrasi Dinasti Umayyah yang lebih banyak berorientasi pada pengembangan kekuasaan. Barulah pada masa Dinasti Abbasiyah pemikiran politik Islam dikembangkan oleh sejumlah intelektual islam seiring dengan prestasi intelektual Dinasti Abbasiyah yang telah berhasil mengembangkan ilmu pengetahuan dari berbagai bidang. Para intelektual yang muncul pada masa periode klasik adalah: Ibn Abi Rabi' (833-842M) yang menulis *Suluk al-Malik fi Tadbir al-Mamalik*. (Perilaku Raja dalam Pengelolaan Kerajaan-Kerajaan). Al-Farabi (870-950M) yang menulis *Ara Ahl al-Madinah, al-Fadhilah* (Pandangan-Pandangan Para Penghuni Negara Utama), *Tahsil al-Sa'adah* (Jalan Mencapai Kebahagiaan), dan *Al-Siyasah al-Madaniyah* (Politik Kenegaraan). Al-Mawardi (975-1059M) yang menulis *Al-Ahkam al-Sulthaniyah fi al-Wilayah al-Diniyah* (Peraturan-Peraturan Pemerintahan). Al-Ghazali (1058-1111M) menulis *Ihya Ulum al-Din* (Menghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama), *Al-Tibr al-Masbuk fi Nasihah al-Mulk* (Batangan Logam Mulia tentang Nasihat untuk Raja), *Al-Iqtishad fi al-I'tiqad* (Moderasi dalam Kepercayaan), dan *Kimiya-yi Sa'adah*.

Ada beberapa ciri yang menonjol dari pemikiran politik Islam di zaman klasik: Pertama adanya pengaruh alam pikiran Yunani, terutama pandangan plato tentang asal-usul negara, meskipun kadar pengaruhnya tidak sama. Plato dalam teorinya menyatakan bahwa negara terbentuk karena banyaknya kebutuhan manusia yang tidak dapat dipenuhi oleh kekuatan dan kemampuan sendiri. Maka manusia bekerja sama dan

bersatu. Persekutuan hidup dan kerja sama yang semakin lama semakin terorganisasi dengan baik itu, kemudian membentuk negara. Teori ini kemudian diambil para pemikir politik Islam. Sebagai konstruksi filosofis terbentuknya negara, seperti yang terlihat dari karya Ibn Abi Rabi' dalam *Suluk al-Malik fi Tadbir al-Mamalik*, Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyah fi al-Wilayah al-Diniyah* serta Al-Farabi dalam *Al-Madinah al-Fadhilah* dan *Ahl-al Madinah al-Fadhilah*.

Pandangan Ibn Abi Ar-Rabi', dalam beberapa hal, juga mendapat dukungan dari Al-Ghazali (1058-1111M). Al-Ghazali, dalam kitabnya *Al-Iqtishad fi al-I'tiqad*, menyebutkan bahwa kekuasaan kepala negara adalah kudus (suci). Karenanya, umat tidak boleh memberontak terhadap kekuasaan. Berbeda dengan mereka, Al-Mawardi (975-1059) memungkinkan pemecatan kepala negara dari jabatannya. Al-Mawardi juga mengemukakan teori "kontrak sosial" antara kepala negara dan rakyatnya. Karena kepala negara diangkat melalui kontrak sosial, maka Al-Mawardi meniscayakan adanya pemberhentian kepala negara dari jabatannya.

Pengaruh Plato jelas sekali dalam pandangan al-Farabi ketika ia membagi warga ke dalam tiga kelas sosial, yaitu kelas pemimpin, kelas tentara, dan kelas rakyat jelata. Menurutnya, kepala negara haruslah seorang filosof, karena filosoflah yang dapat membawa manusia ke dalam kebaikan dan hikmah. Kedua, pemikiran politik yang berkembang lebih banyak pada kondisi realistik social-politik. Pemikiran mereka lebih banyak dilahirkan sebagai respon terhadap kondisi sosial-politik yang terjadi. Bahkan di antara pemikir ada yang mendasarkan gagasannya pada pemberian legitimasi kepada sistem pemerintahan yang ada atau mempertahankan status

quo bagi kepentingan penguasa, baru kemudian menawarkan saran-saran perbaikan dan reformasi, seperti dalam karya Ibn Abi Rabi' (833-842M) dalam *Suluk al-Malik fi Tadbir al-Mamalik*.

Di sisi lain Syiah, Khawarij, dan Mu'tazilah juga mengembangkan gagasan politik masing-masing. Syiah selalu mempropagandakan pandangan tentang keutamaan 'Ali dan keluarganya sebagai khalifah serta doktrin kema'suman imam. Meski tampil sebagai oposisi, kaum Syiah juga pernah mendirikan kerajaan sendiri yang lepas dari pengaruh Abbasiyah, yaitu Bani Buwaihi di Baghdad dan Daulah Fathimiyah di Mesir. Sedangkan Khawarij, karena sikap ekstrem dan radikal mereka, tidak begitu berpengaruh dalam pentas politik. Pemikiran politik mereka tidak tersusun secara sistematis dalam sebuah karya. Dari pandangan kelompok-kelompok di atas dapat ditarik benang merah bahwa pemikiran politik pada periode klasik ini pada umumnya diwarnai oleh kepentingan-kepentingan golongan. Dalam hal ini, kelompok Sunni masih mendominasi percaturan politik ketika itu dan para pemikir politik mengembangkan doktrin-doktrin mereka di bawah patronase kekuasaan. Sejalan dengan meningkatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan transfer ilmu asing (terutama Yunani Kuno) ke dalam Islam gagasan-gagasan politik pada abad klasik ini juga ditandai dengan pengaruh-pengaruh asing.

Periode Pertengahan

Periode pertengahan dibagi menjadi dua masa; masa kemunduran pertama dan masa tiga kerajaan besar (Usmani di Turki, Safawi di Persia, Mughal di India). Periode pertengahan ditandai dengan hancurnya Dinasti Abbasiyah di tangan tentara

Mongol yang mengakibatkan dunia Islam semakin terpuruk. Tak heran jika pemikir politik Islam pada periode ini mencerminkan kecenderungan reponsif-realis terhadap kejatuhan dunia Islam. Beberapa intelektual yang muncul adalah; Ibn Taimiyah yang menulis *al-siyasah al-syar'iyah fi Islah al-Ra'I wa al Ra'iyah*. Ibn Khaldun yang menulis *Muqaddimah*. Syah Waliyullah al-dahlawi.

Ibn Taymiyah merumuskan teori politiknya dalam *al-siyasah al-syar'iyah fi Islah al-Ra'I wa al Ra'iyah*. *Majmu' al-Fatawa*, dan *Minhaj al-Sunnah* sebagai jawaban terhadap situasi dan kondisi yang dialaminya sebagai suatu akomodasi terhadap kenyataan yang dihadapinya.

Pemikiran politik ibn Taimiyah bertumpu pada dua hal yakni *al-amanah* (kejujuran) dan *al-quwwah* (kekuatan) sebagai syarat mutlak kepala Negara. Menurutnya jika dalam suatu walayat (jabatan dalam pemerintahan) lebih menuntut kebutuhan akan adanya sikap amanat orang yang memiliki kejujuran untuk mengemban amanat adalah yang lebih pantas menduduki posisi kepala negara.

Pemikir lainnya, Ibn Khaldun yang menulis *Muqaddimah* merupakan respon terhadap situasi dan kondisi yang dialaminya. Dalam kondisi kekuatan islam semakin lemah. Menurutnya, manusia tidak bisa hidup tanpa adanya organisasi kemasyarakatan dan tanpa kerjasama dengan sesama manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga manusia secara alamiah membutuhkan negara. Teori ini mirip dengan teori Plato.

Sementara itu Syah Waliyullah al-Dahlawi (1702-1762) justru bersikap kritis dengan mengajukan pemikiran yang membenarkan pembangkangan rakyat terhadap kepala negara

yang tiran dan zalim. Syah Waliyullah bahkan menegaskan bahwa pemerintahan pada periode pasca kepemimpinan al-Khulafa al-Rasyidun hanyalah berbeda sedikit saja dari kerajaan Romawi dan Kekaisaran Persia. Karena itulah, untuk mengembalikan pemerintahan seperti pada masa Nabi dan Khulafa al-Rasyidun, Syah Waliyullah membenarkan pembangkangan rakyat terhadap kepala negara yang zalim.

Periode Modern

Periode modern ditandai kolonialisme yang melanda negeri-negeri muslim. Hampir seluruh dunia Islam berada di bawah penjajahan Barat. Dunia Islam tidak mampu bangkit dari kemunduraan yang berkepanjangan. Kemunduran Islam disebabkan oleh faktor-faktor internal dan yang berakibat munculnya gerakan-gerakan pembaharuan dan pemurnian. Rongrongan Barat terhadap keutuhan kekuasaan politik dan dunia Islam yang berakhir dengan penjajahan. Keunggulan Barat dalam bidang ilmu, teknologi dan organisasi. Kecenderungan yang seperti itu membuat sebagian pemikir ada yang mencoba meniru Barat, ada juga yang menolak Barat dan menghendaki kembali kepada kemurnian Islam. Maka, dalam periode ini ada tiga kecenderungan pemikiran politik islam, yaitu integralisme, interseksion dan sekularisme.

Kelompok pertama memiliki pandangan bahwa agama dan politik adalah menyatu dan tidak terpisahkan. Karena tugas negara adalah menegakkan sehingga negara Islam menjadi cita-cita Bersama karena itu syariat Islam menjadi hukum negara yang dipraktikkan oleh seluruh umat Islam. Kelompok ini diwakili oleh: Muhammad Rasyid Ridha, yang menulis *Al-Khilafah wa al-Imamah al-Uzhma* dan tafsir *Al-Manar*. Hasan Al-

Banna, pendiri gerakan Ikhwanul Muslimin. Abu al- A'la al-Maududi, yang menulis *Al-Khilafah wal Mulk* dan *Islamic Law and Constitution*. Sayyid Quthb, ideolog gerakan Ikhwanul Muslimin yang menulis *Al'Adalah al-ijtima'iyah fi al-Islam*. Imam Khomeini, pemimpin revolusi islam Iran 1979.

Kelompok kedua berpendapat bahwa agama dan politik melakukan hubungan timbal balik yang saling bergantung. Agama membutuhkan negara untuk menegakkan syariat, sementara negara membutuhkan agama untuk mendapat legitimasi. Kelompok ini diwakili oleh: Muhammad Abduh, tokoh pembaharu Mesir, Muhammad Iqbal, bapak pendiri negeri Pakistan. Muhammad Haykal, yang menulis *Al-Humumat al-Islamiyat*. Fazlur Rahman, bapak pembaharu Pakistan yang menulis *Islam and Modernity*.

Kelompok ketiga memiliki pandangan bahwa agama harus dipisahkan dengan negara dengan argumen Nabi Muhammad Saw tidak pernah memerintahkan mendirikan negara. Terbentuknya negara dalam masa awal Islam hanya faktor alamiah dan historis dalam kehidupan masyarakat, sehingga tidak perlu mendirikan negara Islam.

Kelompok ini diwakili oleh: Ali Abd al-Raziq, yang menulis *Al-Islam wa Ushul al-Hukm*. Thaha Husein yang menulis *Mustaqbal al-Tsaqafah fi Mishr*. Mustafa Kemal Attaturk, pendiri republic Turki Modern.

BAB III

KAJIAN EMPIRIS MANHAJ DAKWAH HASAN AL-BANNA DAN MOHAMMAD NATSIR

Biografi dan Manhaj Hasan al-Banna

Mesir pada sekitar awal tahun 1900M adalah suatu negara yang tercabut dari akarnya setelah pihak sekutu yang menang perang menyingkirkan pengaruh kerajaan Turki Usmani dan setelah Mustafa Kemal Attaturk menyingkirkan sistem khilafah Islam lalu mempropagandakan negara sekular. Saat itu Inggris mengadakan perjanjian Sykes Piccot yang diadakan di Moscow tahun 1915. Mesir jatuh di bawah kekuasaan Inggris, meskipun secara lahiriah memperoleh kemerdekaan (Yusuf al-Qaradhawi 1999). Kemunduran seperti inilah yang dialami oleh hampir seluruh dunia Islam. Penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Eropa terhadap dunia Islam yang diawali dengan jatuhnya Khilafah Islamiyah di Turki, menyebabkan kondisi umat Islam sangat lemah. Dalam kondisi seperti inilah seorang ulama dan da'i besar seperti Hasan al-Banna dilahirkan. Itulah Hasan Ahmad Abdurrahman Muhammad al-Banna, lahir dari sebuah keluarga penuh dengan warna keislaman di jantung pedalaman Mesir, tepatnya di Syamsir. Ia tumbuh dalam keluarga yang penuh dengan taqwa dan ilmu. Ayahnya Ahmad Abdurrahman, adalah khatib Masjid al-Mahmudia adalah seorang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang luas dalam ilmu Hadis. Diantara hasil karyanya adalah:

1. *Al-Fathu al-Rabbani fi Tartibi Musnadi al-Imam Ibnu Hanbal al-Shaibani.*
2. *Al-Qalu al-Minan fi Jam'i wa Tartibi Musnadi al-Syafi'i wa al-Sunan* (Fathi Yakan t.th.).

Dalam lingkungan yang penuh dengan tawadhu', kesucian dan suasana yang Islami ini, lahirlah al-Ustadz Hasan al-Banna. Kesederhanaan, lingkungan yang bersih dan suasana keluarga yang penuh dengan nilai keislaman adalah warna-warna indah yang turut mewarnai kepribadian Hasan sejak kecil sehingga ia tumbuh dewasa. Seorang saudara kandungnya, Abdurrahman al-Banna (1995), berkisah mengenai masa kecil Hasan al-Banna yang penuh dengan aktivitas. Untaian kalimat ini ditulis untuk mengenang Syahidnya Hasan al-Banna yang menyatakan:

Ketika itu engkau berusia 9 tahun dan aku 7 tahun. Kita selalu bersama-sama pergi ke Maktab untuk menghafal al-Qur'an dan menulis di papan. Engkau sudah menghafal dua pertiga al-Qur'an dan aku sepertiganya, dari surah *al-Baqarah* sampai *al-Taubah*. ...Semua mata pelajaran menuntut kita serius dan bersungguh-sungguh. Karenanya kita selalu mengatur waktu dan menyusun jadwal belajar. Dulu -wahai sebaik-baik orang yang kukenal- engkau selalu melaksanakan ibadah *siyam* dan *qiyamul lail*. Engkau biasa bangun diwaktu sahur kemudian shalat. Setelah itu kau bangunkan aku untuk shalat subuh. Seusai shalat, engkau membacakan jadwal mata pelajaran untukku. Sampai kini suaramu yang masih terngiang di telingaku adalah:

Pukul 05.00 – 06.00 : pelajaran al-Qur'an

Pukul 06.00 – 07.00 : pelajaran Tafsir dan Hadith

Pukul 07.00 – 08.00 : pelajaran Fiqh dan Usul Fiqh

Demikian kau mulai dan aku mengikuti. Engkau menyuruh dan aku mentaati.

Kecintaan keluarga Hasan al-Banna terhadap ilmu sangatlah besar. Ayahnya telah mendidiknya untuk menjadi seorang yang selalu mencintai dan menghargai ilmu. Kenyataan ini terungkap dari penuturan saudaranya (Ibid: 10) yang menyatakan:

Ketika itu perpustakaan ayah penuh dengan berjilid-jilid buku. Setiap saat kita mengitari dan mengamati judul-judulnya berkilatan bagai emas. Terbaca oleh kita: *Al-Naisaburi*, *Al-Qustallani*, *Nailu al-Authar*, dan masih banyak lagi. Kita juga menghadiri diskusi beliau dengan hadirin yang terdiri dari para ulama, seperti : al-Mukarram Syeikh Muhammad Zahran rahimahullah dan al-Mukarram Syeikh Hamid Muhaisin.

Ejak kecil ayahnya telah mendidik Hasan al-Banna dengan agama dan tahfiz al-Qur'an. Dia memperoleh pendidikan formal tingkat dasar di *Madrasah Diniyah al-Rasyad*. Kemudian pindah ke *Madrasah Idadiyah* di Al-Mahmudiyah. Kemudian melanjutkan ke *Dar al-Mu'allimin* di Damanhur tahun 1920. Di sana ia menyelesaikan hafalan al-Qur'an sedang usianya belum genap 14 tahun. Pada tahun 1923 dia pindah ke Kairo untuk melanjutkan studinya di *Dar al-Ulum*. Dia lulus tahun 1345H/ 1927M dengan mendapat rangking pertama. Selanjutnya dia diangkat menjadi guru di Ismailiyah, Terusan

Suez. Di sanalah lahir bibit-bibit jamaah Ikhwanul Muslimin. Peristiwa itu terjadi pada bulan *Zulqa'dah* 1347H/ Maret 1928M pada tahun 1932.

Ketika Hasan al-Banna pindah ke Kairo, pindahlah markas besar Ikhwanul Muslimin ke kota itu. Pada tahun 1948 kaum penjajah dan sekutunya bekerjasama menghancurkan Ikhwan. Negara-negara Barat menekan pemerintah Mesir untuk menghancurkan jamaah ini dan menangkap para mujahidin sekembali mereka dari perang di Palestina (Abdul Halim Hamid 1996: 22).

Setelah menjalani jihad agung, Allah mengkaruniakan padanya (Syahid) sebagai ganjaran amalannya. Peristiwa itu terjadi di salah satu jalan raya Kairo tanggal 14 *Rabi'uts-tsani* 1367H/ 12 Februari 1949M, setelah ditembak oleh orang suruhan Raja Farouq. Umar Tilmisani (1961: 115-116), salah seorang muridnya yang juga menjadi Mursyid Am Ikhwanul Muslimin ke-tiga mengisahkan saat-saat pembunuhan itu dengan menulis:

Pada 12 Februari 1949 seorang menteri menghubungi Imam Syahid dan meminta beliau untuk menemuinya di gedung *Jam'iyah Syubban al-Muslimin*, terletak di sebuah jalan paling ramai di Kairo. Di depan gedung tersebut, bersama dengan Ustadz Abdul Karim Manshur, Imam Syahid menunggu. Ketika matahari terbenam dan menteri ini tidak menepati janjinya, Imam Syahid dengan iparnya keluar dari gedung dan memberhentikan sebuah taxi. Tiba-tiba lampu penerang jalanan dimatikan dan muncullah dua atau tiga orang mata-mata lalu melepaskan tembakan peluru ke arah

Imam Syahid dan iparnya. Meskipun lukanya begitu parah, tapi beliau mampu menahannya. Imam Syahid kembali masuk ke dalam gedung *Syubban al-Muslimin* dan meminta bantuan ambulan. Ambulan membawa kaduanya ke istana *al- 'Aini*. Perintah dikeluarkan agar Imam Syahid tidak diberikan pertolongan. Para jururawat akhirnya meninggalkan dan membiarkan darah mengalir dari tubuh beliau. Sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir, Raja Farouq datang untuk memaki dan meludahi tubuh Imam Syahid. Sambil membuka matanya, Imam Syahid berkata kepada Farouq, "Semoga Allah merobek-robek kerajaanmu." Ternyata pintu-pintu langit terbuka. Allah menerima doa orang yang dizdalimi, tak lama kemudian kerajaan Farouq hancur untuk selama-lamanya.

Sejarah telah mencatat kebesaran tokoh seperti Hasan al-Banna, yang sekarang sedang menanti penyebaran dakwah yang telah dirintisnya di hampir 70 negara dunia Islam. Walau jasadnya telah tiada, namun peninggalannya berupa manhaj dakwah terus hidup sampai sekarang.

Pendidikan Hasan al-Banna

Sebagaimana diungkapkan dalam riwayat hidup diatas bahwa pendidikan Hasan al- Banna dimulai dengan pengajaran langsung dari ayahnya yang alim dan mulia. Sejak kecil beliau sudah dididik dengan menghafal al-Qur'an, sunnah dan akhlak mulia. Pada usia 9 tahun beliau sudah menghafal dua pertiga dari al-Qur'an.

Mengenai pendidikan formalnya, Hasan al-Banna memulai dari *Madrasah Al-Rashad* yang dibina oleh Syaikh Muhammad Zahran. Beliau menulis dalam Memoar-nya (1999):

Semoga Allah berkenan mencurahkan rahmat kepada Ustadz kami Syaikh Muhammad Zahran, pemilik *Madrasah Diniyah al-Rashad*. Beliau adalah seorang yang brilian, berilmu, bertaqwa dan berwibawa. Meskipun peringkat pendidikan beliau secara formal tidak sampai pada tingkatan ulama yang rasmi, tetapi kecerdasan, kemauan dan kesungguhan beliau telah menjadikan beliau berada jauh didepan dalam bidang ilmu dan amal.

Sebagai tempat menimba ilmu pengetahuan maupun pelatihan peribadi, bisa dikatakan itu sebagai madrasah yang istimewa dalam bidang materi yang diajarkan maupun metodologi yang dilaksanakan. Materi-materi pelajaran yang ada disamping materi-materi yang popular diajarkan di berbagai madrasah sepertinya, juga ditambah dengan hadis-hadis Nabi dengan target menghafal dan memahaminya. Mengenai pelajaran yang diajarkan beliau menyatakan bahwa madrasah ini juga mengajarkan *insya'* (mengarang), *qawa'id* (tata bahasa) dan *tatbiq* (praktek)-nya. Selain itu juga diajarkan tentang adab (tata krama) yang dituangkan dalam pelajaran *mutala'ah* (wacana) atau *imla'*, serta *mahfudzat* (hafalan) yang ditulis dalam bentuk puisi atau prosa yang indah. Materi-materi semacam ini tidak popular di madrasah-madrasah lain yang semisal dengannya (Hasan al-Banna 1999: 27).

Beliau juga sangat menghormati serta memuliakan gurunya, ini terungkap dalam pernyataannya (Ibid) :

Ustadz Muhammad Zahran menguasai tehnik mengajar dan mendidik yang efektif dan membawa hasil, meskipun tidak pernah belajar ilmu-ilmu pendidikan dan tidak pernah mendapatkan kaidah-kaidah ilmu psikologi. Beliau lebih banyak bersandar pada kebersamaan hati nurani antara dirinya dengan murid-muridnya. Beliau sangat berhati-hati dalam menghadapi mereka dengan selalu menaruh kepercayaan kepada mereka dan memberikan penghargaan atas tindakan baik mereka atau memberikan hukuman yang mendidik atas tindakan buruk mereka, yang hal itu akan menimbulkan keridhaan dan kegembiraan didalam jiwa.

Setelah empat tahun di madrasah ini Hasan al-Banna kemudian pindah ke madrasah *I'dadiyah*. Beliau menyatakan bahwa, Ustadz-nya mempunyai banyak kesibukan, sehingga beliau tidak dapat mengelola madrasahnyanya lagi. Beliau menyerahkannya kepada Ustadz-Ustadz lain yang tentu saja kurang sebanding dengannya dalam hal kekuatan ruhani, keilmuan, pengetahuan serta akhlaknya yang memukau. Sehingga Hasan al-Banna yang pernah merasakan manisnya kebersamaan dengan beliau, tidak sabar lagi untuk terus bersama mereka, sekalipun ia belum juga selesai menghafal al-Qur'an dan belum dapat mewujudkan keinginan ayahnya yang tinggi, ingin melihat putranya menjadi seorang hafiz Qur'an....Ketika itu pula tiba-tiba ayahnya menyampaikan suatu rencana yang mengejutkan, ia harus pindah dari sekolah ini ke madrasah *I'dadiyah*.

Ayahnya yang bersemangat itu tetap menginginkan anaknya selalu menghafal al-Qur'an. Akhirnya diambillah jalan keluar, hafalan Qur'annya diselesaikan di rumah saja. Belum seminggu, anak ini sudah menjadi siswa di *Madrasah I'dadiyah*. Dengan demikian ia harus membagi waktunya untuk pelajaran sekolah di siang hari dan aktivitas lain yang ia lakukan setelah pulang sekolah sehingga tiba waktu salat isya'. Kemudian ia pun harus mengulangi pelajaran sekolah (belajar malam) hingga waktu tidur. Ia mengambil waktu untuk menghafal al-Qur'an setelah salat hingga menjelang berangkat ke sekolah (Ibid: 29).

Dewan tutorial kota Bahirah menetapkan penghapusan sistem *Madrasah I'dadiyah* dan diganti dengan *Madrasah Ibtida'iyah*. Maka tidak ada alternatif lain bagi siswa ini kecuali harus memilih mendaftarkan diri ke *Al-Ma'had al-Diniy* di Iskandaria -agar kelak menjadi 'Azhari' (gelar bagi alumni Al-Azhar)- atau ke *Madrasah al-Mu'allimin al-awlawiyah* di Damanhur untuk dapat menyingkat waktu, Karena setelah tiga tahun menempuh pelajaran di sini akan menjadi seorang guru. Akhirnya pilihan kedua inilah yang ia pilih (Ibid: 34).

Mengenai kesan khusus selama di *Madrasah Mu'allimin*, Hasan al-Banna menyatakan, "Hari-hari belajar di *Madrasah Mu'allimin* selama tiga tahun adalah hari-hari saya tenggelam dalam lautan tasawuf dan ibadah. Meskipun demikian, saya tidak ketinggalan dan tetap berhasil mengikuti seluruh pelajaran sesuai dengan kurikulum yang ditargetkan madrasah" (Ibid: 59).

Pendidikan Hasan al-Banna selanjutnya adalah madrasah *Dar al-'Ulum* Kairo, dan ini merupakan pendidikan formal terakhir beliau sebelum terjun ke masyarakat menjadi seorang dai dan mujahid di jalan Allah. Waktu terus berlalu seakan

melapangkan jalan bagi Hasan al-Banna untuk menggapai harapannya. Sampai pada suatu ketika, ia diminta untuk menulis artikel -tahun terakhir di *Dar al-'Ulum*, 1927- yang judulnya adalah: "Jelaskan cita-citamu yang tertinggi setelah tamat kuliah dan terangkan yang akan kamu pergunakan untuk merealisasikannya." Jawaban Hasan al-Banna atas perintah tersebut adalah sebagaimana dikutip oleh Badr Abdurrazzaq (1995: 58) menyatakan :

Saya yakin bahwa jiwa yang paling baik adalah jiwa *thayyibah*, yakni jiwa yang merasa bahagia apabila dapat membahagiakan dan mampu membimbing orang lain. Merasa senang ketika dapat membuat orang lain senang dan mengusir kesedihannya. Menganggap semua pengorbanan dalam melakukan *ishlah* dan dakwah *ilallah* sebagai keuntungan dan *ghanimah* serta menganggap ujian dan kesulitan didalamnya sebagai kenikmatan...

Biografi Mohammad Natsir

Bumi Minangkabau, di Kampung Jambatan Baukia Alahan Panjang, negeri dingin di balik gunung Talang Solok menjadi saksi kelahiran seorang tokoh yang mendapat julukan 'Pembawa hati nurani umat' (Dewan Dakwah Sumbar 2001). "Delapan puluh satu tahun yang lalu, saya dilahirkan dari pasangan suami istri Sutan Sari Pado-Khadajah. Tepatnya pada 17 Juli 1908, di Alahan Panjang, Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatra Barat. Saya dibesarkan dari sebuah keluarga muslim yang taat. Ayah saya, seorang kerani konteler, banyak mendorong saya agar mendalami agama. Kebetulan rumah saya juga dekat dengan mesjid" (Mohammad Natsir 1998:1).

Selanjutnya tentang kesan pendidikan dari orang tuanya yang begitu kuat, Natsir menyatakan, “Demikianlah sejak kecil makanan saya sehari-hari mengaji. Sejak di *Hollands Inlands School (HIS)* saya sudah mengaji di surau. Menginjak kelas II, saya tinggal di rumah seorang saudagar, Haji Musa namanya, di Solok. Selepas mahgrib, malam hari saya mengaji. Mencari guru, tempat saya berdialog. Kebetulan, waktu itu ada guru ngaji tamatan sekolah di Sumatra Thawalib. Dorongan untuk belajar agama dari orang tua begitu kuat. Pagi saya sekolah umum, sore masuk sekolah agama (*Madrasah Diniyah*), dengan belajar bahasa Arab, dan malam hari mengaji. Disitu guru-gurunya sangat aktif berdakwah. Melihat saya bersungguh- sungguh, guru itu tertarik. Lalu, saya bisa mengaji kitab kuning, sementara teman-teman yang lain belum bisa membacanya” (Ibid: 1).

Ayahnya mula-mula bekerja sebagai kerani kontrolir di Alahan Panjang, lalu menjadi Asisten Demang di Bonjol, kemudian pindah menjadi kerani kontrolir di Maninjau, akhirnya sebagai Sipir (penjaga penjara) di Bakeru Selatan dan sesudah itu kembali ke Alahan Panjang. Natsir sendiri lahir di Alahan Panjang Kampung Jembatan Berukir (Ajip Rosidi, 1990:145).

Ditinjau dari asal-usulnya, Mohammad Natsir merupakan keturunan ulama. Datuknya termasuk salah seorang ulama besar di Minangkabau. Keluarga dan familinya kebanyakannya cerdik pandai dan termasuk golongan terpelajar serta banyak yang menjadi pegawai pemerintah pada masa penjajahan Belanda. Dari dua aliran inilah Natsir diasuh sejak

kecilnya dan kemudian kedua aliran ini berkumpul dalam dirinya, yaitu ulama dan ilmuwan. Dalam perjalanan hidupnya, ulama dan ilmuwan tertanam dalam jiwanya dan mewarnai keperibadiannya. Keluarganya sangat menginginkan supaya Natsir kelak menjadi orang yang pandai, mendalam ilmunya baik ilmu agama maupun ilmu umum (St Rais Alamsyah 1952: 84).

Masa kecil M Natsir lalui di tengah pergolakan pemikiran para tokoh besar pembaharu dari Ranah Minang. Belajar pada pendidikan dasar sekolah Belanda, Natsir kecil dengan tekun mengikuti pengaruh para tokoh besar di negerinya. Dari usia delapan tahun (1916) sampai 15 tahun (1923) Natsir menggali kekayaan ilmu para ulama di HIS Adabiyah Padang dan Madrasah diniyah Solok (Dewan Dakwah Sumbar 2001). Mohammad Natsir setelah dewasa bergelar Datok Sinaro Panjang, beliau adalah seorang yang berkarisma tinggi. Peranan Natsir sebagai seorang tokoh intelektual, politikus, pemimpin negara maupun tokoh dunia Islam yang terkemuka di abad 20, tidak pernah selesai menjadi buah pembicaraan orang. Padahal dari segi asal-usul dan jasmaninya, Natsir hanyalah orang biasa, dengan perawakan yang lemah lembut, berbicara penuh sopan santun, dan kadang-kadang gemar bercanda dengan siapa saja yang menjadi teman bicaranya. Namun dibalik perawakannya yang lemah lembut dan mudah tersenyum itu, peribadi Natsir adalah ibarat batu karang yang kukuh. Beliau termasuk seorang yang teguh memegang prinsip, walau dalam berhubungan dengan orang lain, beliau terkesan terbuka dan malahan lebih kompromistik, (sejauh kemungkinan kompromi-kompromi itu memang dapat

dicapai tanpa mengorbankan prinsip-prinsip yang diyakininya (Yusril Ihza Mahendra 1996: 1).

Mohammad Natsir pernah aktif di bidang pendidikan Islam (Pendis) di Bandung sebuah bentuk pendidikan Islam modern yang bernafaskan agama. Natsir pernah diamanahkan untuk menjadi pengarah selama 10 tahun, sejak tahun 1932. Selain itu, Natsir pernah menjadi anggota Dewan Kabupaten Bandung pada tahun 1940-1942M, dan kepala Biro Pendidikan Kota Bandung tahun 1942-1945M. Pada tahun 1945M, Mohammad Natsir menjadi anggota Badan Pekerja KNIP, yang jumlah anggotanya mencapai 232 orang. Mohammad Natsir berhenti menjadi anggota KNIP, ketika beliau ditawarkan menjadi Menteri Penerangan selama tiga periode pada era Kabinet Sahrir dan Hatta, pada tahun 1946-1949M. Pada tahun 1950M, peranan Mohammad Natsir sangat menentukan dalam penyelamatan Negara Republik, persatuan bangsa dan kesatuan negara Indonesia, antara lain terkenal dengan nama "*Mosi Integral Natsir*" , sehingga memungkinkan Republik Indonesia yang telah berpecah belah menjadi 17 negara bagian kembali menjadi negara kesatuan yang wilayahnya membentang dari Sabang hingga Merauke. Atas jasanya ini, Bung Karno mengangkat Natsir sebagai Perdana Menteri Pertama Republik Indonesia. Ini adalah jenjang karier politik Natsir tertinggi sepanjang hidupnya. Meskipun bukan akhir pangabdiannya pada bangsa dan Negara (Dewan Dakwah Sumbar 2001).

Sejak tahun 1949 Mohammad Natsir dikenal sebagai ketua umum DPP Masyumi, partai terbesar di Indonesia pada saat itu. Jabatan penting tersebut dipegangnya sampai tahun 1958. Dalam kedudukannya, beliau sebagai orang pertama dan juru bicara partai politik Islam. Karena Mohammad Natsir

sebagai Ketua Masyumi, pada tahun 1950, beliau menjadi anggota parlemen R.I. fraksi Masyumi dan pada tahun 1956, Mohammad Natsir menjadi anggota tersebut mempunyai ide yang diperjuangkannya dalam sidang konstituante yaitu memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. Pada tahun berikutnya 1958, (Mohammad Natsir menjadi pemimpin PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) di Sumatera yang secara terang-terangan melawan Bung Karno, Karena Soekarno dianggap oleh Mohammad Natsir melanggar UUD (Undang-undang Dasar) 1945 dan telah memihak kepada PKI (Partai Komunis Indonesia) (Yusril Ihza Mahendra 1995).

Pada zaman Orde Lama di bawah pimpinan Bung Karno yang bekerja sama dengan PKI, bersama tokoh-tokoh nasional anti komunis lainnya, Mohammad Natsir dimasukkan dalam rumah tahanan militer pada tahun 1964, dan dikeluarkan pada tahun 1966, tanpa melalui pengadilan, yang terjadi setelah rejim Orde Lama ditumbangkan oleh massa kesatuan-kesatuan aksi (Ridwan Saidi 1993: 254). Sementara masih dalam tahanan, beliau turut berusaha mempermudah jalan bagi pemerintah Soekarno. Semasa dalam tahanan ini, beliau menulis secarik kertas kecil bersifat nota untuk Tunku Abdul Rahman (Perdana Menteri Malaysia) agar bersedia menerima utusan pemerintah Indonesia (yang sudah berada pada pimpinan Soeharto) untuk menghentikan konfrontasi dan menjalankan hubungan persahabatan kembali. Hanya dengan secarik kertas kecil itu, Tunku terbuka hatinya untuk menerima utusan pemerintah Indonesia (Deliar Noer 1995). Bantuan kedua yang beliau berikan adalah untuk memperlancar hubungan dan menimbulkan kepercayaan beberapa negara di Timur Tengah, antara lain: Kuwait dan Arab Saudi. Di kedua negara ini Natsir

memang dilihat sebagai pemimpin mereka juga, Natsir sudah diakui sebagai pemimpin Islam (Deliar Noer 1993). Setelah keluar dari tahanan, Mohammad Natsir memilih lapangan perjuangan dalam bidang dakwah Islamiah dan melakukan kunjungan ke negara-negara Timur Tengah atas undangan pemerintah tersebut.

Walaupun di masa tua Natsir tidak ingin lagi melibatkan diri dalam pertarungan politik secara langsung, dia tidak tinggal diam dalam menghadapi berbagai peristiwa politik. Sebagai salah seorang yang dihormati, kadang-kadang ia masih juga menggunakan pengaruh pribadinya untuk menumbuhkan suasana kehidupan politik yang lebih baik dan lebih demokratis, sesuai dengan konstitusi di negeri ini. Maka tidak heran ia ikut serta menandatangani protes yang kemudian lebih populer dengan sebutan "Petisi 50" (Anwar Haryono 1995: 123).

Akibat dari penandatanganan tersebut, beliau terkena cekal (cegah tangkal) oleh pemerintahan Soeharto yang berupa larangan untuk keluar negeri, berbicara dan menulis. Tentang hal ini Natsir hanya menanggapi: "Ke Luar negeri, ke Singapura tidak boleh, takut kalau saya kesasar, kali" (M. Natsir t.th: 22). Selain itu akibat dari larangan ini, Natsir gagal hadir untuk memperoleh gelar Doktor Honoris Causa dari dua universitas terkemuka di Malaysia yaitu UKM dalam bidang dakwah dan USM dalam bidang sejarah (Media Dakwah 1993).

Sikap politik Natsir yang paling akhir menjelang wafatnya, ialah dukungannya kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam Pemilihan Umum 1992. Natsir menganggap, partai politik perlu mendapatkan kursi yang lebih banyak di DPR, agar demokrasi tidak tenggelam dalam pemusatan kuasa salah satu kekuatan sosial-politik, yang dapat

membuka peluang lumpuhnya fungsi kontrol dari lembaga perwakilan rakyat itu (Anwar Haryono 1995: 125).

Zaman beredar musim berganti datangnya takdir Allah (s.w.t) pada hari Sabtu 6 Februari 1993 pukul 12.10 Wib, Mohammad Natsir meninggal dunia pada usia 85 tahun di rumah sakit Cipto Mangunkusumo setelah dirawat tiga bulan lamanya, karena menderita sakit radang paru-paru (Ridwan Saidi 1993: 14). Berita wafatnya menjadi berita utama di berbagai media cetak dan elektronik. Berbagai komentar muncul baik dari kalangan seperjuangan maupun lawan politiknya. Ada yang bersifat pro terhadap kepemimpinannya dan ada pula yang bersifat kontra. Mantan Perdana Menteri Jepang yang diwakili Nakadjima, menyampaikan ucapan dukacita atas kepergian M. Natsir dengan ungkapan, "Berita wafatnya M. Natsir terasa lebih dahsyat dari jatuhnya bom atom di Hiroshima" (Thohir Luth 1999). Situasi saat beliau meninggal, jutaan kaum muslimin merasa kehilangan atas kepergiannya. Ribuan umat Islam berta'ziah, mensalatkan dan menghantarkan almarhum ke tempat peristirahatan yang terakhir di tempat pemakaman umum (TPU) Karet, Tanah Abang, Jakarta Pusat (Ridwan Saidi 1993).

Banyak ahli menilai bahwa setelah meninggalnya M. Natsir, sulit untuk mencari tokoh pengganti sepertinya. Kemampuan dan keahliannya sebagai seorang yang multidimensi, yang dapat menggabungkan keahlian seorang negarawan dan ahli agama, sangat jarang dimiliki oleh kebanyakan orang. Perannya sebagai dai adalah kemampuannya juga yang khusus serta jarang dimiliki oleh kebanyakan orang.

Pendidikan Mohammad Natsir

Latar belakang pendidikan Mohammad Natsir diawali di sekolah rakyat berbahasa Melayu di Maninjau, pada tahun 1916. Sebenarnya dia telah bercita-cita ingin memasuki sekolah rendah berbahasa Belanda *Hollandsch Inlandsche School* (HIS). Akan tetapi keinginannya tidak tercapai, karena sekolah tersebut hanya diperuntukkan khusus untuk anak-anak pegawai pemerintah saja.

Ketika ayahnya dipindahkan ke Bakeru, beliau memasuki sekolah swasta HIS Adabiyah di Padang. Setelah beberapa bulan kemudian, beliau dipindahkan oleh orang tuanya ke HIS Pemerintah di Solok dan tinggal di rumah Haji Musa, seorang saudagar. Semasa beliau belajar di Solok, dorongan untuk belajar agama dari orang tuanya sangat kuat. Di waktu pagi Mohammad Natsir masuk sekolah umum, pada sore harinya masuk sekolah agama (Madrasah Diniyah) dengan belajar bahasa Arab dan malam hari mengaji pada gurugurunya. Melihat Mohammad Natsir bersungguh-sungguh, gurunya tertarik terhadap kepintaran Natsir sehingga diberikan pelajaran ekstra. Sementara teman lainnya belum dapat membacanya (Dewan Dakwah Sumbar 2001).

Tiga tahun kemudian beliau dipindahkan ke HIS Padang, dari kelas lima sampai kelas tujuh dan tinggal bersama kakaknya, Rabiah. Selama tujuh tahun, sejak tahun 1916-1923 merupakan masa belajar bagi Mohammad Natsir dengan serius. Akhimya pada tahun 1923, beliau menyelesaikan studinya di HIS dengan memperoleh nilai yang istimewa. Pada tahun 1923, Mohammad Natsir meneruskan pendidikannya di MULO (MEER Uitgebroid Lager Orderwigs) di Padang. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan di AMS (Algemene Middle Bare

School) di Bandung tahun 1927 -1930. Di kota kembang inilah Sejarah panjang perjuangannya di mulai. Natsir mulai mandalami agama Islam dan berkecimpung di JIB (Jong Islamieten Bond) cabang Bandung, pada tahun 1928-1930 beliau terpilih menjadi ketua cabang tersebut. Ini merupakan awal keterlibatannya dalam bidang politik yang berasaskan Islam. Selama aktif di JIB beliau bertemu dengan Nurnahar, aktivis kepanduan putri, yang kemudian dinikahnya di Bandung pada 20 Oktober 1934M (Zaky Rahim 2002).

Setelah tamat AMS, di sekolah tersebut Natsir memfokuskan studinya pada bidang bahasa dan sastra Eropa klasik. Sebenarnya Natsir berhak mendapatkan beasiswa untuk kemudian melanjutkan ke tingkat Perguruan Tinggi, pilihannya adalah antara *Rechts Hooge School* (Sekolah Tinggi Hukum) di Jakarta atau *Economische Hooge School* (Sekolah Tinggi Ekonomi) di Rotterdam, Negeri Belanda.

Natsir tampaknya tidak tertarik dan ditinggalkannya kesempatan emas ini. Akan tetapi beliau lebih tertarik kepada persoalan masyarakat dan politik yaitu politik oposisi dimatinya sebagai orang jajahan yang sangat mengesankan. Karena tanpa memasuki dunia politik, cita-citanya untuk memperjuangkan kemerdekaan tidak mungkin terlaksana. Persoalan masyarakat yang dihadapi Natsir lebih menarik, beliau merasa berdosa seandainya kegiatan itu beliau tinggalkan. Ketika Mohammad Natsir mengambil keputusan tidak mau studi, banyak juga kenalannya yang terkejut (Dewan Dakwah Sumbar 2001).

Mohammad Natsir mendalami agama Islam di Bandung melalui Ahmad Hassan, seorang ulama besar yang berkeperibadian tinggi. Ahmad Hassan berasal dari Singapura,

kemudian bermukim di Surabaya, kemudian beliau pindah ke Bandung. Di Bandung, Ahmad Hassan selain mengajarkan agama, beliau juga mengajari orang bertenun kain, beliau tidak mengajar agama di sekolah, melainkan di Surau (Zaky Rahim 2002: 23).

Apa yang diajarkan A. Hassan, menarik perhatian orang muda. Mohammad Natsir tertarik dengan Ahmad Hassan ketika Natsir diajak oleh temannya untuk mendengarkan ceramahnya. Sejak itulah Natsir tertarik dengan cara beliau menginterpretasikan Islam dengan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Beliau memberantas khurafat, kekolotan, dan kebekuan. Semakin Natsir mengikuti ceramah, semakin simpatik terhadapnya. Perkenalannya dengan A. Hassan itu bukan saja telah memperdalam pengetahuan agama dan kemampuan berbahasa Arab malahan juga telah menambah keyakinan Natsir untuk memperjuangkan agama Islam yang modal dasarnya sudah beliau dapatkan di Sekolah Diniyah di Sumatera

Mohammad Natsir belajar agama dengan metode diskusi yang berkenaan dengan agama pada Tuan Hassan yang biasanya dilakukan sejak selesai ashar sampai maghrib. Selanjutnya Tuan Hassan minta Natsir untuk memimpin sebuah majalah bernama Pembela Islam. Karena tugas inilah hubungan Natsir dengan Tuan Hassan semakin bertambah dekat. Tuan Hasan juga menganjurkan Mohammad Natsir selalu membaca terjemahan al-Qur'an yang ditulis oleh Muhammad Ali di samping pemikiran Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh (Ibid: 24).

Meskipun peribadi keislamannya begitu menonjol, Natsir tidak pernah mendapatkan pendidikan Islam secara formal. Sebagaimana layaknya anak-anak Minangkabau waktu itu,

Natsir juga hidup dalam suasana keagamaan dan adat yang begitu kuat.

Jika kita telusuri asal-usul pendidikan Natsir, memang beliau tidak pernah studi hingga ke jenjang perguruan tinggi. Namun sepanjang hayat yang berjalan 85 tahun, beliau telah banyak melakukan untuk negaranya dan dunia Islam umumnya. Beliau diakui sebagai tokoh handal sebagai pemikir, intelektual, pujangga, dan negarawan. Beliau tidak hanya berketerampilan menuangkan ide dan gagasannya dalam bentuk tulisan, namun beliau juga bertindak secara nyata.

Berikut adalah biografi karier M. Natsir, dari sejak menjadi guru, aktif di bidang politik dan yang terakhir di bidang dakwah.

- 1927 (Juli) : Tamat dari MULO, Natsir melanjutkan pendidikan ke AMS di Bandung.
- 1931-1932 : Mengikuti kursus guru diploma L.o.
- 1928-1932 : Ketua Jong Islamieten Bond Bandung.
- 1932-1942 : Direktur Pendidikan Islam Bandung.
- 1940-1942 : Anggota Dewan Kabupaten Bandung.
- 1942-1945 : Kepala Biro Pendidikan Kotamadya Bandung.
- 1945-1946 : Anggota Badan Pekerja KNIP
- 1946-1949 : Menteri Penerangan RI
- 1950-1951 : Perdana Menteri RI
- 1949-1958 : Ketua Umum Partai Masyumi
- 1950-1958 : Anggota Parlemen RI
- 1967-meninggal : Vice President World Muslim Congress (Karachi)
- 1967-meninggal : Ketua Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia
- 1969-meninggal : Anggota World Muslim League (Makkah)

- 1980-meninggal : Anggota Majelis A'la Al-Alamy Lil Masajid (Makkah) (A.W Pratiknya 1989: 130).

Di samping jabatan di atas, ada beberapa jabatan lainnya yang sempat dijalaninya, seperti sebagai penulis tetap artikel pada majalah Pembela Islam dan Suara Republik, penasihat delegasi Indonesia dalam perundingan antara Indonesia dan Belanda, serta penasihat SBII (Serikat Buruh Islam Indonesia).

Manhaj Dakwah Hasan Al-Banna

Sebelum membahas mengenai manhaj dakwah kedua tokoh ini, perlu dibahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan manhaj dan dakwah. Menurut Faishal Ali Yahya (1989) *al-manhaj* atau *al-manhaaj*, adalah dua kata yang semakna, baik dari segi bahasa ataupun istilahnya. *Al-manhaj* artinya suatu jalan yang sudah terang dan jelas. Sedangkan *al-manhaaj* ialah suatu jalan lempang dan lurus. Ibnu Mandzur dalam menafsirkan kedua kata tersebut dengan mengutip dari ayat Al-Qur'an, sebagai berikut:

لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجا

Artinya: 'Untuk tiap ummat diantara kalian. Kami berikan aturan dan jalan yang terang' (QS. Al-Maidah 5: 48).

Perkataan dakwah ditinjau dari segi bahasa (etimologi) berasal dari bahasa Arab الدعوة dari kata الدعاء (panggilan) yaitu memanggil atau mengajak manusia kepada suatu urusan. Sedangkan pengertian dakwah secara terminologi (istilah) adalah mengajak kepada Allah dan beriman denganNya sebagai Tuhan yang satu tidak mensyirikkan-Nya, beriman kepada para malaikatNya, kitab-kitabNya, para nabi dan rasulNya, beriman pada hari akhirat dan kepada takdirNya sama

ada yang baik ataupun yang buruk (Abdul Naim Muhammad Husein 1984: 17).

Dari pengertian diatas penulis sependapat dengan kesimpulan pengertian *manhaj* dakwah ialah cara atau aturan yang dianjurkan atau harus diikuti dalam kerja-kerja atau kegiatan berdakwah atau di bidang pengajaran atau tuntunan (Said Ramadhan al-Buthy 1997: 70). Dalam pembahasan manhaj dakwah Hasan al-Banna ini penulis membagi kedalam tiga bagian yaitu persepsi dakwah Hasan al-Banna, dakwah fardiyah dan tarbiyah sebagai manhaj dakwah.

Persepsi Dakwah Hasan Al-Banna

Dakwah bagi Hasan al-Banna merupakan tugas mulia yang didalamnya berisi pengorbanan untuk membimbing orang lain menuju jalan Allah s.w.t. Dalam mudzakiratnya (1999: 97) beliau menyatakan :

Saya yakin bahwa jiwa yang paling baik adalah jiwa thayyibah, yaitu jiwa yang merasa bahagia apabila dapat membahagiakan dan mampu membimbing orang lain. Merasa senang apabila dapat membuat orang lain senang dan mengusir kesedihannya. Menganggap semua pengorbanan dalam melakukan *ishlah* dan dakwah *ilallah* sebagai keuntungan dan *ghanimah* serta ujian dan kesusahan didalamnya sebagai kenikmatan.

Selain itu Hasan al-Banna meyakini bahwa dakwah dan Islam adalah dua kata yang sangat berkaitan dan mesti menyatu. Beliau (1997) menyatakan, “Dengarlah wahai saudaraku! Dakwah kami adalah dakwah yang hanya dapat

dilukiskan secara menyatu oleh kata 'Islamiyah'. Kata (Islamiyah) ini mempunyai makna yang sangat luas. Kami meyakini bahwa Islam adalah sebuah sistem nilai yang sempurna, melingkupi seluruh ruang kehidupan."

Jelas sekali dari ungkapan beliau diatas tentang kecintaan beliau terhadap ummat ini. Keinginan untuk selalu melakukan pengorbanan dan *ishlah* di jalan Allah s.w.t, agar dapat bersama-sama mengajak ummat manusia kepada kebahagiaan yang sebenarnya. Tujuan dakwah menurut Hasan al-Banna (1997) mempunyai dua sasaran dasar yang ingin dicapai:

1. Agar negara muslim merdeka dari setiap penjajahan bangsa asing. Hal ini merupakan hak dasari bagi setiap manusia. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang yang zalim lagi durhaka atau para penjajah terlaknat.
2. Agar tertegak didalam negara sebuah daulah Islamiyah merdeka yang menerapkan hukum Islam, merealisasikan prinsip-prinsipnya yang lurus dan menyampaikan dakwahnya yang bijak kepada seluruh manusia. Selama daulah ini belum tertegak, maka seluruh kaum muslimin berdosa. Mereka bertanggung jawab di hadapan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung karena mengabaikan untuk menegakkan dan enggan untuk mewujudkannya.

Selain tujuan diatas, bagi Hasan al-Banna ada tujuan utama dalam dakwah yang menyatakan, "Bahwa tujuan utama dakwah adalah memunculkan al-haq. Apabila tujuan utama itu telah tercapai, maka kita dapat membangun individu, keluarga dan masyarakat. Kemudian membangun ummat. Kemudian kita menjadi saksi (syuhada) atas manusia dan seluruh manusia" (Badr Abdur Razzaq al-Mash 1995: 81).

Hasan al-Banna berkata dalam mudzakirahnya: Ciri-ciri khusus dakwah ini antara lain:

1. *Bina'* dan positif, karenanya dakwah ini bersifat membangun bukan merusak, berusaha melakukan hal-hal positif. Kewajiban kami membina diri sendiri terlebih dahulu.
2. Lisan yang sesuai dengan perbuatan. Karena itu kami harus mempelajari undang-undang (syariat-red) kami yang didalamnya tercantum segala sesuatunya. Kami juga berusaha untuk bisa menerapkan apa yang kami pelajari dan kami ucapkan.
3. Rabbaniyah. Karena itu kami harus menjalin hubungan erat dengan Allah sekuat kemampuan kami melalui dzikir dan doa-doa *ma'tsurat*.
4. *Tajammu'*. Yaitu kami selalu saling bertemu dan merindukan pertemuan serta menunaikan hak-hak ukhuwah.
5. *Ihtiwal* dan *kifah* (saling menanggung beban berat dan berjuang). Karena itu kami mesti ridha dan melapangkan dada untuk menerima semuanya (Hasan al- Banna 1999: 227).

Hasan al-Banna menyatakan tentang sifat dakwah beliau dengan ungkapan, "Kekhususan yang paling spesifik dari dakwah kami adalah *Rabbaniyah* (ketuhanan) dan *'Alamiyah* (universal). Adapun ia dikatakan *rabbaniyah*, karena pusat yang menjadi inti kepada seluruh sasaran dakwah kami adalah bagaimana manusia itu bisa mengenal Tuhannya. Kami, Ikhwanul Muslimin, selalu menyatakan dari dalam hati kami, '*Allah ghayatuna*' (Allah tujuan kami) (Hasan al-Banna 1997: 193).

Dakwah ini dakwah *rabbaniyah*, karena bukan hasil ciptaan manusia dan bukan pula produk bumi, akan tetapi anugerah dari Allah kepada hamba-hamba-Nya. Melalui dakwah ini mereka mengenal Allah, dari dakwah ini mereka mencapai kehidupan *ruhiyah* mereka sehingga bisa hidup dalam naungan Allah dan diatas jalan dakwah ini mereka berusaha mencari ridha Allah (Muhammad Sayid al- Wakil 2001: 69).

Imam Syahid menyifatkan dakwah ini *rabbaniyah* karena manhaj dakwah ini yang jelas dari Allah s.w.t. Di dunia ini hanya ada dua pilihan antara *hizbullah* (partai/kelompok Allah) dan *hizbusysyaithan* (partai/kelompok syaithan). Allah berfirman dalam Al Qur'an :

أولئك حزب الله ألا ان حزب الله هم المفلحون

Artinya: Mereka adalah *hizbullah*, sesungguhnya *hizbullah* merekalah yang berjaya (QS Al-Hasyar 58: 22).

Adapun ia disebut *'alamiyah* atau universal karena dakwah kami ini ditujukan kepada seluruh ummat manusia, dan semua manusia itu pada dasarnya bersaudara. Tidak ada yang paling utama di antara mereka kecuali taqwa dan kebaikan serta keutamaan yang diberikan salah seorang di antara mereka kepada yang lainnya (Ibid: 194).

Dakwah ini bersifat universal berarti untuk seluruh manusia. Tidak ada suatu kaum dan tidak ada suatu ummat yang berhak mengaku bahwa Islam adalah agama yang khusus bagi mereka saja dan bukan untuk yang lainnya (Ibid: 70).

Dalam *Risalah Ta'lim*, Hasan al-Banna menggolongkan tahapan dakwah beliau kepada tiga bagian, yaitu *ta'rif*, *takwin* dan *tanfidz*. Saïd Hawwa (1999) menjelaskan makna ketiganya:

1. *Ta'rif*

Dalam tahapan ini dakwah dilakukan dengan menyebarkan fikrah Islam di tengah masyarakat. Mengenai cara dakwah untuk tahapan ini adalah sistem perlembagaan. Pelaksanaannya adalah kerja kemasyarakatan bagi kepentingan umum, adapun medianya adalah nasehat dan bimbingan sekali waktu serta membangun berbagai tempat yang bermanfaat di waktu yang lain, juga berbagai aktivitas lainnya (Sa'id Hawwa 1999: 111).

2. *Takwin*

Dalam tahapan ini dakwah ditegakkan dengan melakukan pemilihan unsur-unsur positif untuk memikul tanggung jawab beban dakwah dan untuk menghimpun berbagai bagian yang ada. Sistem dakwah pada peringkat ini bersifat tasawwuf murni dalam peringkat *ruhaniyah* dan bersifat ketentaraan dalam peringkat operasional. Prinsip untuk kedua bagian ini adalah: perintah dan taat dengan tanpa keraguan (Ibid: 112).

3. *Tanfidz*

Dakwah dalam tahapan ini adalah jihad, tanpa kenal sikap ragu, kerja berterusan untuk memperoleh tujuan akhir dan kesiapan menanggung cobaan dan tantangan yang tidak mungkin bersabar atasnya kecuali orang-orang yang tulus ikhlas. Tidaklah dapat dakwah ini memperoleh keberhasilan kecuali dengan ketatan yang totalitas. Untuk inilah *shaf* pertama Ikhwanul Muslimin berbaiat pada bulan Rabi'ul Awwal 1359 H (Ibid : 112).

Dalam kitab *Majmu'ah Rasa'il*, dinyatakan dengan jelas konsep dan pemahaman Hasan al-Banna tentang dakwah. Sifat dakwah yang beliau sampaikan terbagi atas berterus-terang

(terbuka), kesucian, kasih sayang dan keutamaan hanya milik Allah. Tentang sifat berterus-terang, beliau (1997) menyatakan :

Kami ingin berterus-terang kepada semua orang tentang tujuan kami, memaparkan di hadapan mereka metode kami dan membimbing mereka menuju dakwah kami. Disini tidak ada yang samar dan tidak jelas. Semuanya bahkan lebih terang dari sinar matahari, lebih jelas dari cahaya fajar dan lebih bercahaya dari putihnya siang.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Hasan al-Banna menanamkan konsep keterbukaan dalam berdakwah kepada semua ummat. Ini menjadi bukti bahwa sejak awal berdirinya Ikhwanul Muslimin bukanlah gerakan eksklusif sebagaimana yang dituduhkan sebagian pihak. Berterus-terang dan keterbukaan menjadi landasan dasar karena ia berada pada jalan benar sehingga tidak ada yang perlu ditutupi atau disembunyikan. Walau bagaimanapun faktor politik dan keamanan di Mesir telah mempengaruhi perkembangan dan perjalanan gerakan dakwah tersebut yang menyebabkan mereka lebih berhati-hati dan seolah menutup diri dalam perkembangan terakhir sampai sekarang.

Kesucian diartikan dengan pernyataan (1997),

ونحب مع هذا أن يعلم قومنا - وكل المسلمين قومنا - أن دعوة الإخوان المسلمين دعوة بريئة نزيهة ، قد تسامت في نزاهتها حتى جاوزت المطامع الشخصية ، واحتقرت المنافع المادية ، وخلفت وراءها الأهواء والأغراض ، ومضت قدما في الطريق التي رسمها الحق تبارك وتعالى للداعين إليه :

Artinya: *Kami juga ingin agar kaum kami mengetahui bahwa Ikhwanul Muslimin membawa misi dakwah yang bersih dan suci.*

Kebersihannya benar-benar mulia, hingga melampaui ambisi pribadi, menganggap kecil keuntungan materi, meninggalkan hawa nafsu dan kesenangan sementara, Ia terus berlalu mengikuti jalan panjang kebenaran yang telah digariskan Allah s.w.t untuk para da'i:

قل هذه سبيلي أدعوا الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني و سبحن الله وما أنا من
المشركين

Artinya: Katakanlah iniliah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kalian) kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Maha suci allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. (QS. Yusuf 12: 108)."

Keikhlasan, kata inilah yang ingin dijelaskan oleh Imam Syahid dalam menjelaskan sifat dakwah yang selanjutnya. Tidak ada ambisi peribadi, harapan keduniaan atau meminta pujian. Yang ada hanya harapan untuk melihat keadaan ummat ini lebih baik sesuai dengan ridha Allah swt. Keinginan besar agar ummat ini taat dan tunduk pada perintah Allah. Ummat yang menjalankan syari'at Allah di muka bumi.

Nilai keikhlasannya dalam berjuang terpancar dari kata-katanya yang tulus dan kesiapannya mengorbankan apa saja sekalipun jiwa. al-Banna (1997: 34) menyatakan:

و نحب أن يعلم قومنا أنهم احب إلينا من أنفسنا ، و أنه حبيب إلى هذه النفوس أن
تذهب فداء لعزتهم إن كان فيها الفداء ، و أن ترهق ثنا لمجدهم و كرامتهم و دينهم و
آمالهم إن كان فيها الغناء ، و ما أوقفنا هذا الموقف منهم إلا هذه العاطفة التي استبدت بقلوبنا
و ملكت علينا مشاعرنا ، فأقضت مضاجعنا ، و أسالت مدامعنا ، و إنه لعزیز علينا جد
عزیز أن نرى ما يحيط بقومنا ثم نستسلم للذل أو نرضى بالهوان أو نستكين لليأس ، فنحن
نعمل للناس في سبيل الله أكثر مما نعمل لأنفسنا ، فنحن لكم لا لغيركم أيها الأحباب ، و لن
نكون عليكم في يوم من الأيام.

Artinya: Betapa inginnya kami agar ummat ini mengetahui bahwa mereka lebih kami cintai dari diri kami sendiri. Kami berbangga ketika jiwa-jiwa kami gugur sebagai penebus bagi kehormatan mereka, jika memang tebusan itu yang diperlukan. Atau menjadi harga bagi tegaknya kejayaan, kemuliaan dan terwujudnya cita-cita mereka, jika memang itu harga yang mesti dibayar. Tiada sesuatu yang membuat kami bersikap seperti ini selain rasa cinta yang telah mengharu biru hati kami, menguasai perasaan kami, memeras habis air mata kami dan mencabut rasa ingin tidur dari pelupuk mata kami. Betapa berat rasa di hati ketika kami menyaksikan bencana yang mencabik-cabik ummat ini sementara kita hanya sanggup menyerah pada kehinaan dan pasrah oleh keputusan. Sungguh, kami berbuat dijalan Allah untuk kemaslahatan seluruh manusia, lebih banyak dari apa yang kami lakukan untuk kepentingan diri kami. Kami adalah milik kalian wahai saudara-saudara tercinta. Sesaatpun kami tak akan pernah menjadi musuh kalian.

Selanjutnya beliau menjelaskan, "Anda'ikan yang kami lakukan ini adalah sebuah keutamaan, maka kami sama sekali tidak menganggap itu keutamaan diri kami. Kami hanya percaya pada firman Allah s.w.t,

بل الله بين عليكم أن هداكم للإيمان ان كنتم صادقين

Artinya: Sebenarnya Allah, Dia-lah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar (QS. Al-Hujurat 49: 17).

Beliau menambahkan,

و لكن حسبنا أن الله يعلم ذلك كله ، و هو وحده الكفيل بالتأييد الموفق للتسديد، بيده
أزمة القلوب و مفاتيحها

Artinya: “Namun biarlah, cukup bagi kami keyakinan bahwa Allah s.w.t mengetahui itu semua. Hanya Dia-lah yang menanggung kami dengan dukungan-Nya dan mengiringi kami dengan bimbingan-Nya dalam langkah-langkah kami. Di tangan-Nyalah berada semua kunci dan kendali hati” (Ibid: 35).

Tentang cara melaksanakan dakwah, Badr abdur razzaq (1987) menukilkan ungkapan beliau dari kitab *Majmu'ah al-Rasa'il* yang menyatakan:

Bagaimana kami dapat sampai kepada sasaran-sasaran tersebut? Sebenarnya khutbah, perbincangan, surat menyurat, pengajaran, ceramah, penelitian, pemeberian nasihat, semua itu tidak akan mendatangkan manfaat dan memperoleh sasaran serta tidak akan menghantarkan da'i kepada tujuannya. Akan tetapi dakwah mempunyai sarana yang mesti dipergunakan dan dilaksanakan.

Dakwah Fardiyah Hasan Al-Banna

Dakwah merupakan kewajiban bagi muslim dan muslimah pada setiap masa dan keadaan. Dalam sebuah ayat-Nya, Allah s.w.t. bahkan meletakkan salah satu syarat kemuliaan ummat ini, yaitu ketika mereka menunaikan tugas dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Allah s.w.t. berfirman:

كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر

Artinya: *Kalian adalah sebaik-baik ummat yang dikeluarkan untuk manusia, memerintahkan mereka kepada yang Maretruf dan mencegah yang mungkar* (QS Ali 'Imran 3: 110).

Pada ayat yang lain Allah s.w.t. berfirman:

و من أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً و قال اني من المسلمين

Artinya: *Siapakah yang lebih baik perkataannya dari orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal shalih dan menyatakan, 'Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri' (QS Fussilat 41: 33).*

Dalil syar'i yang berupa hadis Nabi antara lain:

من دل علي خير فله مثل أجر فاعله

Artinya: *Barangsiapa menunjukkan kepada kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti mereka yang mengerjakan (Muslim, Al-Shahih, kitab al-'Imarah, bab I'nati al-ghazi fi sabilillah bi markubin wa ghairihi, jil 3 hlm.1506, No. Hadis 133).*

Mustafa Masyhur (2000) menyatakan bahwa dakwah fardiyah merupakan salah satu aspek dari banyak aspek dakwah. Sebab, walaupun bukan dengan dakwah fardiyah, masih banyak lagi sarana dakwah yang lain yang bisa dijadikan pilihan, diantaranya melalui tulisan, khutbah, ceramah, pembicaraan tidak resmi dan kerja keras. Beliau juga memberi batasan yang singkat namun jelas tentang pengertian dakwah fardiyah yaitu dakwah dengan pendekatan individual.

Peran Hasan al-Banna sebagai seorang *da'i ila-Allah* yang faham tentang hakekat dakwah, tentulah tidak mengecilkkan peranan dakwah fardiyah ini sebagai salah satu bagian dari dakwah. Bahkan penulis menyimpulkan bahwa dakwah fardiyah Hasan al-Banna telah dilaksanakan sejak muda sampai akhir hayatnya. Bagi Hasan al-Banna, menegakkan yang hak dan memberantas kemungkaran adalah suatu kewajiban kepada setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah dan

Rasul-Nya. Contoh mengenai hal ini beliau menceritakan dalam memoarnya (1999):

Suatu hari saya berjalan-jalan melewati tepian sungai Nil. Di sana terdapat banyak pekerja yang sedang membuat kapal layar. Pekerjaan membuat kapal layar ini memang banyak terdapat di Mahmudia. Saya perhatikan salah seorang pemilik kapal yang sedang dibuat itu menggantungkan patung orang telanjang yang terbuat dari kayu pada tiang kapalnya. Hal ini jelas bertentangan dengan etika dan moral. Apalagi di tempat ini banyak kaum wanita pulang pergi mengambil air. Apa yang saya lihat ini cukup menggelisahkan. Akhirnya saya pergi membuat laporan kepada penguasa setempat untuk mengadukan hal itu. Petugas itu menanggapi dengan serius dan pada waktu itu juga dia pergi bersama saya untuk memberi peringatan kepada pemilik kapal tersebut dan memerintahkan agar menurunkan patung pada waktu itu juga.

Dari pernyataan dan fakta sejarah inilah tergambar jelas kekuatan mujahadah seorang Hasan al-Banna untuk selalu berdakwah dan menjadikan dakwah fardiyah sebagai salah satu wasilah dakwahnya.

Tarbiyah Sebagai Manhaj Dakwah

Membahas mengenai manhaj dakwah Hasan al-Banna, hampir disepakati oleh banyak pengkaji dan peneliti bahwa 'tarbiyah' adalah jawabannya. Tarbiyah dalam manhaj Hasan

al-Banna memiliki kepentingan yang tiada bandingannya. Ali Abdul Halim Mahmud (1999) menyatakan:

Keharusan tarbiyah dalam ikhwan telah dimulai sejak diletakkannya undang-undang utama jamaah tahun 1349H/1931M. Pada masa itu, saat-saat awal sejarah jamaah, Imam Syahid Hasan al-Banna telah menyerukan dengan kuat bahwa tahapan aktivitas dalam jamaah ada tiga, yaitu: ta'rif (pengenalan), takwin (pembinaan) serta tanfidz (pelaksanaan) dan setiap tahapan itu akan terlaksana hanya dengan tarbiyah.

Hasan al-Banna berpendapat bahwa penyebab kehancuran dan kemunduran ummat Islam adalah disebabkan kejahilan mereka terhadap ajaran Islam. Oleh karena itu beliau memusatkan perhatian dan fikiran untuk meningkatkan kualitas umat baik dalam hal pemikiran, wawasan dan ruhiyah. Beliau menyatakan:

Sistem ini diawali dengan studi keislaman yang berpijak pada perbaikan tilawah al-Qur'an. Hendaknya seorang akh yang mengarah ke madrasah dan dakwah ini bisa membaca Al-Qur'an sesuai dengan hukum ilmu tajwid, lalu menjelaskan dan menafsirkannya sesuai dengan tingkat keperluan. Hal ini kemudian diikuti dengan menghafal beberapa hadits dan penjelasannya. Setelah itu dilakukan perbaikan dari sisi aqidah dan ibadah, penyingkapan hikmah dan rahasia perundang-undangan dan adab-adab hukum Islam, pengkajian terhadap sejarah Islam dan biografi salafus shalih serta sirah

nabawiyah secara seimbang untuk menguatkan wawasan dan spiritual. Kemudian diikuti dengan pelatihan terhadap orang-orang yang memiliki kemampuan berpidato dan berdakwah, baik secara keilmuan dengan menghafal syair dan prosa serta materi-materi dakwah yang secara maksimal, ataupun secara praktek dengan menugaskan mereka untuk mengajar dan berceramah di lingkungan internal terlebih dahulu, kemudian setelah itu di arena yang lebih luas lagi (Hasan al-Banna t.th: 67).

Antara Hasan al-Banna dan tarbiyah merupakan dua bagian yang saling dan selalu berkaitan. Sampai ada anggapan bahwa tarbiyah menjadi 'trade mark' bagi dakwah Hasan al-Banna dan jama'ah Ikhwanul Muslimin.

Tentang definisi tarbiyah yang dimengerti oleh jama'ah Ikhwanul Muslimin, dalam buku *Manhaj Tarbiyah Inda al Ikhwan al Muslimin*, Ali Abdul Halim Mahmud (1999) menyatakan, "Tarbiyah adalah cara ideal dalam berhubungan dengan fitrah manusia, baik secara langsung melalui kata-kata ataupun secara tidak langsung dalam bentuk keteladanan, sesuai dengan sistem sarana khusus yang diyakini untuk memproses perubahan dalam diri manusia menuju keadaan yang lebih baik."

Dari uraian dan pemahaman diatas perlu juga penulis berikan penekanan, bahwa ketika membicarakan tarbiyah secara ideal maka tidak ada jalan lain kecuali tarbiyah Islamiyah yang secara ringkasnya mempunyai pengertian : "Proses penyiapan manusia yang shalih, yaitu agar tercipta suatu keseimbangan dalam potensi, tujuan, ucapan dan perbuatan secara keseluruhannya" (Ibid). Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dari tarbiyah Islamiyah, juga dinyatakan oleh Ali Abdul

Halim Mahmud (1999) adalah menciptakan keadaan yang mendukung bagi manusia untuk dapat hidup di dunia secara lurus dan baik, serta hidup di akhirat dengan naungan ridha dan pahala Allah s.w.t.

Tarbiyah sebagai manhaj dakwah Ikhwanul Muslimin, terbagi kedalam dua objektif besar yaitu objektif permanen atau mendasar dan objektif kontekstual (keadaan temporal). Secara global objektif permanen ini memiliki dua tujuan dasar: Pertama, mewujudkan tujuan-tujuan tarbiyah Islamiyah yang baku dengan mengantarkannya dari peringkat konsep atau teori kepada dunia realitas atau pelaksanaan.

Kedua, membantu orang, melalui berbagai sarana yang digunakan oleh Ikhwanul Muslimin dalam tarbiyah yang sebagiannya telah terbukti di lapangan untuk merealisasikan tujuan-tujuan tarbiyah Islamiyah (Ali Abdul Halim Mahmud 1999: 31).

Selain tujuan mendasar diatas, juga ada tujuan kontekstual yang intinya adalah, bagaimana upaya menghadapi perubahan arus nilai secara ilmiah dan tepat berdasarkan ajaran Islam, juga merumuskan bagaimana cara-cara terbaik untuk itu (Ibid: 40).

Tahapan tarbiyah dalam dakwah Hasan al-Banna mempunyai beberapa peringkat sebagaimana beliau ungkapkan dalam *mudzakkirahnya* yang menyatakan, "Adapun tentang tahapan, bertumpunya pada tarbiyah dan kejelasan langkah dalam Ikhwanul Muslimin. Mereka meyakini bahwa setiap dakwah, dakwah apapun harus melalui tiga tahapan:

1. Tahap pengenalan dan penyebaran fikrah atau pemikiran sehingga sampai pada semua khalayak dari berbagai peringkat sosial kemasyarakatan.
2. Tahap pembentukan, penyaringan para penyokong, pembinaan paolah raga dan pengerahan massa yang sudah tersentuh oleh dakwah.
3. Tahap pelaksanaan amaliyah yang produktif.

Dalam mentarbiyah para anggotanya, jama'ah mempergunakan berbagai perangkat atau sarana. Inilah yang akan kita huraikan di sini satu persatu berdasarkan dokumen-dokumen jama'ah, sejarah perjalanannya, buku-buku dan risalah yang ditulis oleh mursyid pertama dan pemimpin-pemimpin yang lain, serta para anggota jama'ah ini, bahkan yang ditulis oleh orang luar dari pihak penulis Timur ataupun Barat. Selanjutnya beliau menyebut ada tujuh perangkat tarbiyah Hasan al-Banna yaitu, *usrah*, *katibah*, *rekreasi*, *mukhayyam* atau *muasykar*, *daurah*, *nadwah* dan *muktamar* (Ibid: 122).

Usrah

Usrah menurut pemahaman jama'ah Ikhwanul Muslimin merupakan batu bata pertama dalam struktur bangunan jama'ah. Ia juga merupakan landasan bagi pembentukan *syakhsiyah* anggota dan sarana paling tepat untuk mentarbiyah mereka secara utuh dan menyeluruh, menyentuh semua bagian *syakhsiyah*, untuk selanjutnya membentuk mereka dengan bentuk Islam sesuai dengan *kitabullah* dan sunnah Rasul-Nya (Ibid: 127).

Hasan al-Banna memberi batasan tentang *usrah* dengan pernyataannya, "Islam sangat menganjurkan agar para pemeluknya membentuk kelompok-kelompok keluarga dengan

tujuan mengarahkan mereka untuk mencapai tingkat keteladanan, mengukuhkan persatuan dan mengangkat konsep persaudaraan diantara mereka dari peringkat kata-kata dan teori menuju kerja dan pelaksanaan yang nyata” (Hasan al-Banna t.thc: 286).

Selanjutnya tentang sistem usrah ini beliau menyatakan, “Wahai saudaraku, sistem ini sangat-sangat bermanfaat kepada kita dan berguna bagi dakwah. Dengan daya dan kekuatan dari Allah s.w.t, sistem ini akan mampu menghimpun kalangan anggota ikhwan yang tulus ikhlas, mudah-mudahan hubungan diantara mereka, menghantarkan mereka kepada taudalan dalam dakwah, mengukuhkan ikatan persatuan mereka dan mengangkat persaudaraan mereka dari tahapan kata-kata dan teori kepada peringkat pelaksanaan (Ibid: 286).

Tujuan usrah yang pertama adalah membentuk syakhshiyah Islami secara integral pada diri setiap individu muslim, mentarbiyah dan meningkatkannya sesuai dengan etika dan nilai-nilai Islam. Aspek syakhshiyah atau keperibadian yang terpenting adalah: aqidah, ibadah, moral dan wawasan pengetahuan (Ali Abdul halim Mahmud 1999: 129).

Katibah

Katibah berarti cara khusus dalam mentarbiyah sekelompok anggota ikhwan. Cara tersebut bertumpu kepada tarbiyah ruhiyah, melembutkan hati, pensucian jiwa dan membiasakan fizikal beserta seluruh anggota badan untuk melaksanakan ibadah secara keseluruhan seperti tahajud, dzikir, tadabur dan berfikiran secara khusus (Ibid: 250).

Usman Abdul Mu'iz Ruslan (2000: 551-552), menyatakan bahwa katibah merupakan sistem tarbiyah yang pertama dalam jamaah Ikhwanul Muslimin. Beliau juga menukilkan pendapat Ahmad Adil dari kitab *Al-Ikhwan Al-Muslimun wa Al-Nizdam Al-Khusus*, pengertian *katibah* adalah: "Sekelompok dari kalangan aktivis Ikhwan pilihan yang jumlahnya mencapai 40 orang pada salah satu tempat Ikhwanul Muslimin, yang patuh pada sistem yang khusus."

Rekreasi

Apabila *usrah* dan *katibah* lebih memberikan perhatiannya kepada penguasaan segi ruhiyah, intelektual, kejiwaan dan kebajikan dari segi fisik baik individu ataupun kelompok, maka rekreasi adalah sarana tarbiyah yang lebih memusatkan perhatiannya kepada aspek fisik atau *jasadiyah*. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa sesungguhnya *rekreasi* merupakan sarana tarbiyah pelengkap dari berbagai sarana yang dipergunakan oleh jamaah untuk mentarbiyah para anggotanya (Ibid: 280). Bentuk pelaksanaan *rekreasi* bukan semata rekreasi seperti kebanyakan yang dilaksanakan oleh masyarakat umum, tetapi didalamnya juga terkandung nilai-nilai tarbiyah ruhiyah seperti tadabbur alam.

Mukhayyan atau Mu'asykar

Ustadz Hasan al-Banna melihat bahwa jihad dalam Islam harus dimunculkan dalam bentuknya yang nyata. Yaitu dengan menyiapkan para pemuda yang haus aktivitas dan gerakan untuk memperjuangkan Islam, agar mereka menjadi anggota kelompok *mukhayyam*, yang ditangan merekalah ide tentang jihad dalam Islam dapat dilaksanakan (Ibid: 298).

Daurah

Ali Abdul Halim Mahmud (1999) memberikan batasan bahwa *daurah* sebagai sarana tarbiyah Ikhwanul Muslimin adalah aktivitas mengumpulkan sejumlah ikhwan yang cukup banyak di suatu tempat untuk mendengarkan ceramah, kajian, penelitian dan pelatihan tentang sesuatu masalah, dengan mengangkat bidang kajian tertentu yang dianggap penting untuk amal Islami yang berterusan.

Nadwah

Jama'ah Ikhwanul Muslimin mengenal *nadwah* dengan pengertian pada masa sekarang dan selama bertahun-tahun dilaksanakan di *syu'bah*, *minthaqah* juga pada markas umum jama'ah. Dalam Nadwah tersebut jama'ah mengundang beberapa ulama, pakar dan spesialis untuk membahas suatu persoalan (Ali Abdul Halim Mahmud 1999: 336).

Muktamar

Mu'tamar yang secara bahasa berarti *makaanu al-I'timar* (tempat musyawarah) juga merupakan sarana tarbiyah yang sangat besar pengaruhnya. Tentang pentingnya *mu'tamar* sebagai sarana tarbiyah, Ali Abdul Halim Mahmud (1999) menyatakan:

Mungkin sebagian orang menganggap bahwa *mu'tamar* bukanlah sarana tarbiyah yang baik. Dengan anggapan bahwa sarana tarbiyah yang lain mentarbiyah orang langsung dan terarah, tetapi *mu'tamar* sering tidak mewujudkan hal itu. Anggapan seperti ini akan hilang sendiri apabila merenungkan judul-judul yang dibahas

dalam *mu'tamar*, karena pada umumnya judul-judul itu menambah luasnya wawasan pengetahuan para peserta *mu'tamar* dengan jumlah yang tidak bisa diperoleh pada forum yang lain.

Hasan Al-Banna Dan Ikhwanul Muslimin

Ikhwanul Muslimin yang berarti 'Persaudaraan Islam' memiliki sejarah khusus yang panjang dan unik. Ishak Musa al-Husaini mempunyai kata-kata yang tepat untuk menggambarkan jama'ah ini. "Kebesaran pengaruhnya malah membuatnya di hantam dan di usir ke bawah tanah" (Ishlah 1993: 53).

Sejarah berdirinya Ikhwanul Muslimin dijelaskan oleh Ali Abdul Halim Mahmud melalui bukunya *Manhaj Al Tarbiyah Inda Al Ikhwan Al Muslimin*. Beliau seorang murid dan penerus dari Hasan al-Banna yang menerangkan dengan jelas arah organisasi Ikhwanul Muslimin sebagai suatu konsep gerakan dakwah terpadu. Beliau menyatakan, Pada bulan Dzul-Qa'dah 1346 H/ Maret 1928 ia (Hasan al-Banna) di datangi oleh enam orang yang mengaku tertarik pada pribadi dan terkesan pada cara dakwahnya. Mereka adalah Hafidz Abdul Hamid yang berprofesi sebagai tukang kayu, Ahmad al-Hushari yang berprofesi sebagai tukang potong rambut, Fuad Ibrahim yang berprofesi sebagai tukang setrika, Ismail Izz yang berprofesi sebagai tukang kebun, Zaki al-Maghribi yang berprofesi sebagai penyewa sepeda dan Abdurrahman Hasbullah yang berprofesi sebagai sopir. Mereka menyatakan kepada Imam Hasan tentang ketertarikan mereka terhadap cara-cara dakwah yang Imam Hasan lakukan dan mereka bermaksud menggabungkan diri. Dengan segala senang hati, Imam Hasan menyambut niat baik

mereka itu. Imam Hasan kemudian mengusulkan nama 'Ikhwanul Muslimin' bagi kelompok mereka itu. Alasannya karena tujuan mereka bersatu padu dalam sebuah persaudaraan tersebut semata-mata untuk mengabdikan kepada Islam. Jadi sangat tepat jika kelompok tersebut diberi nama 'Persaudaran Islam' (Ikhwanul Muslimin) (Ali Abdul Halim Mahmud 1997).

Inilah *bai'ah* pertama yang diiringi dengan janji untuk hidup sebagai saudara yang bekerja dan berjuang di jalan Allah. Salah seorang di antara mereka bertanya: "Kita namakan apa diri kita ini?" Ustadz al-Banna cenderung untuk meninggalkan bentuk-bentuk formalitas seperti itu dan lebih memperhatikan esensinya. Beliau hanya mengatakan: "Kita semua bersaudara dalam berkhidmat untuk Islam, berarti kita adalah 'Al Ikhwanul Muslimun'" (Muhammad Sayyid al-Wakil 1979: 51).

Ismailiah adalah kota tempat dilahirkannya pertama kali jama'ah Ikhwanul Muslimin. Karena pada saat di kota inilah, Hasan al-Banna yang pada saat itu menjadi seorang guru pada sebuah sekolah rendah, memulai kegiatan dakwahnya dan bersama enam orang yang telah berbaiat dan menyerahkan diri, jiwa, harta dan seluruh hidupnya untuk bersama-sama memperjuangkan agama Allah.

Sejak di kota Ismailiah perkembangan jamaah Ikhwanul Muslimin sangat pesat. Cabang-cabang mereka telah berhasil menembus ke beberapa kota di sekitar Ismailiah seperti Syubrahkhit, Mahmudiyah, Abu Shuwair, Port Said, Bahr Shaghir, Suez dan Balah. Pada tahun 1932 Hasan al-Banna memindahkan markas sekaligus pusat kepemimpinan Ikhwanul Muslimin ke ibukota Mesir, Kaherah. Sedangkan yang ada di kota Ismailiyah tetap menjalankan fungsinya secara sempurna

yang diketuai oleh salah seorang anggota Ikhwanul Muslimin (Ali Abdul Halim Mahmud 1997).

Tentang tujuan Ikhwanul Muslimin. Hasan al-Banna berkata dalam risalahnya, "Sesungguhnya tujuan Al-Ikhwan tertumpu pada takwin (pembentukan) sebuah generasi baru yang mukmin dengan ajaran Islam yang benar. Berbuat untuk mensibghah umat dengan sibghah Islamiyah yang sempurna dalam setiap sisi kehidupan mereka" (Hasan al-Banna t.th: 168).

Akhirnya perlu juga diungkap tentang apa yang pernah disampaikan oleh Imam Syahid tentang Ikhwanul Muslimin ketika beliau menyatakan:

Secara jujur dan yakin –tanpa ragu-ragu- kita dapat mengatakan bahwa Ikhwanul Muslimin adalah:

- *Dakwah Salafiyah*, karena mengajak kembali kepada Islam, kepada sumbernya yang jernih yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah saw.
- *Thariqah Sunniyah*, karena berusaha melaksanakan sunnah yang suci di segala bidang, terutama dalam masalah aqidah dan ibadah secara optimal.
- *Hakekat Shufiyah*, karena mereka menyadari bahwa dasar dari semua kebaikan adalah hati yang suci, hati yang bersih, amal yang berterusan, menghindri keramaian, bercinta karena Allah dan berkawan rapat dengan kebaikan.
- *Hai'ah Siyasiyyah*, karena mereka menuntut perbaikan hukum negara, melihat balik tentang hubungan dengan negara-negara Islam dan bukan Islam, mendidik rakyat untuk mempunyai izzah, maruah serta berupaya mentradisikannya.
- *Jama'ah Riyadhiyah*, karena mereka memperhatikan perkembangan jasmani mereka. Mereka mengarti bahwa

mukmin yang kuat lebih baik dari mukmin yang lemah dan kewajiban-kewajiban Islam tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna dan benar kecuali dengan tubuh badan yang kuat. Shalat, shiyam, haji dan zakat, kerja keras dan sungguh-sungguh dalam mencari rezeki. Karena itu mereka memusatkan perhatian pada pembentukan kelab-kelab olah raga yang dapat dikatakan dapan melebihi kelab-kelab olah raga terkenal yang sedia ada.

- *Rabitah Islamiyah Tsaqafiyah*, karena Islam menjadikan 'thalabu al ilmi' sebagai kewajiban kepada setiap muslim dan muslimah. Disamping perkelompok-perkelompok adalah madrasah *ta'lim* dan *tastqif*, ia juga organisasi tarbiyah *jasadiyah*, *aqliyah* dan *ruhiyah*.
- *Syirkah Iqtishodiyah*. Karena Islam memperhatikan kepentingan menejemen modal dan usaha perekonomian. Rasulullah bersabda yang artinya: 'Betapa nikmatnya apabila harta yang baik berada pada orang yang baik.' (HR Imam Ahmad 4/197-202 dari Amr bin Ash).
- *Fikrah Ijtima'iyah*, karena memperhatikan penyakit-penyakit yang timbul dalam masyarakat Islam dan berusaha mengobatinya (Hasan al-Banna t.th: 156).

Selanjutnya mengenai aktivitas yang dilaksanakan Ikhwan, majalah *Ishlah* (1995) merakamkan apa yang ditulis oleh Ishak Musa al-Husaini (1947) antara lain :

Pada masa pemerintah Mesir menyatakan perang melawan Israel, sebagai reaksi klaim Zionis atas tanah Palestina pada tahun 1948, Ikhwan telah lebih dulu berangkat ke Palestina. Tidak hairan jika bekas Presiden

Mesir Anwar Sadat berkata, "Yang paling bergairah dalam perjuangan ini ialah sukarelawan Ikhwan..." Di bidang publikasi, Ikhwan punya catatan lengkap. Mulai harian Ikhwanul Muslimun, terbit 5 Maret 1946, majalah bulanan al-Manar dan mingguan An-Nadzir. Oleh Menteri pendidikan Mesir al-Ashmawi Pasha, pada tahun 1946 Ikhwan diminta memberikan bantuan untuk program pemberantasan buta huruf (PBH). Hasilnya sukses. Sekolah-sekolah Ikhwan telah lama dikenal. Mulai sekolah untuk menghafal al-Qur'an, sekolah malam untuk kaum buruh dan tani sampai lembaga pendidikan untuk anak putus sekolah. Hampir di tiap cabang Ikhwan –tahun 1934 (enam tahun sejak kelahirannya) Ikhwan telah tersebar di 50 kota di Mesir–beragam jenis sekolah ini ada .

Selain itu juga dijelaskan kegiatan Ikhwanul Muslimin di bidang sosial kemasyarakatan yang banyak dan bermacam-macam diantaranya:

Mereka membentuk *Qismu al-bir wa al-khidmah* (bidang kebajikan dan pelayanan sosial) yang terdaftar pada kementerian sosial Mesir. Mulai lembaga yang berupaya meningkatkan standar kehidupan di pedesaan Mesir dan memperbaharui daerah pinggiran hingga mendirikan tidak kurang dari 20 rumah sakit dan farmasi. Ikhwan juga punya perhatian pada nasib guru. Sejumlah guru di Thanta diundang untuk membicarakan ihwal permasalahan yang dihadapi sambil disediakan jamuan. Mereka mendirikan komite yang menangani persoalan

buruh. Tidak hairan jika anggota dari kalangan buruh mencapai 600 ribu orang. Ikhwan juga ambil bagian dalam berbagai macam pertunjukan teater dan kepanduan. Perhatian pada kaum perempuan juga ada. Di Ismailiyah mereka mendirikan Ma'had Ummahatil Mu'minin untuk mendidik pada gadis agar siap pada saat menikah. Perusahaan dagang Ikhwan, Syarikah al-Mu'amalah al-Islamiyyah, punya modal mencapai 30 ribu poun. Di Iskandariyah mereka memiliki perusahaan dagang dan rekayasa mesin dengan 3500 saham dan modal 14 ribu poun (Ibid).

Aktivitas pendidikan dan tabligh berkembang sangat pesat setelah kantor pusat berpindah ke Kaherah, sebagaimana dirangkum dari tahun 1932 sehingga 1939 oleh Utsman Abdul Mu'iz Ruslan (2000) yang diambil dari Mudzakirat Imam Syahid Hasan al-Banna diantaranya:

Forum kajian dan ceramah pada cabang-cabang ikhwan dan masjid-masjid. Kemudian pada tahun 1939, mereka mengadakan kajian hari selasa yang kemudian dikenal dengan *Hadits Tsulatsa'*, kemudian dibuka kajian mingguan pada hari Kamis khusus untuk mahasiswa (Hasan al-Banna t.th: 172). Ikhwan menerbitkan Risalah Mursyid Am (dua edisi), surat kabar mingguan Al-Ikhwan Al-Muslimun mulai 22 shafar 1352 (1933) sampai 12 Ramadhan 1357 (Nopember 1938). Kemudian mereka menerbitkan majalah Al-Nadzir (Majalah Politik Mingguan) pada tanggal 30 Rabi'ul Awwal 1357 serta beberapa risalah lainnya (Ibid: 173). Mendirikan unit kemahasiswaan, memfokuskan dakwah pada sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Mereka juga membentuk persatuan Mahasiswa (Ibid:

174). Mengembangkan kelab-kelab rehlah menjadi kepanduan dan jawlah dengan tujuan 'memasukkan pendidikan kedisiplinan yang benar dalam peribadi pemuda ikhwan dan melatih mental agan terbiasa dengan kehidupan yang keras dan penuh cobaan (Ibid: 176). Ikhwan mengadakan lima kali muktamar rutin dan beberapa muktamar daerah. Mereka memandang pentingnya mengikat ikhwan dengan berbagai muktamar untuk bertukar pikiran dan menyatukan kata (Ibid: 179). Pada tahun 1932 terbentuk *Firqah Akhwat Muslimah* (Kelompok Akhwat Muslimah) yang pertama di Ismailia dan Kaherah. Kelompok ini mempunyai peranan edukatif pada kalangan wanita (Ibid: 181). Analisa terhadap berbagai fenomena tersebut menjelaskan kepada kita bahwa aktivitas pendidikan telah banyak berkembang dan mempunyai berbagai macam kegiatan pada periode ini (Utsman Abdul Mu'iz Ruslan 2000: 191-193).

Sebelum tahun 1936, Ikhwanul Muslimin terkenal sebagai organisasi sosial dan kebajikan. Ia memusatkan perhatiannya kepada ceramah agama, keruntuhan moral dan hal-hal ruhiyah. Selain itu juga masalah pendidikan, peningkatan ekonomi dan penyebaran pemikiran Ikhwan sendiri (Youseff M Choueiri 1990: 48). Dalam masa ini Ikhwanul Muslimin tidak mengikuti kegiatan politik Mesir karena tiga sebab utama. Pertama, kurangnya jaminan demokrasi untuk pergerakan-pergerakan politik. Kedua, sikap tidak harmoni di kalangan pendukung partai politik. Ketiga, bahaya yang dihadapi oleh Ikhwan sendiri (A.Z al Abidin 1988: 64).

Pada tahun 1938, Ikhwanul Muslimin telah menjadi partai politik. Minat Ikhwan dalam politik jelas terlihat dengan pelancaran majalah politik mingguannya yang berjudul *Nadhir*

pada bulan Maret 1938. Sejak itu Ikhwan mulai terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik dalam dan luar negeri (Ibid).

Persidangan ke-5 Ikhwanul Muslimin dalam tahun 1939 dianggap telah menggariskan dasar-dasar ideologinya. Dalam persidangan ini Ikhwan memusatkan perhatian kepada pengertian Islam sebagai satu system hidup yang menyeluruh berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Berdasarkan ini, kader-kader Ikhwan menyediakan panduan dasar sikap organisasi terhadap kuasa dan pemerintah serta perlembagaan dan undang-undang. Dalam persidangan ini juga, Ikhwan mengesahkan bahwa mereka adalah satu organisasi politik (Richard P Mitchel 1969: 14).

Pada peringkat awalnya, kegiatan politik Ikhwan masih bergerak di bawah tanah secara rahasia. Pandangan politiknya disalurkan melalui masjid-masjid. Empat tahun kemudian, Ikhwan telah mempunyai cabang hampir di seluruh daerah Terusan Suez. Di kawasan itu Ikhwan mulai mendirikan masjid-masjid, sekolah-sekolah dan pusat pengajian (Ensiklopedia Islam 1994: 195-196).

Menurut catatan sejarah, sampai dengan tahun 1948 M tidak kurang dari empat kali usaha pemerintah Inggris untuk membubarkan jama'ah ini. Muhammad Sayyid al- Wakil (2001) menukilkan dari kitab *Limadza Ughtilal Imam*, menulis:

Sampai akhirnya pada tanggal 4 Desember tahun 1948M, masyarakat pembaca surat kabar *Al-Asas* dikejutkan dengan tulisan besar di halaman depan yang berjudul 'Pembubaran Jama'ah Ikhwanul Muslimin'. Kemudian pada sore-nya tanggal 8 Desember 1948 M, masyarakat Mesir dikejutkan oleh selebaran informasi terbaru yang

mengumumkan adanya instruksi militer untuk membubarkan jama'ah Ikhwanul Muslimin, penyitaan semua kepemilikan, harta kekayaan, perusahaan, yayasan, rumah sakit dan kilang mereka.

Pada tahun 1948 kaum penjajah dan sekutunya bekerjasama menghancurkan Ikhwan. Negara-negara Barat menekan pemerintah Mesir untuk menghancurkan jama'ah ini dan menangkap para mujahidin sekembali mereka dari perang di Palestina. Puncak dari persekongkolan jahat ini adalah pada tanggal 12 Februari 1949, Imam Syahid mencapai kesyahidannya setelah ditembak oleh orang suruhan Raja Farouq secara pengecut di salah satu jalan di kota Kaherah (Abdul Halim Hamid 1996: 22). Umar Tilmisani (1998: 115-116), salah seorang muridnya yang juga menjadi Mursyid Am Ikhwanul Muslimin ke tiga mengisahkan saat-saat pembunuhan itu dengan menulis:

Pada 12 Februari 1949 seorang menteri menghubungi Imam Syahid dan meminta beliau untuk menemuinya di gedung *Jam'iyah Syubban al-Muslimin*, terletak di sebuah jalan paling ramai di Kaherah. Di depan gedung tersebut, bersama dengan Ustadz Abdul Karim Manshur, Imam Syahid menunggu. Ketika matahari terbenam dan menteri ini tidak menepati janjinya, Imam Syahid dengan iparnya keluar dari gedung dan memberhentikan sebuah taxi. Tiba-tiba lampu penerang jalanan dimatikan dan muncullah dua atau tiga orang mata-mata lalu melepaskan tembakan peluru ke arah Imam Syahid dan iparnya. Meskipun lukanya begitu

parah, tapi beliau mampu menahannya. Imam Syahid kembali masuk ke dalam gedung *Syubban al-Muslimin* dan meminta bantuan ambulan. Ambulan membawa kaduanya ke istana al- 'Aini. Perintah dikeluarkan agar Imam Syahid tidak diberikan pertolongan. Para jururawat akhirnya meninggalkan dan membiarkan darah mengalir dari tubuh beliau. Sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir, Raja Farouq datang untuk mencaci dan meludahi tubuh Imam Syahid. Sambil membuka matanya, Imam Syahid berkata kepada Farouq, "Semoga Allah merobek-robek kerajaannya." Ternyata pintu-pintu langit terbuka. Allah menerima do'a orang yang didzalimi, tak lama kemudian kerajaan Farouq hancur untuk selama-lamanya.

Hasan al-Banna boleh syahid, tetapi sejarah Ikhwanul Muslimin tidak berhenti karenanya. Allah memelihara risalah-Nya dan dunia kini menanti penyebaran fikrahnya yang telah menyebar di 70 negara Islam di seluruh dunia Islam.

Peran Dakwah Hasan Al-Banna Dalam Ikhwanul Muslimin

Pada bagian ini, penulis mencoba memaparkan tentang peranan dan perjuangan Hasan al-Banna di dalam Ikhwanul Muslimin, yang tentu saja tidak akan menjelaskan secara keseluruhan, karena ianya akan menjadi terlalu panjang dan sangat meluas. Penekanan yang akan di sampaikan pada bagian ini adalah sesuatu yang dianggap penting dan akan berkaitan dengan metodologi yang digunakan Hasan al-Banna dalam berdakwah.

Penulis menilai besarnya peranan Hasan al-Banna dengan kemunculan jama'ah Ikhwanul Muslimin yang dirintisnya, telah menjadi pelopor gerakan dakwah Islamiah untuk membangun kembali keadaan umat. Selain itu, wawasan politik Islam dan konsepnya tentang pendidikan Islam, penting untuk diungkapkan karena ianya termasuk diantara yang paling diperjuangkan oleh Hasan al-Banna melalui Ikhwanul Muslimin.

Pelopor Dakwah Dan Gerakan Islam

Islam adalah agama yang tinggi dan mulia, namun ketinggian dan kemuliaanya, tertutupi oleh kelemahan, kejahilan dan banyak lagi penyakit ummat yang sangat memerlukan penanganan dan terapi yang sungguh-sungguh. Keadaan yang terjadi sebagai akibat penjajahan dan penindasan bangsa Barat terhadap dunia Timur dan Islam khususnya pada pertengahan dan akhir abad ke 18 M ini, telah mengakibatkan kehancuran di segala bidang. Islam sebagai sebuah agama, sistem hidup dan peradapan, tinggallah menjadi kerangka dari sebuah kejayaan masa lalu.

Yusuf al-Qaradhawi (1999: 19), menyatakan bahwa salah satu tanda-tanda tepatnya kemunculan gerakan Ikhwanul Muslimin, adalah bahwa gerakan ini datang pada saat yang tepat dimana kaum Muslimin sedang dalam keadaan sangat membutuhkan kehadirannya, setelah negeri-negeri Muslim satu persatu dijajah dan kaum imperialis memegang kekuasaan setelah perang dunia pertama selesai. Pada bagian yang lain beliau menyayangkan tentang keadaan ummat Islam yang mengalami pukulan besar ketika sistem khilafah (yang dilaksanakan oleh kerajaan Turki Ustmani walaupun terdapat

banyak penyimpangan) runtuh, yang selama ini menjadi pegangan ummat Islam, negeri-negeri Muslim pecah menjadi negara-negara kecil dengan pemerintahan yang lemah tak berdaya baik secara politik, ekonomi ataupun sosial budaya, sehingga kedudukan ummat menjadi semakin lemah dan lebih dari itu semakin kehilangan identitas disebabkan berbagai seruan sesat yang melemahkan akidah ummat.

Besar sekali peranan Hasan al-Banna melalui gerakan dakwah Ikhwanul Muslimin dalam memobilisasi dan membangkitkan gerakan dakwah dunia Islam. Amien Rais (2000) menyatakan bahwa, sebagai orang yang melakukan studi kepustakaan gerakan dakwah ini, bahkan pernah menemui beberapa tokohnya yang masih hidup, saya melihat –terlepas dari beberapa kekurangannya- bahwa gerakan Ikhwan memiliki bagian-bagian yang relevan untuk dijadikan bahan renungan oleh gerakan dakwah Islam, atau gerakan reformasi manapun, yang ingin berjuang mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara ini. Setidaknya ada tiga hal yang:

1. Kepimpinan yang kharismatik dari Hasan al-Banna. Ia telah menjadi pemimpin sejati dalam jama'ah yang dirintisnya. Ia adalah referensi bagi pengikutnya, dalam aspek ruhaniyah, moral, intelektual, sekaligus referensi perjuangan secara umum di medan dakwah. Pengikut Ikhwan, bahkan akhirnya masyarakat umum, seperti mendapatkan sebuah kekuatan baru manakala menyaksikan Al-Banna dengan begitu semangat memperjuangkan agama, yang mencakup semangat untuk membebaskan negeri Mesir dari penjajahan imperialisme Inggris.
2. Ikhwan mendasari gerakannya dengan pemahaman Islam yang integral, didukung oleh para ulama yang memiliki

integritas keilmuan yang menonjol. Meski gerakan ini akhirnya harus 'tunduk' kepada kekuatan pemerintah dan konspirasi asing -dengan ditembak matinya sang pemimpin dan dipenjarakannya banyak tokoh-tokohnya- namun berbagai karya tulis para tokohnya kini memenuhi perpustakaan-perpustakaan dunia Islam.

3. Proses pengkaderan yang sistematis dan berkelanjutan, yang menjadikan Ikhwan sejak hari-hari awal perjuangannya dapat merekrut kader atau pengikut yang militan, baik para pemuda ataupun para tokoh agama di Mesir, yang sosok kader itu –dimanapun kini berada- mampu menjaga keaslian nilai-nilai yang diperjuangkannya.

Menurut analisa penulis, proses pengkaderan yang sistematis dan berkesinambungan merupakan faktor yang benar-benar spesifik dimiliki oleh Ikhwanul Muslimin dan jarang dimiliki oleh jama'ah yang lain, yang dengannya menjadikan jama'ah ini kuat dan solid. Semua ini tidak lepas dari peran Hasan al-Banna yang membina karakteristik dakwah sebuah gerakan komprehensif.

Wawasan Politik Islam Hasan al-Banna

Kesempurnaan Islam sebagai agama Islam yang tinggi tidak boleh ditutupi oleh pemahaman yang sempit dari ummatnya. Sebagai sebuah agama yang lengkap dan sempurna, adalah naif kalau mengurangkan satu bagian dan melebihkan bagian yang lainnya. Demikian juga pandangan Hasan al-Banna tentang politik sebagai bagian yang tidak bisa terpisahkan dari dakwah dan Islam. Beliau menyatakan dengan jelas, "Sesungguhnya seorang muslim belum sempurna keislamannya

kecuali jika ia menjadi seorang ahli politik, mempunyai pandangan jauh ke depan dan memberikan perhatian penuh kepada persoalan bangsanya. Keislaman seseorang menuntutnya untuk memberikan perhatian kepada persoalan-persoalan bangsanya” (Hasan al-Banna t.th: 8-10).

Selanjutnya dalam risalah yang lain beliau menyatakan, “Sesungguhnya kami adalah ahli politik dalam arti bahwa kami memberikan perhatian kepada persoalan-persoalan bangsa dan kami bekerja dalam usaha mewujudkan kebebasan sepenuhnya...” (Hasan al-Banna t.th: 29).

Mengenai kaitan antara Islam dengan politik dan bagaimana sikap seorang muslim terhadapnya beliau berpendapat bahwa, “Politik adalah sesuatu hal memikirkan tentang persoalan-persoalan internal maupun eksternal ummat” (Hasan al-Banna t.th: 8-10 & Utsman Abdul Muiz Ruslan 2000: 74).

Makna dari internal politik beliau menjelaskan, “Mengurus persoalan kenegaraan, menjelaskan fungsinya, memaparkan kewajiban dan hak-haknya, melakukan pengawasan terhadap para penguasa yang kemudian ditaati apabila melaksanakan kebaikan dan dikritik atau diperbaiki jika melakukan kesalahan.” Maksud sisi eksternal politik adalah, Memelihara kemerdekaan dan kebebasan bangsa, mengantarkannya memperoleh tujuan yang akan menempatkan kedudukannya di tengah-tengah bangsa lain serta membebaskannya dari penindasan dan campur tangan lain-lain pihak dalam urusannya” (Hasan al-Banna t.th: 8-10). Dari konsep pemikiran diatas, jelas menunjukkan arah pemikiran Imam Syahid yang utuh dan universal tentang Islam dan politik. Hal ini sejalan dengan apa yang pernah disampaikan

oleh penerusnya, "Dalam kitab-kitab fiqh, masalah hukum dan pemerintahan termasuk dalam bidang kajian yang utama, bukan masalah fiqh. Islam adalah hukum sekali dengan pelaksanaannya, sebagaimana ia adalah syariat dan pengajaran, serta undang-undang dan peradilan, yang satu tidak bisa dipisahkan dari yang lain" (Ali Abdul Halim Mahmud 1999: 118).

Dari semua ini, menunjukkan bahwa Hasan al-Banna adalah orang yang berusaha meletakkan fungsi politik yang bersih dan benar sesuai dengan ajaran Islam. Bahwa politik bukanlah sesuatu yang kotor dan hina sebagaimana ajaran yang diwariskan dari Machiavelli. Sehingga tidaklah mengherankan kalau Robert Jackson (1977) menilai positif Hasan al-Banna dengan menyatakan, "Dia berusaha keras memadukan akhlak dan politik, meski selalu diserang oleh orang-orang bahwa politik dan akhlak tidak mungkin dipersatukan."

Yusuf al-Qaradhawi menyatakan bahwa, al-Banna telah mengalami kelelahan dan penderitaan dalam usahanya memahamkan masyarakat bahwa Islam memberi perhatian pada politik, masyarakat, ummat dan negara sebagaimana perhatian pada ibadah, bahwa seorang muslim tidak dibenarkan hanya menyibukkan diri dengan shalat dan puasa serta ibadah-ibadah *mahdhah* lainnya saja tetapi mengabaikan urusan ummatnya di Timur dan Barat, sebab orang-orang mukmin adalah bersaudara dan umat Islam adalah satu ummat (Yusuf al-Qaradhawi 1999: 142). Selanjutnya penulis nukilkan beberapa fakta sejarah yang berkaitan dengan kegiatan politik Hasan al-Banna dan juga Ikhwanul Muslimin yang menunjukkan tentang utuhnya pemahaman beliau dalam memandang ajaran Islam.

Usman Abdul Mu'iz Ruslan(2000 : 193) memaparkan dari berbagai macam sumber dalam risalah sarjananya antara lain menyatakan, "Dalam aktivitas politik, Ikhwan mempunyai peranan besar pada masa itu, yaitu mengangkat masalah Palestina sejak ia tercetus pada tahun 1936, dengan perlawanan rakyatnya kepada Inggris dan Yahudi. Mereka ikut memberi dukungan pemikiran dan pelaksanaan dengan membela Palestina serta mempublikasikan berita-berita yang berkaitan dengannya pada surat kabar-surat kabar mereka.

Pada halaman yang lain dinyatakan, "Ikhwan mengadakan muktamar politik untuk mahasiswa-mahasiswa mereka pada bulan Muharram 1357 di gedung Pemuda. Dalam pertemuan ini, al-Banna menyampaikan pidato tentang sikap Islam terhadap politik dan partai. Para peserta muktamar memutuskan menuntut pembubaran semua partai politik dan menggantinya dengan sebuah forum bersama yang menggunakan konsep Islam dalam sebuah aspek kebangkitan (Ibid: 194).

Mengenai kegiatan politik yang secara praktek pernah dilaksanakan oleh Hasan al-Banna, Ali Abdul Halim Mahmud (1997 : 36-37) menulis, "Pada tahun 1942, Imam Hasan al-Banna mengajukan formulir pencalonan untuk menjadi anggota perwakilan rakyat. Tetapi Al-Nahas Pasha memanggil dan memintanya untuk mengundurkan diri dari pencalonan atas perintah Inggris. Saat itu terjadi perbincangan antara Imam Hasan al-Banna dan Al-Nahas Pasha. Akhirnya Imam Hasan menarik pencalonannya dengan imbalan bahwa pemerintah melonggarkan tekanan kepada jamaah dan memberinya izin untuk melakukan kegiatan dakwah seperti dulu.

Pada tahun 1945 M dimasa pemerintahan Ahmad Mahir Basya, Ikhwan kembali mencalonkan Mursyid untuk kedua kalinya sebagai wakil rakyat dari Ismailiah. Namun kabinet baru ini menggunakan strategi baru untuk memerangi calon-calon yang tidak dikehendaki oleh Inggris. Yaitu dengan memanipulasi pemilihan umum sehingga ketika hasil pemilihan diumumkan, pihak mursyid Ikhwan sangat dirugikan. Mursyid tidak tinggal diam terhadap penipuan ini, bahkan beliau menulis memorandum kepada Perdana Menteri yang berisi kecaman terhadap upaya penipuan dan tindakan agresif aparat keamanan terhadap Ikhwan (Al-Wakil, 2001: 139).

Inilah fakta sejarah yang menunjukkan orientasi pemikiran dan wawasan politik Islam Hasan al-Banna yang komprehensif dan universal. Bahwa politik juga merupakan bagian dari ajaran Islam dan juga boleh dijadikan wasilah dakwah dalam usaha menyedarkan dan memperbaiki keadaan ummat Islam.

Dakwah Melalui Pendidikan

Pembahasan pada bagian ini, lebih menekankan pada pendidikan formal yang pernah dilaksanakan oleh Imam Syahid atau Ikhwanul Muslimin khususnya, sebagai salah satu wasilah dakwah. Berikut ini penulis paparkan tentang pandangan beliau tentang pendidikan dan beberapa fakta sejarah yang berkaitan dengan peranan dakwah Hasan al-Banna di bidang pendidikan.

Hasan al-Banna berpendapat bahwa penyebab kehancuran dan kemunduran ummat Islam adalah disebabkan kejahilan mereka terhadap ajaran Islam. Oleh karena itu beliau memusatkan perhatian dan pemikiran untuk meningkatkan

kualitas ummat baik dalam hal pemikiran, wawasan dan rohaniyah. Pendidikan Islam atau tarbiyah Islamiyah merupakan salah satu cara untuk membina kembali kejayaan ummat ini. Beliau menyatakan,

“Sistem ini diawali dengan pendidikan keislaman yang berpijak pada perbaikan tilawah Al-Qur’an. Hendaknya seorang akh yang mengarah kepada madrasah dan dakwah ini bisa membaca Al-Qur’an sesuai dengan hukum tajwid, lalu menjelaskan dan menafsirkannya sesuai dengan tingkat keperluan. Hal ini kemudian diikuti dengan menghafal beberapa hadits dan penjelasannya. Setelah itu dilakukan perbaikan dari sisi aqidah dan ibadah, penyingkapan hikmah dan rahasia perundang-undangan dan adab-adab hukum Islam, pengkajian terhadap sejarah Islam dan biografi *salafus shalih* serta sirah nabawiyah secara seimbang untuk menguatkan wawasan dan spiritual” (Hasan al-Banna 1999: 67).

Konsep dan pemahaman diatas dibenarkan oleh salah seorang pengikutnya yang menyatakan bahwa, aspek ketuhanan atau keimanan merupakan bagian terpenting dalam pendidikan Islam. Demikian menurut pemahaman dan praktek Ikhwanul Muslimin. Pentingnya aspek keimanan ini sangat besar artinya dan sangat mendasar pengaruhnya, terutama mengingat tujuan pertama pendidikan Islam adalah terciptanya manusia-manusia mukmin (Yusuf Qaradhawi, 1994: 9).

Sebelum Hasan al-Banna pindah dari Ismailia ke Kaherah pada tahun 1931, Ikhwan telah membangun sebuah masjid,

sekolah untuk anak laki-laki yaitu *Ma'had Hira' Al Islami* (Sekolah Islam Al Hira'), Sekolah untuk anak-anak perempuan yaitu *Ma'had Ummahatul Mu'minin* (Sekolah Ibu Kaum Mu'minin), klub olah raga dan kelompok rekreasi. Mereka juga mendirikan beberapa cabang organisasi di luar Ismailia seperti di Syubrahkit, Suez, Jabasat Balah dan lain-lain (Ruslan, 2000: 186).

Dari bukti sejarah diatas kita bisa melihat konsep syumuliah dalam pelaksanaan pendidikan sebagai suatu wasilah dakwah. Bahkan bisa disimpulkan bahwa pendidikan Islam atau lebih dikenal dengan tarbiyah Islamiyah menjadi 'trade mark' dalam manhaj dakwah Hasan al-Banna.

Manhaj Dakwah Mohammad Natsir

Dalam perspektif M. Natsir tidak ada perbedaan mengenai makna dakwah dengan pendapat para ulama pada umumnya. Thohir Luth (1999) mengungkap pendapat M. Natsir bahwa dakwah adalah ajakan yang berisi amar ma'ruf nahi munkar. Menurutnya, ajakan tersebut tidak cukup dengan lisan saja, melainkan juga dengan bahasa, perbuatan dan keperibadian mulia secara nyata. Penulis mengamati bahwa ini merupakan pemikiran ideal yang secara konsepsional tidak jauh berbeda dengan pengertian dakwah Islam yang telah dipahami oleh masyarakat secara umum. Hingga saat ini maupun akan datang, masyarakat tetap memahami bahwa yang namanya dakwah Islam itu adalah ajakan amar ma'ruf nahi munkar yang diwujudkan dengan lisan, perbuatan dan akhlak karimah secara nyata

Dalam buku monumentalnya yaitu *Fiqhud Da'wah*, M. Natsir memandang bahwa dakwah dalam arti luas, adalah

kewajiban yang harus dipikul oleh tiap-tiap muslim dan muslimah. Tidak boleh seorang muslim dan muslimah menghindarkan diri darinya (M. Natsir 1991). Tentang konsep dakwah ini beliau mengutip beberapa ayat al-Qur'an sebagai panduan yang menguatkan tentang hukum kewajiban berdakwah bagi setiap muslim dan muslimah.

Firman Allah (s.w.t):

كنتم خير أمة أخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنكر و تؤمنون بالله

Artinya: *Kamu adalah sebaik-baik ummat, dilahirkan untuk (kemaslahatan) manusia, kamu mengajak kepada kebaikan, dan kamu mencegah dari kemungkaran, serta kamu beriman kepada Allah. (QS, Al 'Imran 3:110)*

والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا و عملوا الصالحات و تواصلوا بالحق و تواصلوا بالصبر

Artinya: *Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman dan melakukan amal shalih dan saling menasihati dengan kebangunan dan saling menasihati dengan kesabaran. (QS Al Nasr 103: 1-3).*

Mengenai tujuan dakwah, beliau menulis pada serial Media Dakwah (1975) yang menyatakan bahwa tujuan dakwah adalah: Memanggil kita kepada syariat, untuk memecahkan persoalan hidup, baik persoalan hidup perseorangan atau persoalan berumah tangga, berjemaah-bermasyarakat, bersuku bangsa, bernegara, berantarnegara. Memanggil kita kepada fungsi hidup kita sebagai hamba Allah di atas dunia yang terbentang luas ini, berisikan manusia berbagai jenis, bermacam pola pendirian dan kepercayaannya, yakni fungsi sebagai

syuhada' ala al-nas, menjadi pelopor dan pengawas bagi ummat manusia. Memanggil kita kepada tujuan hidup kita yang hakiki, yaitu menyembah Allah. Demikianlah, kita hidup mempunyai fungsi tujuan yang tertentu.

Bila diamati dengan lebih mendalam terhadap tujuan dakwah diatas, dapat diambil pemahaman yang lebih mendalam bahwa tujuan dakwah adalah memanggil manusia kembali kepada syariat atau hukum agama agar dapat menjaga, memelihara dan mengarahkan dirinya sesuai dengan ajaran agama. Disini M. Natsir menekankan bahwa Islam bukanlah sekadar suatu sistem kepercayaan saja, tetapi merupakan 'way of live' yang dapat mengatur dan mengarahkan kehidupan manusia sesuai dengan fitrahnya yang mulia.

Pada tujuan dakwah yang kedua, menegaskan fungsi hidup manusia sebagai hamba Allah di muka bumi ini, yaitu mengabdikan kepada Allah s.w.t, sebagaimana firman-Nya,

خلقت الجن و الانس الا ليعبدون وما

Artinya: *Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku* (QS Al-Dzariyah 51: 56).

Menyembah kepada Allah Swt berarti menyerahkan segala hidup dan mati kita hanya untuk Allah semata dengan mengihklaskan segala penghambaan kita kepada-Nya. Pada tujuan ini menuntut para da'i menyampaikan ajaran Islam, agar ummat manusia mengetahui dengan benar hak dan kewajibannya sebagai makhluk dan hamba Allah.

Pada tujuan dakwah yang ketiga adalah memanggil manusia untuk kembali pada tujuan hidup, yaitu mencari keredhaan Ilahi. M. Natsir berpendapat bahwa tujuan hidup yang sebenarnya adalah mencapai keridhaan Ilahi (M Thohir

Luth: 72). Pemahaman tentang keredhaan Ilahi bagi M. Natsir adalah keridhaan Ilahi yang memungkinkan tercapainya hidup yang sebenarnya, lebih tinggi kualitasnya dari hidup manusia, hidup immaterial atas kelanjutan dari hidup material, hidup *ukhrawi* yang puncak kebahagiaannya terletak pada pertemuan dengan *khaliq Azza wa Jalla*. Itu penyembah sebagai tujuan hidup (M. Natsir 1991: 100).

Dalam membahas manhaj dakwah M Natsir, penulis memandang perlu apabila menekankan kepada apa yang telah beliau tulis di dalam karya monumentalnya yaitu *Fiqhud Dakwah*, yang dianggap oleh banyak pengamat sebagai pemikiran terbesar beliau terhadap dakwah. M. Natsir memulai pembahasannya dalam *Fiqhud-Dakwah* dengan menukilkan empat ayat Al-Qur'an.

و من أحسن قولاً من دعا إلى الله و عمل صالحاً وقال اني من المسلمين

Artinya: *Siapakah yang lebih baik perkataannya dari orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal sholeh dan berkata, 'Sesungguhnya aku termasuk orang yang berserah diri (QS Fushshilat 41: 33).*

ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فاذا الذي بينك و بينه عداوة كأنه
ولى حميم

Artinya: *Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia (QS Fushshilat 41: 34).*

وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم

Artinya: *Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar (QS Fushshilat 41: 35).*

واما يترغناك من الشيطان نزع فاستعد بالله انه هو السميع العليم

Artinya: *Dan jika syetan menggangumu dengan suatu cobaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS Fushshilat 41: 36).*

Empat ayat yang dijadikan sebagai pembuka dalam penulisan buku tersebut merupakan landasan utama dalam berdakwah. Dengan menjadikan Al-Qur'an sebagai dalil dan sendi dasar dalam melangkah, merupakan bukti kokoh bahwa dakwah merupakan perintah Allah dan kerja para nabi dan utusan Allah s.w.t.

Secara garis besar, M. Natsir membagi buku ini kepada dua bagian, yaitu bagian A yang membahas tentang materi-materi dasar keislaman, dan bagian B yang membahas lebih fokus tentang dakwah dan seluk beluknya. Pada bagian A, beliau membagi lagi kedalam tiga subbagian, pertama Islam agama risalah dan dakwah, kedua risalah membina peribadi dan umat, dan terakhir adalah jejak risalah. Pada subbagian pertama M. Natsir menjelaskan tentang hakekat Islam sebagai agama risalah dan dakwah, bahwa sudah sepatutnya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan untuk memahami fitrah dan hakekat dirinya agar selalu berharap kepada risalah dan petunjuk Tuhan dalam hidupnya. Juga diterangkan tentang hakekat kehidupan di akhirat yang merupakan kehidupan yang lebih tinggi dari kehidupan di dunia. Bahwa kehidupan dunia

bukanlah tujuan hakiki, tetapi tujuan hakiki adalah keridhaan Ilahy. Setelah menjelaskan tentang materi dasar yang berkaitan dengan hakekat hidup manusia, pada subbagian yang kedua dengan judul risalah membina peribadi dan ummat, M. Natsir menekankan tentang pentingnya tauhid dan ibadah yang kuat sebagai sandaran hidup manusia. Beliau menyatakan, "Ibadah yang ikhlas dan tertib itulah sumber kekuatan bagi jiwa dan *dhamir* seseorang, untuk mengendalikan diri jangan sampai terbawa hanyut oleh hawa dan nafsu dalam bermacam bentuknya" (Ibid: 34). Pada pembahasan berikutnya mengenai manusia ijtimai'i dan persoalannya, beliau mengungkap tentang pentingnya hidup berjama'ah, yang kemudian diungkapkan berbagai permasalahan hidup manusia disertai dengan pemecahannya.

Pada subbagian ketiga dengan judul jejak risalah, M. Natsir menyatakan bahwa pembinaan terhadap ummat, mesti dimulai dari pembinaan peribadi individu, karena individu yang shalih akan membentuk keluarga yang shalih. Dilanjutkan dengan pembinaan keluarga, yang dari keluarga-keluarga yang baik akan melahirkan suatu lingkungan masyarakat yang baik, dan masyarakat yang baik akan menentukan kepada pembinaan ummat secara keseluruhan. Pada bagian B yang merupakan intisari dari pembahasan buku ini, M. Natsir memulai pada subbagian pertama dengan judul wajib dakwah, dengan menukil ayat Al-Qur'an:

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و أولئك هم
المفلحون

Artinya: *Dan hendaklah ada diantara kalian, satu kelompok yang mengajak (manusia) kepada kebaikan, menyuruh mereka kepada yang*

Maretruf dan mentegah (mereka) dari kemungkaran, merekalah orang-orang yang berjaya” (QS Ali-'Imran: 104).

Ayat ini menjadi pembuka pembahasan tentang serah terima risalah kenabian dari Rasulullah kepada ummatnya yang berupa amanah dakwah. Beliau (Ibid: 108) menyimpulkan dengan tulisan:

Rasulullah s.a.w sudah menyampaikan risalah itu, disaksikan oleh ribuan ummat di Padang Arafah, pada masa yang sama Rasulullah memohon agar Allah menyaksikan kesaksian ummatnya. Rasulullah sudah mewasiatkan, supaya yang sudah menyaksikan menyampaikan kepada yang tidak hadir. Yang sudah mendengar menyampaikan kepada yang belum mendengar. Yang sudah tahu menyampaikan kepada yang belum tahu, dimanapun mereka berada, turun temurun, terus menerus dari semasa ke semasa.

Pada pembahasan-pembahasan berikutnya yang mengangkat judul *fiqhud* dakwah, *kaifiyat* dan adab dakwah, akhlak tiang dakwah dan terakhir berupa ringkasan dan penutup, menjelaskan tentang dinamika dunia dakwah yang membuktikan kualitas dan kekayaan pemikiran M. Natsir tentang dakwah. Hasil tulisan ini menurut analisa penulis ternyata bukan hanya disebabkan oleh faktor pemahaman yang mendalam tentang Islam dan dakwah, akan tetapi juga karena adanya pengalaman yang luas di medan dakwah secara praktek.

Diantara sesuatu yang menarik untuk diamati adalah, apa yang M. Natsir tulis dalam buku ini selalu didasarkan kepada dalil-dalil yang kuat dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi, juga menyertakan riwayat-riwayat kehidupan para sahabat yang dihubungkan dengan realitas kehidupan sekarang. Ini menunjukkan pemahaman M. Natsir tentang hakekat dan realitas dakwah yang merupakan perintah Allah s.w.t, dicontohkan dan dilaksanakan oleh para nabi dan rasul-Nya untuk kemudian disampaikan kepada ummat manusia. Dari sini bertemu antara nilai-nilai Ilahiyah dari langit dengan hakekat kehidupan yang ada di bumi, bahwa manusia tidak ada jalan lain baginya kecuali mengikuti petunjuk dan perintah Allah s.w.t sebagai satu-satunya jalan hidup. Selain dari itu, di akhir buku ini M. Natsir juga melampirkan salinan surat-surat Rasulullah s.a.w kepada kepala-kepala negara asing yang diambil dari kitab *Nuzhatul Majalis*. Walaupun tanpa komentar dan penjelasan, namun menurut penulis, M. Natsir juga mengisyaratkan tentang adanya salah satu manhaj dakwah yang pernah Rasulullah lakukan yaitu, dakwah kepada raja-raja atau pemimpin suatu kaum dengan surat. *Al-da'wah bi al-risalah* merupakan bagian dari wasilah dakwah yang pernah dicontohkan bukan hanya oleh Rasulullah, tetapi juga oleh nabi sebelumnya seperti Nabi Sulaiman a.s. Ini telah memberikan pengajaran tentang bagaimana salah satu manhaj yang harus dilaksanakan terhadap salah satu objek dakwah yaitu pemimpin atau penguasa suatu kaum. Selain itu juga menunjukkan bahwa para penguasa adalah juga sebagian dari *mad'u* yang juga perlu disampaikan dakwah kepada mereka dengan cara atau metode yang khusus.

Dakwah Fardiyah M. Natsir

Dakwah fardiyah merupakan salah satu manhaj dalam berdakwah yang juga telah dilakukan dan dicontohkan oleh Rasulullah s.a.w. Demikian pula dengan M. Natsir yang dalam kehidupannya selalu tidak pernah diam dalam hal kebaikan, juga selalu melakukan dakwah fardiyah sama ada keberadaannya sebagai da'i perseorangan ataupun melalui jama'ah. Dalam pembahasan ini penulis memfokuskan kepada dakwah fardiyah M. Natsir melalui pendidikan dan media massa.

Melalui Pendidikan

Sebagai seorang tokoh yang multidimensi, tentu saja M. Natsir juga memandang penting arti dan nilai pendidikan sebagai salah satu proses pembinaan terhadap ummat. Salah satu pandangannya mengenai pendidikan adalah menjadikan tauhid sebagai prinsip utama pendidikan. Beliau menyatakan, "Mengetahui Tuhan, mentauhidkan Tuhan, mempercayai dan menyerahkan diri kepada Tuhan harus menjadi dasar kepada tiap-tiap pendidikan yang hendak diberikan kepada generasi yang kita didik, jika kita sebagai guru ataupun ibu bapak, betul-betul cinta kepada anak-anak yang telah dipercayakan Allah kepada kita" (M. Natsir 1961: 116).

Pemikirannya tentang keutamaan tauhid dalam pendidikan ini sejalan dengan apa yang ditulis oleh Afzalur Rahman (1993) yang menyatakan, "Tauhid (keesaan Allah) merupakan dasar pendidikan Nabi Muhammad s.a.w. Baginda menerangkan bukan saja makna dan kepentingannya, tetapi juga segala perintah Allah dan kewajiban setiap orang supaya mereka beriman kepada Allah yang Esa."

Jiwa da'i M. Natsir telah ada jauh sebelum menjadi Perdana Menteri ataupun tokoh Internasional. Ini semua adalah hasil didikan dari kedua orang tuanya yang selalu menanamkan nilai-nilai agama dan kecintaan kepada Islam dalam pendidikan anak-anaknya. Demikian pula semasa memulai kariernya sebagai seorang guru, beliau menjadikan pendidikan sebagai wasilah dakwah dan menyebarkan agama Allah. Beliau menulis, "Saya mulai mengajar pada sebuah sekolah MULO. Salah seorang muridnya ialah Dahlan Djambek (Dikemudian hari terlibat PRRI). Saya mengajar karena terdorong untuk mengajarkan agama. Tidak dibagi gaji" (M. Natsir 1998: 3).

Kepedulianya terhadap pendidikan Islam yang sangat besar, terlihat dari ungapannya yang menyatakan, "Ketika saya melihat sekolah-sekolah kita sama sekali kosong dari pengajaran agama, saya berniat mendirikan pendidikan modern yang sejalan dengan pendidikan agama. Kemudian saya dirikan sekolah Pendidikan Islam (Pendis). Dengan gaya Muhammadiyah, tidak banyak berbeda, hanya kami lebih bersifat praktek. Misalnya, waktu itu kami mempelopori melakukan shalat Jum'at di sekolah. Juga mengajarkan kesenian untuk menghaluskan perasaan. Islam kan tidak melarang kesenian, termasuk Tonil (kesenian rakyat) (Ibid: 3).

Ada satu alasan yang menyebabkan dikemudian hari M. Natsir tidak lagi menekuni dunia pendidikan secara praktek, akan tetapi lebih kepada dakwah yang beliau anggap lebih memberikan sumbangan dan peran besar terhadap ummat ini. Beliau menyatakan, "Sebagai seorang ustadz berpendidikan Barat, dan terjun ke politik, akhirnya sekarang saya 'lari' kepada dakwah. Pendidikan sudah dilakukan oleh banyak orang. Dulu kan saya mendirikan sekolah, kalau saya buat sekolah, hanya

satu sekolah yang bisa saya urus. Habis waktu dari pagi sampai malam untuk satu sekolah. Makanya, lebih baik sekolah itu diserahkan kepada orang yang buat sekolah seperti pesantren-pesantren, Muhammadiyah. Kemudian mereka kami bantu” (M. Natsir 1998: 22).

Inilah sekelumit rentang waktu yang pernah dilaksanakan M. Natsir sebelum akhirnya beliau memasuki dunia politik, terlibat dalam pemerintahan dan aktif di bidang dakwah ataupun dunia Internasional melalui Rabithah Alam Islami. Hanya yang perlu diingat adalah bahwa apa yang dilakukan M. Natsir ini merupakan dakwah fardiyah dalam bidang pendidikan secara formal. Bukan berarti selepas itu beliau tidak pernah lagi aktif di dunia pendidikan atau pembinaan umat. Malah sebaliknya, bahwa proses pembinaan, pendidikan dan peningkatan terhadap umat ini terus beliau lakukan sampai akhir hayatnya, walaupun tidak melalui jalan formal akan tetapi melalui jama'ah dan organisasi yang beliau rintis selama ini yaitu Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII).

Media Massa

Dakwah fardiyah melalui media massa telah dilakukan M. Natsir sejak muda. Awalnya pada masa beliau masih belajar pada AMS Bandung pernah membantah pidato seorang pendeta Protestan bernama Ds. Christoffel melalui surat kabar *Algemeen Indisch Dagblad* (AID). Setelah itu pada usia 26 sampai 30 tahun beliau telah berpolemik dengan Soekarno tentang masalah keagamaan dan kenegaraan. (Suara Masjid 1993: 12). Tentang perbedaan pendapat dengan Soekarno beliau menyatakan, “Saya tertarik dengan pidato Bung Karno. Tapi tidak setuju seratus

persen. Lalu saya menanggapi dengan menulis. Bung Karno kan suka menghina Islam (M. Natsir 1998: 4).

Natsir mulai melibatkan diri dalam polemik tentang Islam dan kebangsaan pada tahun 1931, pada waktu baru berusia 23 tahun. Dengan nama samaran Is, almarhum menulis artikel dengan judul 'Indonesisch Nationalisme' pada majalah Pembela Islam nomor 36, Oktober 1931 (Anwar Hayono 1995: 13). Sejak itu dakwah melalui tulisan terus mengalir baik dalam bentuk artikel yang jumlahnya ratusan pada berbagai macam majalah dan surat kabar ataupun melalui buku-buku. Tidak mengherankan, Yusuf Abdullah Puar menyebutkan ada 52 judul ditulis M. Natsir dalam berbagai kesempatan sejak tahun 1930 (Yusuf Abdullah Puar 1978: 4).

Deliar Noer menyebut M. Natsir sebagai intelektual-ulama atau ulama-intelektual. Sebagai seorang intelektual-ulama, M. Natsir melahirkan karya-karya ilmiah yang monumental. Karya ilmiah M. Natsir mengenai berbagai macam masalah sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dakwah dan lain-lain. Satu mata rantai yang menjadi prioritas dalam karya-karya ilmiah tersebut adalah menampilkan Islam sebagai trend utamanya (Thohir Luth 1999: 28).

M. Natsir sangat menyadari arti media massa sebagai sebuah alat menyebarkan pemikiran, mempengaruhi dan mengajak orang lain kepada suatu tujuan. Karenanya beliau benar-benar memanfaatkan alat ini sebagai wasilah dakwah. Ini terbukti dalam beberapa tulisannya yang banyak dimuat oleh media massa mengarah kepada usaha memperbaiki umat.

Beliau sangat kecewa ketika pada masa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, peranan media massa sangat dikekang. Karena faktor politik yang menjadikan

setiap kritik yang dilakukan terhadap pemerintah tidak dinilai sebagai *ishlah*, akan tetapi lebih dianggap sebagai makar dan usaha untuk merongrong dan menjatuhkan pemerintahan. Beliau mengungkapkan rasa kecewanya dengan menulis, "Media massa kita bukanlah media massa yang merdeka. Kita telah mengalami selama Orde Baru pemberangusan/penutupan sekurang-kurangnya empat harian besar di tahun 1974, yaitu: Indonesia Raya, Pedoman, Nusantara dan Abadi. Pelita yang tadinya diharapkan akan dapat menyuarakan pendapat-pendapat ummat Islam, 'ditertibkan oleh Kopkantip karena berani menyiarkan sebagian kecil dari penyelewengan yang berlaku dalam Pemilihan Umum tahun 1982" (M. Natsir t.th: 21-22).

Dakwah Melalui Jamaah

Membahas dakwah melalui jamaah, maka tidak akan lepas dari membicarakan Masyumi dan DDII yang di dalamnya M. Natsir menjadi orang yang sangat menentukan perjalanannya. Walaupun demikian bukan berarti hanya dua jama'ah atau organisasi ini saja yang yang diikuti oleh M. Natsir, karena sejak muda beliau telah aktif dalam beberapa organisasi diantaranya Jong Islamiten Bond Padang, PII (Partai Islam Indonesia) dan PERSIS (Persatuan Islam). Hanya dalam hal ini melalui Masyumi dan DDII, pemikiran, pengaruh dan nama besar M. Natsir telah dapat mewarnai perkembangan sejarah di Indonesia, khususnya di bidang dakwah. Dalam Masyumi M. Natsir berdakwah dan memperjuangkan Islam melalui bidang politik, sedangkan melalui DDII, lebih terlihat lagi perannya yang sangat besar terhadap perjuangan dakwah di Indonesia.

Masyumi

Pembahasan mengenai dakwah M. Natsir melalui jama'ah maka tidak bisa lepas dari Masyumi. Namun yang perlu penulis tekankan adalah bahwa pembahasan pada bagian ini bukan yang berkaitan dengan perjalanan Masyumi sebagai partai politik dan kegiatan politik M. Natsir, akan tetapi lebih jauh memberikan penekanan kepada perjuangan M. Natsir dalam menegakkan kebenaran, menjadikan setiap kesempatan dan kemampuan yang ada untuk berdakwah dan memperjuangkan agama Allah melalui partai politik dan jama'ah seperti Masyumi. Keberadaan M. Natsir dalam Masyumi telah membawa nuansa baru bagi perjuangan umat Islam Indonesia terhadap kepentingan agama, politik, ekonomi dan sosial. Karena Masyumi merupakan organisasi kesatuan, maka anggota-anggotanya memiliki bermacam-macam pandangan keagamaan, politik, ekonomi dan sosial (Thohir Luth 1999: 41).

Melalui Masyumi M. Natsir berusaha menjelaskan tentang hakekat politik dalam Islam. Bahwa Islam bukanlah sebatas ibadah *mahdhah* saja. Beliau menyatakan dalam sebuah wawancara:

Banyak sekali masalah kontemporer yang dihadapi Islam sebagai kelanjutan dari proses yang telah berlangsung sebelumnya, terutama masalah-masalah yang berlanjut setelah konstituante. Perlu diketahui bahwa Islam adalah agama mayoritas penduduk di negara kita, tetapi banyak sekali umat Islam yang belum memahami Islam, atau yang memahami Islam dari sudut pandang lain yang dipengaruhi oleh konsepsi-konsepsi (pemahaman) Barat.

Dalam konteks pemahaman yang sering dilukiskan sebagai kehidupan duniawi dan kehidupan spiritual misalnya, Islam tidak mengenal dikotomi (pemisahan) ini. Islam memandang kehidupan manusiawi di dunia ini secara komprehensif, tidak ada pemisahan kehidupan, termasuk dalam hubungan antara orang sebagai pribadi, sebagai warga masyarakat dan sebagai warga negara” (M. Natsir 1989: 59-60).

M. Natsir menggunakan istilah pemodernan politik Islam yang mengandung arti sebagai sikap dan pandangan yang berusaha untuk melaksanakan ajaran dan nilai-nilai ruhiyah, sosial dan politik Islam yang terkandung di dalam al-Qur’an dan sunnah Nabi dan menyesuaikannya dengan perkembangan-perkembangan terkini dalam sejarah peradaban umat manusia (Anwar Haryono 1995: 126-127). Dalam ungkapan yang lebih spesifik lagi tentang kaitannya dengan dakwah, M. Natsir menyatakan, “Sebagai seorang muslim, kita tidak boleh melepaskan diri dari politik. Sebagai seorang ahli politik, kita tidak boleh melepaskan diri dari ideologi kita, yaitu ideologi Islam. Bagi kita, menegakkan Islam itu tidak boleh dilepaskan dari menegakkan masyarakat, menegakkan negara dan menegakkan kemerdekaan (M. Natsir 1958: 157).

Dalam Masyumi M. Natsir banyak memperjuangkan kepentingan Islam melalui parlemen. Contoh yang sangat jelas adalah pembelaannya ketika terjadi perbedaan pendapat yang tajam tentang pancasila atau Islam sebagai dasar negara pada tahun 1956. Pada saat itu, Presiden Soekarno lebih terlihat aktif dalam melakukan intervensi politik. Pancasila ditampilkan oleh Soekarno sebagai pengganti konsep Islam. Bahkan sebelumnya

pada tahun 1953, Presiden Soekarno menyatakan sikapnya mengenai negara Islam. Ia menyatakan dalam salah satu pidatonya di Amuntai, Kalimantan bahwa apabila kita mendirikan negara berdasarkan Islam maka beberapa daerah yang penduduknya bukan Islam akan memisahkan diri (Syafiq A Mughni 1994:109). M. Natsir memberi kritikan yang tajam atas pernyataan tersebut. Dalam sebuah pidato yang berjudul 'Islam Sebagai Dasar Negara', beliau menyatakan bahwa untuk dasar negara, Indonesia hanya mempunyai dua pilihan yaitu sekularisme (*la diniyah*) atau fahaman agama (*diin*) (M. Natsir 1957: 12). Bahkan dalam kritikan yang lebih keras lagi M. Natsir mengatakan, "Pancasila tidak patut dijadikan ideologi negara, karena sila-sila itu semuanya relatif, baik sila-sila itu sendiri maupun hubungan satu dengan lainnya. Berbeda dengan pancasila, Islam mempunyai hukum- hukum yang diberikan kepada manusia oleh Tuhan melalui wahyu yang memberikan ukuran mutlak untuk mengatur persoalan-persoalan manusia" (M. Natsir 1958: 144-145).

Sesuatu yang patut dicatat oleh sejarah adalah, sikap M. Natsir yang mengagumkan ketika beliau berusaha mencari jalan tengah dengan mengajak berdamai kepada para pendukung pancasila (kaum nasionalis sekuler) dengan memberikan argumentasi yang kuat apabila mereka menerima Islam sebagai dasar negara. Dalam sidang pleno Konstituante tanggal 12 Nopember 1957 beliau menyatakan, "Saya ingin menyampaikan seruan yang sungguh-sungguh kepada saudara-saudara yang pendukung pancasila. Sila-sila yang saudara-saudara maksud ada terdapat dalam Islam. Bukan sebagai '*pure concept*' yang steril tetapi sebagai nilai-nilai hidup yang nyata dan terang. Dengan menerima Islam sebagai falsafah negara, saudara-

saudara pembela pancasila tidak dirugikan apa-apa. Baik sebagai pendukung pancasila atau sebagai orang yang beragama. Malah akan memperoleh satu *state phylosophy* yang hidup berjiwa, berisi tegas dan mengandung kekuatan. Tak ada satupun dari lima sila yang terumus dalam pancasila itu akan gugur apabila saudara-saudara menerima Islam sebagai dasar negara (M. Natsir 2000: 85).

George Mc. T. Kahin seorang Profesor dari Universiti Cornell (AS) yang dikenal sebagai Ahli Studi Indonesia, memberikan penilaian positif tentang perjuangan politik Natsir selama ini. Beliau menyatakan, “Tetapi menurut pikiran saya sumbangan yang paling besar dari Bung Natsir terhadap tanah airnya adalah diskusinya mengenai pengaruh aliran reformis dalam Islam dan cara-cara dimana dia dan para pemimpin Islam lainnya berusaha untuk mempergunakan konsep-konsep Islam pada realitas-realitas dari masyarakat Indonesia” (Suara Masjid 1993: 17). Khususnya tentang Masyumi, dia menambahkan :

Berkaitan dengan peranan politik Mohammad Natsir, ada beberapa hal penting yang saya anggap masih belum jelas kebanyakan para pengamat menilai. Teranglah sudah bahwa salah satu dari sumbangannya yang paling berarti dapat dilihat dalam lamanya masa ia menjadi ketua umum dari partai politik Masyumi. Pengaruhnya dalam kepemimpinan partai selalu kuat, dan saya percaya bahwa ia harus dibanggakan sebagai telah berbuat banyak dalam memajukan cita-cita progresif dalam penentuan arah politik partai. Ia mempunyai pengaruh besar atas pendirian Masyumi dalam soal-soal Luar Negeri sebagaimana dalam

hal-hal Dalam Negeri, dan ini kadangkala adalah bersifat menentukan dalam mempertahankan bantuannya yang terus menerus bagi suatu politik Luar Negeri yang bebas dan non-blok (Ibid: 20).

M. Natsir memimpin Masyumi sebagai ketua umum sejak 1949 sampai 1958, dua tahun sebelum dibubarkan. Sembilan tahun, M. Natsir memainkan peranannya dalam Masyumi sebagai partai terbesar dalam percaturan politik di Indonesia. Sebagai pemimpin politik Islam, M. Natsir secara maksimal telah memberikan seluruh tenaga dan buah pemikirannya bagi kepentingan ummat Islam di Indonesia dan seluruh bangsa Indonesia. Hal tersebut secara sederhana dapat dibuktikan melalui apa yang disebut 'Mosi Integral M. Natsir' (Ibid: 42).

Inilah beberapa catatan dan fakta sejarah yang terungkap tentang peranan besar dan perjuangan M. Natsir. Penulis tidak akan memperpanjang pembahasan yang berkaitan dengan sejarah dan politik, karena sudah banyak dibahas dan dikaji oleh banyak peneliti. Hanya yang menjadi penekanan dalam penulisan bagian ini adalah komitmen yang tinggi dari M. Natsir untuk selalu berdakwah di jalan Allah s.w.t. dengan memanfaatkan sarana, prasarana dan kesempatan yang ada melalui jama'ah khususnya Masyumi.

Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII)

Kalau di dalam Masyumi, M. Natsir lebih terlihat dalam peranan dan perjuangan politiknya dalam berdakwah dan membela Islam, tetapi tidak dalam Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII). Jama'ah atau tepatnya disebut gerakan

dakwah yang beliau dirikan ini, memang terfokus kepada dakwah dalam berbagai aktivitasnya. Beliau menyatakan, "Politik dan dakwah itu tidak terpisah. Kalau kita berdakwah, baca Qur'an dan Hadis, itu semuanya politik, jadi dulu berdakwah lewat politik dan sekarang berpolitik melalui jalur dakwah. Ya mengaji politik, begitulah. Saya merasa bahwa DDII itu tidak lebih rendah dari politik. Politik tanpa dakwah itu hancur. Lebih dari itu, bagi saya untuk diam itu tidak bisa" (M. Natsir 1998: 22).

Ketika membicarakan DDII sebagai sebuah jama'ah atau gerakan dakwah, maka tidak bisa lepas dari M. Natsir sebagai salah satu pendiri dan ketua umum sampai akhir hayatnya. Thohir Luth (1999) menyatakan, "Pertumbuhan dan perkembangan DDII tidaklah bisa dipisahkan dari peran M. Natsir didalamnya. Untuk menentukan arah dan kebijakan gerakan dakwah yang dilaksanakan DDII dalam masyarakat, M. Natsir memakai prinsip musyawarah. Ternyata gerakan dakwah yang dilaksanakannya tidak hanya ditujukan pada masyarakat kota, tetapi juga masyarakat pedesaan. Hal ini bisa dilihat dari berbagai kegiatan yang dilakukan baik langsung ataupun tidak langsung di pedesaan."

Banyak peneliti menilai bahwa DDII merupakan wadah perjuangan M. Natsir setelah Masyumi. Tidak salah adanya anggapan seperti ini, dan M. Natsir sendiri tidak pernah menafikan kenyataan ini. Walaupun dibantah oleh Anwar Harjono (1995) dengan menyatakan, "Masyumi itu partai politik, sedangkan Dewan Dakwah 'cuma' gerakan dakwah yang ruang lingkungannya serba terbatas. Dewan Dakwah tidak punya anggota, karena bukan organisasi kemasyarakatan atau organisasi politik. Tetapi simpatisannya banyak sekali." Namun

menurut penulis hakekat ini tidaklah dinafikan. Setelah segala usaha untuk kembali menghidupkan Masyumi menemui kegagalan, maka DDII menjadi mercusuar perjuangan M. Natsir selanjutnya dan M. Natsir sendiri-pun tidak pernah menafikan kenyataan ini. Pembahasan yang lebih mendetil tentang DDII dan peranan beliau didalamnya akan dibahas pada bab berikutnya.

Mohammad Natsir Dan DDII

M. Natsir dikenal sebagai seorang tokoh yang multidimensi. Artinya keperibadian, kemampuan serta keahlian yang ada padanya merupakan sesuatu yang jarang dimiliki oleh kebanyakan orang. Kegagalannya berdakwah melalui bidang politik pada masa pemerintahan Soekarno, tidak membuatnya putus asa dan menyerah. Sejarah telah mencatat tentang perjuangan beliau untuk memberikan yang terbaik kepada bangsa dan agamanya. Thohir Luth (1999) menyatakan :

M. Natsir memang sosok pemimpin yang pantang menyerah pada penguasa. Sungguhpun Masyumi telah dibubarkan oleh kekuasaan Soekarno, ia masih berusaha dan masih berharap pada masa orde baru (pemerintahan Soeharto), Masyumi bisa bangkit dan dapat berperan kembali dalam dunia politik. Usaha untuk menghidupkan kembali Masyumi pada masa pemerintahan Soeharto memang dilakukan secara sungguh-sungguh. Beberapa dialog tingkat tinggi diusahakan untuk mewujudkan keinginan itu, tetapi sulit terwujud. Kemudian M. Natsir memutuskan untuk terjun ke dunia dakwah. Bersama dengan beberapa tokoh

Masyumi lainnya, mereka mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII).

Satu majelis silaturahmi digelar di Masjid Al Munawwarah kampung Bali 1 No. 53 Tanah Abang Jakarta Pusat, pada hari Ahad tanggal 26 Februari 1967 (17 Dzulqaidah 1386). Dalam majelis itu hadir beberapa tokoh ummat seperti bapak Mohammad Natsir, Prawoto Mangkusasmito, Muhammad Roem dan lain-lain. Juga tampak beberapa tokoh ulama seperti DR. Muhammad Rasyidi, K.H. Taufiqurrahman, Buya H. Mansur Daud Dt. Palimo Kayo, K.H. Hasan Basri, Al Ustadz H. Agoes Cik dan beberapa orang lainnya. Diantara kesimpulannya dapat dicatat dengan singkat sbb:

- a. Partai-partai Islam belum mendapat dukungan yang memada'i dari seluruh umat Islam di negeri ini.
- b. Pemimpin-pemimpin Islam belum punya visi dan misi yang sama dalam gerakan perjuangannya.
- c. Jumlah umat Islam Indonesia memang besar dari segi kuantitas, tetapi kecil dari segi kualitas, baik dalam bidang aqidah, ibadah dan akhlaq, ataupun bidang ilmu pengetahuan, ekonomi dan politik.

Setelah membahas panjang lebar tentang problematika partai-partai, pemimpin-pemimpin dan kualitas umat Islam pada umumnya, dan setelah melihat kenyataan bahwa perjuangan tidak dapat mencapai sasaran yang dituju, jika dilaksanakan hanya melalui politik praktis, tanpa didukung oleh perjuangan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman umat, baik dari segi aqidah, ibadah dan akhlaq, maupun dari segi kehidupan sehari-hari dalam bidang ilmu pengetahuan, ekonomi dan politik. Maka Majelis Silaturahmi

memutuskan: “Membentuk satu Badan Perjuangan dalam ‘scope’ yang lebih luas dan komprehensif. Badan itu dinamai: “Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia” disingkat dengan “Dewan Dakwah” (H. Hasanuddin Abu Bakar Dt. Rajo Angek, 2000).

Mengenai pendirian DDII, Mantan Perdana Menteri Jepang Takeo Fukuda menyatakan dalam sebuah artikelnya :

Lama setelah kacau bilau dunia politik ditinggalkannya, ayahanda M. Natsir yang pernah dua kali dipenjara sebagai tahanan politik, tetap sibuk membina bangsanya. ‘Kalau dulu,’ katanya dalam sebuah wawancara, ‘kita berdakwah melalui politik, tapi sekarang kita berpolitik melalui dakwah. Setelah kenyang pengalaman politik dengan menjadi anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat waktu negara republik ini baru merdeka, beberapa jabatan tinggi eksekutif negara dan terlibat dalam kekacauan PRRI menentang Pemerintahan ‘kiri’ Soekarno, maka pada tahun 1967, ayahanda M. Natsir dan kawan-kawan mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, di sebuah masjid di tempat yang ramai di tengah kota Jakarta, Kramat Raya. Sebuah lembaga yang bertahun-tahun kemudian dikenal luas sebagai organisasi dakwah paling aktif terhadap ketetapan-ketetapan penguasa yang ‘merugikan’ umat Islam (Suara Hidayatullah 1993).

Pada periode pertama, DDII yang merupakan yayasan dan lembaga dakwah ini dipimpin oleh M. Natsir sebagai ketua dan H.M. Rasyidi sebagai wakil ketua. Sekretaris I dan II adalah

H. Buchari Tamam dan H. Nawawi Duski, serta bendahara H. Hasan Basri, dengan beberapa anggota yaitu: H. Abdul Malik Ahmad, Prawoto Mangkusasmito, H. Mansur Daud Datuk Panglimo Kayo, Oesman Raliby dan Abdul Hamid. Susunan pengurusnya, sampai pada usia DDII yang kedua puluh tahun tidak mengalami perubahan, kecuali penambahan dua wakil ketua yaitu H. Muhammad Yunan Nasution dan Anwar Harjono, sedangkan anggotanya mengalami pengurangan menjadi empat orang yaitu: H. Abdul Malik Ahmad, Burhanuddin Harahap, Osman Raliby dan Mas'ud Lutfi (Lukman Hakim 1992: 150).

Adapun tujuan utama DDII adalah untuk mengaktifkan dan mengembangkan kualitas dakwah. Di samping itu pula perlu menguasai bidang penyelidikan dan pembangunan bagi memantapkan mutu dakwah. Untuk mencapai tujuan tersebut, DDII memiliki beberapa objektif sebagai berikut:

1. Mempersiapkan para da'i dalam melakukan kewajiban mereka supaya mencapai hasil yang memuaskan.
2. Memelihara kerjasama yang baik dengan badan dakwah yang lain.
3. Pemerataan metode dakwah melalui tidak adanya pertentangan di kalangan para da'i dalam melaksanakan kegiatan dakwah.
4. Pengumpulan dana untuk membiayai berbagai macam kegiatan dakwah (Arif Hizbullah Sualman 1995: 85).

Ada catatan penting yang ingin di tekankan M. Natsir dari objektif pendirian DDII ini yaitu, selain berusaha meningkatkan kegiatan dakwah secara kuantitas dan kualitas, juga perlu di sadari bahwa sejak awal beliau telah memandang partingnya koordinasi atau adanya kerja sama dalam kerja

dakwah baik secara personal antara da'i maupun antara badan dakwah yang ada. Karena bagi M. Natsir, dakwah adalah kerja berat dan perlu adanya kebersamaan dalam memikul tanggung jawabnya.

Sejarah mencatat, jabatan puncak lembaga Dewan Dakwah tetap di pegang Bapak Mohammad Natsir sampai akhir hayat beliau (1993), berarti selama 26 tahun, lebih seperempat abad berada di bawah kepemimpinannya. Wajar kalau lembaga Dewan Dakwah selalu diidentikkan dengan pemikiran Mohammad Natsir, karena selain menjadi pemimpin, pemikiran beliau-lah yang banyak mewarnai perjalanan Dewan Dakwah.

Peranan Dan Perjuangan M. Natsir Dalam DDII

Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia atau lebih dikenal dengan Dewan Dakwah, lahir dari sebuah pemikiran yang memandang perlu ditingkatkannya kualitas yang lebih baik, baik metode maupun hasil yang akan dicapai dalam usaha dakwah. Ini disebabkan karena para pendiri menyadari bahwa semakin hari tantangan dakwah juga semakin meningkat sejalan dengan kemajuan ilmu dan teknologi (Suara Masjid 1993: 5).

Keberadaan M. Natsir di dalam Dewan Dakwah bukan terbatas sebagai salah seorang pendiri, namun lebih tepat dikatakan sebagai penggerak dan penentu setiap dasar yang dilaksanakan. Sampai akhir hayatnya beliau tetap memegang pimpinan selama lebih kurang 26 tahun. Penulis menilai peran beliau sebagai pemimpin dan penggerak yang menentukan arah perjuangan Dewan Dakwah sangatlah besar. Dalam kedudukan yang lain beliau dikenal dengan sebutan 'Hati Nurani Umat' karena benar-benar merasa dimiliki dan menjadi milik ummat.

Penulis menilai ada 4 hal yang menjadi tumpuan perjuangan M. Natsir melalui DDII, yang akan menjadi pembahasan pada bagian ini.

1. Koordinasi Dakwah

Bagi M. Natsir, dakwah adalah tugas berat yang bebannya tidak mungkin dipikul sendirian oleh DDII sebagai sebuah gerakan dakwah, apalagi oleh beliau secara pribadi. Karenanya penulis menilai, melalui Dewan Dakwah, M. Natsir berusaha melakukan koordinasi dalam melaksanakan kerja-kerja dakwah, baik secara individu perseorangan dengan para alim ulama dan cendekiawan ataupun secara kolektif dengan organisasi dakwah yang lain dan juga badan-badan sosial kemasyarakatan yang dianggap mempunyai kesamaan visi dan misi untuk dakwah dan kebaikan umat. Contoh nyata yang beliau lakukan, sebagaimana ditulis dalam Majalah Suara Masjid (1993) antara lain dinyatakan: Sejak tahun 70-an beliau sudah mulai mengajak berdialog dengan pemikir-pemikir kampus seperti Imaduddin Abdurrahim, Amien Rais, H. Syaifullah Mahyuddin, Fuad Amsyari, Hasan Langgulung, Mochtar Naim, AM Lutfi, H. Sjadali dan lain-lain guna membahas bagaimana menggarap dakwah.

Beliau juga mendorong berdirinya Lembaga Islam untuk Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LIPPM), terbentuknya Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Islam (BKSPTIS), Badan Kerjasama Pondok Pesantren (BKSPP) dan Ikatan Masjid Indonesia. Begitu juga jaringan komunikasi dan informasi dakwahnya, disamping lembaga-lembaga dakwah yang ada di Asean, juga melakukan hubungan dengan pihak-pihak di Pakistan, Jepang, Timur Tengah, Afrika Selatan, Eropa,

Amerika, Australia dan kawasan pasifik lainnya (Suara Masjid 1993:6).

Pengalaman M. Natsir sebagai bekas seorang Perdana Menteri dan juga tokoh Internasional, memudahkan beliau untuk menjalin kerjasama dan membuat jaringan dakwah dengan berbagai macam pihak. Kesemuanya benar-benar dimanfaatkan untuk mendukung dan membantu terciptanya kerja sama yang baik dalam melaksanakan kerja-kerja dakwah.

2. Pemberdayaan Masjid

Dalam pandangan M. Natsir, masjid merupakan salah satu tonggak kekuatan umat Islam. Beliau berpendapat bahwa untuk menghadapi prospek dakwah Islamiyah di masa depan adalah "Perlunya memelihara hubungan kerjasama yang harmoni antara tonggak-tonggak umat Islam Indonesia sekarang ini, menurutnya tonggak-tonggak yang dimiliki oleh umat dewasa ini yaitu: masjid, pesantren dan kampus" (Natsir Zubaidi 1993: 9).

Sesuai dengan fungsinya, seperti pada zaman Rasulullah s.a.w, masjid bukan hanya sebatas tempat untuk beribadah, akan tetapi juga merupakan tempat pembinaan yang baik terhadap peningkatan kualitas umat. Hasan Basri (1993) menyatakan, "Fungsi masjid tidak hanya sebatas sebagai sarana kaum muslimin beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah s.w.t, tetapi juga sebagai sarana membina keutuhan ikatan jamaah dan muslimin, sarana musyawarah, pembinaan dan pengembangan kaderisasi pimpinan umat dan lain sebagainya."

Usaha yang banyak dilakukan oleh M. Natsir melalui DDII selain memelopori pembinaan masjid-masjid, juga berusaha meningkatkan pemanfaatannya sehingga benar-benar

berfungsi sebagai sarana peningkatan kualitas umat Islam. Anwar Haryono (1995: 204) menyatakan bahwa, Dewan Dakwah telah membuktikan amal nyata atau *dakwah bi al-hal* berupa pendirian tempat-tempat ibadah (masjid atau mushalla) baik di tempat-tempat umum, kampus, pemukiman transmigrasi, kompleks rumah sakit, daerah suku terasing, kompleks penjara ataupun di tempat-tempat lain.

Berkaitan dengan hal ini, M. Natsir banyak mengusahakan bantuan dari kaum muhsinin terutama dari Timur Tengah untuk menyumbang pendirian masjid-masjid baru. Demikian juga sumbangan-sumbangan dari pemerintah Saudi Arabia, terutama pada masa beliau menjabat sebagai Ketua Maktab (cabang) Rabithah Alam Islami untuk Indonesia, yang cukup dirasakan manfaatnya oleh kaum muslimin di Indonesia (Yunan Nasution 1989: 16).

Mengenai pemanfaatan fungsi dan peranan masjid oleh Dewan Dakwah, Ramelan Marjoned (1991: 72) menegaskan:

Di antara tugas dakwah yang dikerjakan DDII, ialah mengembalikan fungsi dan peranan masjid, agar dapat dimakmurkan. Untuk itu K.H. Taufiqurrahman. IMD telah didirikan semenjak Maret 1951, kemudian tahun 1974 ditingkatkan menjadi Ikatan Masjid Indonesia (IKMI). Tugasnya mengadakan silaturahmi antara Ahli Jawatan Kuasa masjid dan khatib, muballigh serta muballighah pada setiap hari-hari besar Islam. Dalam pertemuan itu di susun jadwal khutbah Jum'at dan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, serta peringatan hari besar lainnya. Menggerakkan jama'ah untuk menghimpun bantuan jika terjadi musibah.

3. Pengiriman Da'i

Salah satu kegiatan utama DDII sebagai sebuah lembaga dakwah adalah mencetak, membina dan mengirimkan tenaga da'i ke daerah-daerah dan pelosok tanah air. Kepedulian M. Natsir terhadap keadaan umat Islam di daerah yang lemah dari segi aqidah dan kekhawatiran terhadap usaha pemurtadan oleh para zending Kristen, telah menyebabkan beliau memberikan penumpuan terhadap permasalahan ini.

Para da'i umumnya direkrut dari masyarakat desa sendiri. Mereka dididik dan dilatih, dibekali dengan berbagai macam ilmu dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas di daerah. Melalui pengiriman da'i ini diharapkan umat Islam yang berada di daerah-daerah tersebut dapat terbina keimanan dan ke-Islamannya (Thohir Luth 1999: 61).

Salah satu bentuk dari kegiatan ini adalah apa yang dikenal dengan istilah 'da'i kontrak'. Para santri yang lulusan dari pesantren diajak berdakwah di daerah transmigrasi, daerah pedalaman atau daerah yang jauh dari kota-kota besar. DDII melakukan ikatan kontrak atau perjanjian selama 2 tahun dengan para santri yang bersedia menjadi da'i. DDII mempersiapkan tenaga da'i, masyarakat setempat diajak pula menerima dan menampung para da'i itu, sehingga kerjasama memikul beban dakwah dapat terlaksana, karena risalah Rasulullah s.a.w. bersambung dengan dakwah Islamiyah, sehingga wajib dakwah itu adalah milik umat Islam secara keseluruhan (Ramlan Mardjoned 1991: 75-76).

Besar sekali peranan M. Natsir melalui DDII dalam usaha membentengi aqidah umat Islam dari kehancuran. Pengiriman tenaga da'i ke daerah-daerah benar-benar dirasakan manfaatnya sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap keadaan umat

Islam di daerah-daerah. Hal ini diakui oleh Tamidzi Tahir yang menyatakan, “Dewan Dakwah merupakan salah satu organisasi pelopor yang mengkader dan mengirim para da'i sampai ke tempat-tempat terpencil sekalipun, di berbagai macam pelosok Nusantara untuk memperkuat aqidah dan ibadah umat muslimin” (Dewan Dakwah Sumbar 2002).

4. Penerbitan

Salah satu program yang dirintis oleh M. Natsir melalui DDII adalah dakwah melalui tulisan. Dalam hal ini beliau membentuk satu bidang khusus didalam Dewan Dakwah yaitu bidang penerbitan. Walaupun secara tidak langsung diungkapkan bahwa tujuannya adalah sebagai usaha memberikan/mengisi kekosongan yang dirasakan oleh masyarakat Islam dibidang literatur, namun tidaklah dinafikan peranan besar yang diberikan, baik terhadap dakwah ataupun perkembangan wacana pemikiran Islam di Indonesia.

Dewan Dakwah dengan salah satu bagiannya, Ikatan Masjid Indonesia (IKMI) telah memiliki berbagai penerbitan baik majalah ataupun brosur antaranya : Bulletin Dakwah yang terbit setiap jumat, Media Dakwah, Sahabat (majalah anak-anak), Suara Masjid, Serial Khutbah Jum'at dan penerbitan buku-buku Media Dakwah. Setiap bulannya ada sekitar 1 juta eksemplar literatur yang diterbitkan oleh Dewan Dakwah tersebar di seluruh pelosok tanah air, bahkan juga di berbagai macam negara Asean, Eropa dan Amerika (Suara Masjid 1993: 6).

Pesan dakwah yang diterbitkan atau dipublisir oleh Dewan Dakwah selalu menjadi bahan berita yang ditunggu, dan dinantikan umat. Terbitan Dewan Dakwah menjadi pegangan para du'at yang akan bertugas (Dewan Dakwah

Sumar 1991: 6). Demikian pula majalah Serial Khutbah Jum'at yang disuplay kebanyak masjid diseluruh Nusantara pada setiap Jum'at. Tidak hanya berisikan bahan-bahan sebagai bacaan khotbah, tetapi menjadi bacaan segar bagi jama'ah menjelang khatib naik ke mimbar. Bulletin Dakwah yang umur penerbitannya sama dengan Dewan Dakwah, selalu berisi informasi dalam berbagai macam peristiwa. Menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan yang selalu dikaitkan dengan ajaran agama Islam yang dibahas secara jelas dan populer. Sehingga, dengan lembaran buletin itu saja, umat mendapatkan siraman ruhaniah secara berterusan, disamping memperoleh pegangan yang meyakinkan. Tulisan-tulisan para pakar dan ulama panutan umat ini menjadi sarat isi, semasa dikelola oleh Bapak KH.M.Yunan Nasution, Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Perwakilan DKI Jakarta Raya. Gagasan-gagasan Islam yang ada dalam bulletin ini, pada akhirnya dihimpun dalam 'Bunga Rampai Ajaran Islam', berjilid-jilid. Suatu karya yang besar. Berisikan pula informasi tentang dunia Islam dan Islam di daerah-daerah. Mimbar masjid tidak semata menjadi tempat dibacakannya khotbah Jum'at. Namun lebih dari itu, sebagai tempat paling utama menyampaikan problematika kehidupan umat dan pemecahannya, sehingga keberadaannya lebih bermanfaat untuk kepentingan umat Islam (Ibid: 7).

Setelah membahas tentang manhaj dakwah Hasan al-Banna dan Mohammad Natsir, pada bab ini penulis mencoba mengungkapkan persamaan dan perbedaan yang ada dan sebagai langkah perbandingan, tentu saja penulis juga akan membahas kaitan di antara keduanya. Secara garis besarnya banyak kesamaan antara metodologi dakwah Hasan al-Banna dengan Mohammad Natsir, terutama dari segi konsep dan

pemikiran yang walaupun terdapat perbedaan hanya karena disebabkan oleh perbedaan situasi dan kondisi yang mereka hadapi sehingga juga berpengaruh terhadap pelaksanaan dakwah dan juga menunjukkan adanya dinamika dalam berdakwah

Persamaan Manhaj Dakwah Hasan al-Banna Dan Mohammad Natsir

Untuk lebih mempermudah pembahasan ini, penulis membagi lagi kedalam beberapa subbagian yaitu: visi dan misi tentang dakwah dan Islam, dakwah fardiyah dan *amar ma'ruf nahi mungkar*, dakwah melalui pendidikan, politik sebagai wasilah dakwah dan keutamaan jamaah dalam berdakwah.

Visi dan Misi Tentang Dakwah dan Islam

Sebagaimana diungkapkan bahwa kedua mujahid dakwah ini mempunyai kesamaan visi dan misi dalam memandang dakwah dan Islam. Pada tataran konsep keduanya mempunyai visi yang jelas dan utuh tentang Islam sebagai agama yang *syamil*, membenarkan apa yang Allah (s.w.t) firmankan:

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً

Artinya : *Sesungguhnya telah Aku sempurnakan agamamu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu dan telah Kurelakan Islam menjadi agamamu (QS. Al-Ma'idah 5: 3).*

ان الدين عند الله الاسلام

Artinya: *Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam (QS Ali'Imran 3: 19).*

Kedua tokoh ini memahami dan yakin bahwa hanya agama Islam-lah yang lengkap, utuh dan sempurna sebagai penuntun hidup. Dalam sebuah khutbahnya Hasan al-Banna menyatakan:

Wahai Ikhwan! Saya umumkan dari atas mimbar ini dengan penuh ketegasan dan kekuatan kata, bahwa Islam itu bukan sebagaimana makna yang dikehendaki para musuh agar umat Islam terkurung dan terikat di dalamnya. Islam adalah aqidah dan ibadah, negara dan kewarganegaraan, tolak angsur dan kekuatan, moral dan material, tamadun dan perundang-undangan. Sesungguhnya seorang muslim dengan hukum Islamnya dituntut untuk memperlihatkan semua persoalan umat. Barangsiapa yang tidak memperhatikan permasalahan kaum muslimin, dia bukan termasuk golongan mereka” (Hasan al-Banna 1998: 75).

Keluasan pemikiran Hasan al-Banna mencakup luasnya ajaran Islam, mulai dari pembenahan diri peribadi melalui akhlaq dan ibadah, sampai dengan masalah khilafah dan pemerintahan. Bahkan dalam sebuah risalahnya (1997), sempat memikirkan dan membahas tentang beberapa negara berpenduduk mayoritas Islam seperti Palestina, Pakistan yang baru merdeka, Indonesia dan Libya. Dengan judul ‘Agenda persoalan kita dalam pandangan sistem Islam’, beliau turut memikirkan keadaan umat Islam di belahan bumi yang lain

sebagai satu kesatuan dengan umat Islam lainnya yang juga perlu diperjuangkan hak-haknya..

Hasan al-Banna memiliki misi keislaman yang jelas dalam hidupnya, sebagaimana terlihat dari ungkapannya yang menyatakan, “Pada pandangan saya tidak ada satupun aturan atau ajaran yang menjamin kebahagiaan jiwa manusia, menunjukkan pada jalan yang menghantarkan kepada kebahagiaan tersebut, selain ajaran Islam yang hanif, fitrah, jelas dan praktis. Karena itu, sejak kecil saya telah mengarahkan hati saya kepada satu tujuan yaitu: membimbing orang lain menuju Islam, hakikat dan pengamalannya” (Anwar Jundi 1978: 26).

Pandangannya yang jelas terhadap kaitan yang kuat antara Islam dan dakwah terlihat dari ungkapannya yang menyatakan, “Dengarlah wahai saudaraku! Dakwah kami adalah dakwah yang hanya dapat dilukiskan secara menyatu oleh kata ‘Islamiyah’. Kata (Islamiyah) ini mempunyai makna yang sangat luas. Kami meyakini bahwa Islam adalah sebuah system yang sempurna, melingkupi seluruh ruang kehidupan” (Hasan al-Banna 1997).

Tentang pedoman ataupun rujukan dalam berdakwah, ditegaskan “Pedoman kita adalah kitabullah yang tidak terdapat kebatilan sedikitpun di dalamnya, hadis sahih yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad (s.a.w) dan sirah yang suci dari kaum salaf umat ini. Kita tidak mengharapkan dari semua ini melainkan ridha Allah, melaksanakan kewajiban, menyampaikan hidayah dan menuntun manusia” (Ibid: 84).

Demikian juga M. Natsir dalam memandang *syumuliatul Islam*, beliau menyatakan :

Banyak sekali masalah kontemporer/kekinian yang dihadapi Islam sebagai kelanjutan dari proses yang telah berlangsung sebelumnya, terutama masalah-masalah yang berlanjut setelah konstituante. Perlu diketahui bahwa Islam adalah agama mayoritas penduduk di negara kita, tetapi banyak sekali umat Islam yang belum memahami Islam, atau yang memahami Islam dari sudut pandang lain yang dipengaruhi oleh konsepsi-konsepsi (pemahaman) Barat. Dalam konteks pemahaman yang sering dilukiskan sebagai kehidupan duniawi dan kehidupan spiritual misalnya, Islam tidak mengenal dikotomi (pemisahan) ini. Islam memandang kehidupan manusiawi di dunia ini secara komprehensif, tidak ada pemisahan kehidupan, termasuk dalam hubungan antara orang sebagai pribadi, sebagai warga masyarakat dan sebagai warga negara” (A.W. Pratiknya 1989: 59-60).

Banyak ulama, pemikir dan cendekiawan Muslim yang mengakui kebenaran dan apa yang diperjuangkan oleh kedua tokoh dakwah ini, bahwa ketinggian nilai-nilai Islam adalah di atas ajaran ataupun ideologi yang lainnya. Namun demikian juga masih banyak dari kalangan umat Islam yang tidak memahami hakikat ini. Mereka memahami Islam dalam bentuk potongan-potongan kecil yang terpisah yang di sebabkan oleh ketidak fahaman dan juga rasa enggan atau tidak mau mengambil Islam secara utuh dan menyeluruh. Lebih parah lagi apabila penyakit ini menimpa para pelaku dakwah. Ada yang berdakwah dan memperjuangkan Islam hanya melalui aliran sufistik seperti aliran tareqat dan sangat anti terhadap politik. Ada yang berdakwah hanya untuk tertegaknya daulah, tanpa

memperhatikan aspek pembinaan terhadap umat, dan banyak lagi yang pada akhirnya menyebabkan timbulnya perpecahan di kalangan umat Islam. Di sinilah peranan Hasan al-Banna dan Mohammad Natsir dalam meletakkan arti dan nilai Islam yang sebenarnya, memberikan pemahaman Islam yang lengkap dan sempurna sebagai sebuah sistem hidup bagi umat manusia.

Dakwah Fardiyah Dan Amar Ma'uf Nahi Mungkar

Dakwah fardiyah dan konsep *amar ma'ruf nahi mungkar* merupakan dua bagian penting dalam kegiatan dakwah. Sebagaimana Rasulullah yang selalu melaksanakannya, demikian juga dengan Hasan al-Banna dan Mohammad Natsir. Pemahaman mereka tentang tugas dan hakikat hidup yang harus selalu berjuang menegakkan yang haq, telah menjadikan mereka diantara para mujahid dakwah yang rela menyerahkan diri, jiwa dan hartanya di jalan Allah (s.w.t).

Seorang penulis yaitu Thohir Luth mengkritik dalam sebuah analisa disertasi doktoralnya tentang cara berdakwah M. Natsir yang dikatakan kurang bersahabat dengan objek dakwah. Thohir Luth menyatakan, "Penulis melihat bahwa sebagian besar para pendakwah, termasuk M. Natsir sendiri, terutama dalam ucapan lisan ataupun tulisannya, tampaknya kurang bersahabat dengan para objek dakwah. Hal ini bisa dilihat ketika M. Natsir menyampaikan kritik dan koreksi secara terbuka melalui media massa terhadap para penguasa negara. Bahkan, pesan dakwah M. Natsir kepada elit birokrasi terkesan menendang lawan, bukan menjemput kawan. Padahal, dakwah Islam semestinya menyambut, bukan menendang, apalagi merendahkan harga diri seseorang di depan publik" (Thohir Luth 1999: 81). Pengkritik juga mengungkapkan konsep dakwah

dalam pemikiran M. Natsir yang merupakan ajakan yang berisi *amar ma'ruf nahi mungkar*, ajakan tersebut tidak cukup dengan lisan saja, melainkan juga dengan bahasa, perbuatan dan keperibadian mulia secara nyata, yang kemudian dinilai oleh pengkritik bahwa gagasan tersebut hanya sebagai elaborasi dakwah Islam secara terminologi. Padahal menurut pengkritik dakwah Islam itu tidak terbatas diartikan sebagai menyampaikan ajaran Islam, tetapi lebih diartikan sebagai 'mengundang' objek dakwah untuk menerima informasi keislaman (Ibid: 80).

Penulis menilai bahwa kelemahan yang ada pada kritik tersebut adalah tidak adanya data-data yang jelas ataupun alasan yang kuat mengapa sampai ada kesimpulan bahwa M. Natsir kurang bersahabat dengan objek dakwah terutama penguasa. Menurut penulis anggapan ini juga didasarkan kepada adanya kesan di masyarakat bahwa M. Natsir tidak mau membantu pemerintah orde baru (Media Dakwah 1993: 10). Dalam hal ini penulis kurang sependapat terhadap kesimpulan bahwa dalam berdakwah, M. Natsir kurang bersahabat dengan objek dakwah dan pesan dakwahnya terkesan menendang lawan dari menjemput kawan, dengan beberapa alasan :

Pertama, sebagai seorang pendakwah yang tahu konsep dakwah *bil-hikmah*, M. Natsir paham tentang bagaimana melaksanakan metode dakwah seperti ini. Kalaupun dalam pemerintahan Orde Baru, M. Natsir terkesan kurang bersahabat, bukan disebabkan M. Natsir yang tidak mau bersahabat atau tidak mau berdakwah dengan lemah lembut dan penuh hikmah terhadap mereka, tetapi Jenderal Soeharto dan kawan-kawannya dari golongan sekuler yang sejak awal tidak pernah mau menerima uluran tangan M. Natsir. Contoh nyata adalah

ketika pada masa awal pemerintahan Orde Baru, M. Natsir dan kawan-kawannya ingin berperan aktif dalam pembangunan dengan berniat menghidupkan kembali Masyumi yang pernah dibubarkan oleh Soekarno. Tetapi kalangan pemerintah, melalui ABRI, agaknya keberatan atas tampilnya para mantan tokoh Masyumi ini (Ridwan Saidi 1993:157). Pernah secara pribadi M. Natsir meminta syarat bertemu Presiden Soeharto, ketika salah seorang utusan Ali Mortopo (Salah seorang Menteri Kabinet Orde Baru) meminta M. Natsir agar mengusahakan hutang luar negeri dari negara-negara Arab. Soeharto tidak mau menemui, tetapi M. Natsir tetap mengusahakannya sampai berhasil. (Media Dakwah 1993: 11). Apakah semua perlakuan tidak adil dari pemerintah ini membuat M. Natsir tidak mau bersahabat, tidak mau membantu pemerintah Orde Baru atau tidak lagi mau berdakwah terhadap mereka. Jawabannya tidak. Jiwa besar M. Natsir sebagai muslim sejati dan negarawan yang baik tetap selalu berbuat yang terbaik untuk umat, bangsa dan negara. Majalah Media Dakwah (Maret 1993) dengan judul 'Pak Natsir dan Orde Baru', mengungkapkan bahwa dengan terpaksa M. Natsir menceritakan beberapa jasa beliau dalam membantu pemerintahan Soeharto, karena beberapa kali ditanyakan oleh wartawan TEMPO tentang adanya anggapan bahwa M. Natsir tidak mau membantu pemerintah Orde Baru. Diantara jasa itu ialah membantu memulihkan hubungan Indonesia-Malaysia setelah terjadi konfrontasi pada masa Orde Lama. M. Natsir hanya menulis pesan pada secarik kertas untuk sahabatnya yaitu Tunku Abdul Rahman yang pada masa itu menjadi Perdana Menteri Malaysia, sehingga akhirnya Tunku Abdul Rahman bersedia menerima utusan dari Indonesia. M. Natsir juga yang berusaha meyakinkan tokoh-tokoh *Kaidanren*

(Organisasi Industri dan Pengusaha Jepang) agar membantu pemerintah Indonesia memberikan kredit atau bantuan hutang luar negeri, setelah sebelumnya Soeharto yang datang sendiri ke Jepang pulang dengan tangan hampa. Belum lagi jasa memperbaiki hubungan dan citra negara Indonesia di mata para pemimpin dunia Islam pada umumnya dan negara-negara Arab khusus-nya yang begitu buruk sejak pemerintahan Soekarno.

Kalau karena hubungan yang tidak harmonis dengan pemerintah, contohnya seperti keluarnya larangan untuk keluar negeri akibat peristiwa 'petisi 50', bahkan salah satu akibat dari pelarangan ini M. Natsir gagal menerima gelar Doctor Honoris causa dari dua Universitas terkenal di Malaysia yaitu UKM dan USM pada tahun 1991 (Suara Masjid 1991: 42-43), kemudian M. Natsir dianggap kurang bersahabat dengan objek dakwah dan terkesan menendang lawan, tentu salah. Karena justeru inilah contoh amar ma'ruf nahi mungkar yang dilaksanakan M. Natsir terhadap pihak penguasa, yang dianggap sudah berlebihan setelah tidak bisa lagi diperbaiki dengan cara lemah lembut atau teguran yang bijaksana. Setelah sekian lama beliau berusaha mendekati pemerintahan Orde Baru, memberikan banyak bantuan yang tidak pernah diumumkan kepada masyarakat, juga memberi nasehat dan teguran melalui buku-buku atau tulisan. Tetapi semua keinginan dan niat baik ini bukan disambut dengan ikhlas dan ucapan terima kasih, melainkan sebaliknya, selalu ditanggapi dengan penuh rasa curiga dan buruk sangka. Keadaan inilah yang sangat dikesalkan oleh M. Natsir sehingga keluar keluhannya yang menyatakan, "Tapi apa mau dikata. Pihak penguasa tidak sampai merasakan hal yang 'subtiel' (halus) ini.

Sekalipun sudah diterangkan dengan berbagai-bagai cara. Cara tertutup dan cara terbuka” (M. Natsir 1984: 25). Tidak salah juga dalam sebuah wawancara M. Natsir menyoroti sikap pemerintah ini sebagai sikap yang tidak dewasa. Beliau berkata, “Hal yang demikian ini rasanya susah kita jumpai pada zaman sekarang ini. Apalagi di dunia politik, perbedaan sedikit saja seperti sudah merupakan permusuhan besar, atau apa itu dalam bahasa Jawa ‘musuh bebuyutan’. Tidak mau komunikasi, tidak mau ketemu, apalagi berdialog. Masih perlu pendewasaan dalam cara kita berpolitik” (A.W. Pratiknya 1989: 50).

Inilah dakwah fardiyah dan *amar ma'ruf nahi mungkar* yang dilaksanakan M. Natsir terhadap penguasa, setelah sebelumnya telah diusahakan dengan berbagai nasehat dan teguran yang baik. Bahkan pernah secara khusus M. Natsir menulis sebuah buku dengan judul ‘Indonesia di Persimpangan Jalan’ (1984), yang isinya berupa nasehat, teguran dan peringatan kepada pemerintah juga himbauan kepada wakil rakyat di DPR, para ulama dan golongan cendekiawan agar juga mempunyai rasa prihatin terhadap kondisi atau keadaan sosial politik di Indonesia, yang dikhawatirkan akan berakibat buruk terhadap perjalanan hidup bangsa Indonesia.

Ternyata dakwah fardiyah dan konsep *amar ma'ruf nahi mungkar* yang dilakukan M. Natsir bukan sebatas setelah beliau tua dan aktif di bidang dakwah melalui DDII, tetapi sejak muda beliau telah terbiasa berani menyampaikan dan memperjuangkan kebenaran. Fakta sejarah mengungkapkan, beliau yang masih sekolah pada AMS Bandung pernah membantah pidato seorang pendeta Protestan bernama Ds. Christoffel melalui surat kabar *Algemeen Indisch Dagblad* (AID). Setelah itu pada usia 26 sampai 30 tahun beliau telah

berpolemik dengan Soekarno tentang masalah keagamaan dan kenegaraan. (Suara Masjid 1993: 12). Keberanian M. Natsir dalam melakukan *amar ma'ruf nahi mungkar* terus dilakukan sampai meninggal, itu semua dilakukan baik sebagai peribadi ataupun melalui DDII sebagai kendaraan gerakan dakwahnya.

Menurut analisa penulis inilah kesamaan M. Natsir dengan Hasan al-Banna tentang konsep *amar ma'ruf nahi mungkar*, yang dengannya menjadi salah satu penyebab mereka menjadi diantara kelompok orang-orang yang dimuliakan sebagaimana yang Allah (s.w.t) firmankan:

كنتم خير أمة أخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنكر و تؤمنون بالله

Artinya: *Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar...(QS Ali 'Imran 3: 110).*

Sebagaimana M. Natsir, dalam kehidupan Hasan al-Banna sebagai seorang dai, konsep *amar ma'ruf nahi mungkar* telah beliau lakukan sejak masih muda, baik secara individu sebagai bentuk dari dakwah fardiyah, ataupun melalui jamaah yang ada. Bagi Hasan al-Banna, menegakkan yang hak dan memberantas kemungkaran adalah suatu kewajiban kepada setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Contoh mengenai hal ini beliau menceritakan dalam memoarnya (1999) menyatakan:

Suatu hari saya berjalan-jalan melewati tepian sungai Nil. Di sana terdapat ramai pekerja yang sedang membuat kapal layar. Pekerjaan membuat kapal layar ini memang banyak terdapat di Mahmudia. Saya perhatikan salah seorang pemilik kapal yang sedang dibuat itu

menggantungkan boneka orang telanjang yang terbuat dari kayu pada tiang kapalnya. Hal ini jelas bertentangan dengan etika dan moral. Apalagi di tempat ini banyak kaum wanita pulang pergi mengambil air. Apa yang saya lihat ini cukup menggelisahkan. Akhirnya saya pergi membuat laporan kepada penguasa setempat untuk mengadakan hal itu. Petugas itu menanggapi dengan serius dan pada waktu itu juga dia pergi bersama saya untuk memberi peringatan kepada pemilik kapal tersebut dan memerintahkan agar menurunkan boneka pada waktu itu juga.

Contoh *amar ma'ruf nahi mungkar* yang mengatasnamakan diri sebagai pemimpin umum Ikhwanul Muslimin adalah sepucuk surat tulisan tangan Hasan al-Banna kepada Raja Faruq pada tanggal 8 *Muharram* 1358H. Didalamnya menerangkan tentang kerusakan yang melanda negara Mesir dan mendesak raja untuk mengadakan perbaikan, serta menerangkan konsep Islam dalam mengatasinya (Badr Abdur Razzaq 1995: 121). Juga sikap dan pendiriannya ketika menentang pemikiran sekuler Thaha Husein yang menulis buku '*Mustaqbalu al-Tsaqafah fi al-Misir*' (Masa depan peradaban di Mesir) yang mengajak mengambil kebudayaan Barat dengan terang-terangan baik dan buruknya, manis dan pahitnya. Hasan al-Banna yang pada waktu itu diundang untuk mengoreksi buku tersebut pada sebuah majlis yang dihadiri masyarakat, tokoh-tokoh ilmu, adab dan pendidikan Mesir, tidak mengoreksi akan tetapi membenturkan antara pemikiran yang satu yang bertentangan dengan pemikiran lainnya dalam buku

tersebut. Sehingga akhirnya Thaha Husein meminta bertemu dan mengakui kebenaran Hasan al-Banna (Ibid: 123-125).

Konsep *amar ma'ruf nahi mungkar* yang dilakukan Hasan al-Banna merangkumi semua sarana dan aspek kehidupan. Seakan-akan beliau mengatakan tidak ada tempat bagi kemungkaran yang apabila beliau terlihat kecuali pasti memerangi dan memperbaikinya. Beliau melakukan ceramah dan menyebarkan tulisan ataupun brosur. Beliau mentarbiyah pengikutnya untuk tidak pernah memaafkan kemungkaran, membiasakan diri mengubahnya dan menanamkan kesadaran tentang kewajiban melakukan *ishlah* terhadap keadaan umat Islam.

Dakwah Melalui Pendidikan

Tidak dinafikan bahwa pendidikan merupakan salah satu sarana yang kuat dalam membentuk, mempengaruhi dan merubah peribadi ataupun pemikiran seseorang. Karenanya sebagai mujahid dakwah yang faham akan nilai-nilai seperti ini, Hasan al-Banna dan M. Natsir sangat memperhatikan peran penting pendidikan baik formal, informal ataupun nonformal.

Hanya Allah yang tahu tentang adanya rahsia kesamaan bahwa kedua tokoh ini memulai karier hidupnya dari menjadi seorang guru dan pendidik pada sekolah dasar. Bisa jadi hal itu hanya sebuah kebetulan dari sebuah kesamaan, namun penulis menilai bahwa sejak awal kedua mujahid dakwah ini menyadari dan memandang penting terhadap keutamaan pendidikan bagi pembinaan sebuah generasi.

Hasan al-Banna berpendapat bahwa penyebab kehancuran dan kemunduran umat Islam adalah disebabkan kejahilan mereka terhadap ajaran Islam. Oleh karena itu beliau

memusatkan perhatian dan pemikiran untuk meningkatkan kualitas umat baik dalam hal pemikiran, wawasan dan ruhiyah. Pendidikan Islam atau tarbiyah Islamiyah merupakan salah satu cara untuk membangun kembali kejayaan umat ini. Beliau menyatakan:

Sistem ini diawali dengan pendidikan keislaman yang berpijak pada perbaikan tilawah al-Qur'an. Hendaknya seorang akh yang mengarah kepada madrasah dan dakwah ini bisa membaca al-Qur'an sesuai dengan hukum tajwid, lalu menjelaskan dan menafsirkannya sesuai dengan tingkat keperluan. Hal ini kemudian diikuti dengan menghafal beberapa hadis dan penjelasannya. Setelah itu dilakukan perbaikan dari sisi aqidah dan ibadah, penyingkapan hikmah dan rahsia perundang-undangan dan adab-adab hukum Islam, pengkajian terhadap sejarah Islam dan biografi *salafus salih* serta *sirah nabawiyah* secara seimbang untuk menguatkan wawasan dan spiritual (Hasan al-Banna 1999: 67).

Aspek ketuhanan atau keimanan merupakan bagian terpenting dalam pendidikan Islam. Demikian menurut pemahaman dan praktek Ikhwanul Muslimin. Pentingnya aspek keimanan ini sangat besar artinya dan sangat mendasar pengaruhnya, terutama mengingat tujuan pertama pendidikan Islam adalah terciptanya manusia-manusia mukmin (Yusuf al-Qaradhawi 1994: 9).

Sejalan dengan Hasan al-Banna, M. Natsir juga menekankan pentingnya pendidikan dalam pembinaan umat.

Konsep mendasar tentang pendidikan yang beliau nyatakan adalah, “Maju atau mundurnya suatu kaum, bergantung sebagian besar kepada pelajaran dan pendidikan yang berlaku dalam kalangan mereka itu. Tak ada satu bangsa yang terbelakang menjadi maju, melainkan sesudahnya mengadakan dan memperbaiki pendidikan anak-anak dan pemuda-pemuda mereka.” (M. Natsir 1961: 53). Bahkan lebih spesifik lagi beliau meletakkan tauhid sebagai dasar dari pendidikan. Beliau menyatakan, “Mengenal Tuhan, mentauhidkan Tuhan, mempercayai dan menyerahkan diri kepada Tuhan harus menjadi asas kepada tiap-tiap pendidikan yang hendak diberikan kepada generasi yang kita didik, jika kita sebagai guru ataupun ibu bapak, betul-betul cinta kepada anak-anak yang telah dipercayakan Allah kepada kita” (Ibid : 116).

Yang ingin ditekankan oleh Natsir dalam argumentasi-argumentasinya adalah bahwa Islam pada hakikatnya adalah agama ‘*tarbiyah*’, agama pendidikan, yang diajarkan oleh Tuhan kepada hamba-Nya, yang salah satu dari sifat-Nya adalah *Rabb* (Maha Pendidik, Maha Pengatur)- Yang Mendidik dan Mengatur sekalian alam (*Rabb al-alam*). Dengan kata *tarbiyah*, ini merangkumi semua yang duniawi dan ukhrawi, ruhani dan jasmani, intelektual dan etika-budi pekerti, formal dan non formal, ditujukan kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat seluruhnya, yang semuanya bersifat universal, integral dan harmonis. Karena *tarbiyah* adalah sebuah proses yang tidak pernah berhenti selagi hayat dikandung badan, maka kewajiban menuntut ilmu dan mendidik serta mendapatkan pendidikan itu adalah kewajiban sepanjang umur, dari buaian sampai ke liang lahat (Anwar Haryono 1995: 88).

Kepedulianya terhadap pendidikan Islam yang sangat

besar, terlihat dari ungkapannya yang menyatakan:

Ketika saya melihat sekolah-sekolah kita sama sekali kosong dari pengajaran agama, saya berniat membina pendidikan modern yang sejalan dengan pendidikan agama. Kemudian saya dirikan sekolah Pendidikan Islam (Pendis). Dengan gaya Muhammadiyah, tidak banyak berbeda, hanya kami lebih bersifat praktek. Misalnya, waktu itu kami mempelopori melakukan salat Jum'at di sekolah. Juga mengajarkan kesenian untuk menghaluskan perasaan. Islam kan tidak melarang kesenian, termasuk Tonil (kesenian rakyat) (M. Natsir t.th: 3).

Kepentingan Jamaah Dalam Berdakwah

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu ingin dan perlu berinteraksi dengan orang lain, selain juga merupakan fitrah dan naluri alamiah dari manusia untuk selalu hidup bersama antara satu dengan yang lainnya. Demikian juga dengan dakwah yang merupakan amanah Allah, perlu kepada adanya kebersamaan atau jamaah yang didalamnya akan saling menguatkan antara satu dengan lainnya.

Usaha-usaha dan kerja yang berkesan dan memberi faedah bagi gerakan dakwah adalah dengan cara berjamaah bukan dengan cara sendirian atau perseorangan. Atas dasar ini Allah (s.w.t) telah mengisyaratkan dalam al-Qur'an dengan firman-Nya:

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و أولئك هم
المفلحون

Artinya: *Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung* (QS Ali 'Imran 3: 104).

Dalam ayat tersebut adalah jelas menunjukkan tentang wajibnya melaksanakan dakwah secara berjamaah atau beramal *jama'i* (Mustafa Masyhur 1985: 10).

Mengenai manhaj dakwah Hasan al-Banna yang mengutamakan pentingnya jamaah dalam berdakwah, Mustafa Masyhur (2000) menyatakan :

Ini merupakan hidayah yang telah diperoleh Imam Asy-Shahid Hasan al-Banna setelah melakukan kajian terhadap realiti umat Islam dan *sirah* Rasulullah (s.a.w). Beliau telah menggariskan bagi kita jalan ber-*amal jama'i* yaitu jalan dakwah. Jalan yang pernah dilalui Rasulullah (s.a.w) dan para sahabatnya ketika menegakkan negara Islam pertama. Jalan inilah yang kami tempuh dan kami serukan kepada orang lain untuk mengikutinya. Alhamdulillah, semakin lama kami berjalan semakin bertambah pula kepercayaan kami kepadanya.

Sudah diakui bahwa tujuan besar yang dituntut memastikan keberadaan jamaah dan diwajibkan oleh Islam ke atas setiap muslim dan muslimah. Tidak bisa disempurnakan amal atau kerja-kerja berdasarkan persendirian tanpa jamaah yang menyelenggarakan usaha-usaha perseorangan dengan mengatur garis-garis kerja serta menyediakan kepadanya jalan, cara dan daya kemampuan.

Berdasarkan kaedah ini maka berjamaah adalah wajib. Tidak ada cara si muslim melaksanakan kewajibannya dengan sempurna dengan cara sendirian. Inilah sebabnya Imam al-Shahid Hasan al-Banna mendirikan jamaah Ikhwanul Muslimin untuk memastikan dan menentukan tujuan-tujuan Islam (Mustafa Masyhur 1987: 45).

Inilah menurut analisa penulis salah satu manhaj dakwah Hasan al-Banna yang menentukan bahwa salah satu wasilah keberhasilan dakwah adalah dakwah melalui jamaah. Pemikiran ini juga yang dimiliki oleh M. Natsir yang memandang penting terhadap peran besar jamaah atau organisasi sehingga beliau mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII). Dalam buku *Fiqhu al-Dakwah* yang merupakan karya monumentalnya, M. Natsir membahas secara khusus pentingnya *amal jama'i*, yaitu pada bagian yang berjudul *Manusia Ijtima'i dan Persoalannya*, beliau menyatakan, "Dalam pada itu seseorang tidak boleh hidup bernafsi-nafsi seorang diri. Perikehidupan manusia hanya dapat berkembang maju dalam hidup berjamaah" (M. Natsir 1991: 35). Lebih detil lagi M. Natsir menyatakan:

Pelaksanaan pekerjaan dakwah yang khusus itu sendiri bisa diserahkan kepada suatu kelompok para ahli, tetapi beban untuk menyelenggarakannya wajib dipikul oleh seluruh anggota masyarakat Islam baik laki-laki ataupun wanita, dengan harta, tenaga dan fikiran, menurut kemampuannya masing-masing. Ada atau tidaknya dakwah, menentukan tegak atau runtuhnya jamaah itu sendiri. Tidak bisa Islam berdiri tegak tanpa jamaah. Tidak bisa jamaah dibangun tanpa dakwah. Maka jadilah

dakwah suatu kewajiban penuh atas umat Islam sendiri. Risalah Muhammad (s.a.w) adalah agama jamaah, tidak akan berdiri risalah tanpa jamaah (Ibid: 118-119).

Menyadari hakikat inilah, kedua mujahid dakwah ini tidak pernah sendirian dalam melangkah. Sejarah mencatat Hasan al-Banna melalui jamaah Ikhwanul Muslimin-nya telah menyadarkan kembali umat Islam diseluruh dunia dari tidurnya yang panjang, untuk sadar mengembalikan kehormatan sebagai umat terbaik di muka bumi. Dan Mohammad Natsir dengan DDII-nya telah membuktikan darma bakti untuk berjuang menegakkan yang haq, khususnya di bumi Indonesia.

Perbedaan Manhaj Dakwah Hasan al-Banna dan Mohammad Natsir

Setelah membahas tentang persamaan manhaj dakwah antara Hasan al-Banna dengan Mohammad Natsir, sebagai langkah komparatif adalah perlu juga membahas tentang perbedaan-perbedaannya. Walaupun secara garis besarnya antara Hasan al-Banna dan Mohammad Natsir mempunyai banyak kesamaan baik dari segi konsep, ide dan pemikiran, namun tidaklah dinafikan dalam pelaksanaannya akan banyak dijumpai perbedaan-perbedaan yang sifatnya praktek atau karena pengaruh keadaan politik yang berbeda. Pada bagian ini penulis membagi kepada beberapa subsection yaitu: pemanfaatan sarana dan pelaksanaan program dakwah, pembinaan kader dan pemimpin dan konsep pendidikan formal.

Pemanfaatan Sarana Dan Pelaksanaan Program Dakwah

Perbedaan yang jelas terlihat antara Hasan al-Banna dan Mohammad Natsir adalah pemanfaatan sarana dan pelaksanaan program dakwah. Dalam khazanah pemikiran Hasan al-Banna yang global dan universal, semua sarana dakwah hendaknya dimanfaatkan semaksimal dan seoptimal mungkin, baik melalui ekonomi, sosial politik, tamadun atau kebudayaan, pendidikan, sukan dan lain-lain. Karena memang demikianlah Islam diturunkan sebagai sebuah petunjuk hidup yang sempurna. Salah satu contoh yang menunjukkan kuatnya pemahaman Imam Shahid tentang hal ini adalah pernyataannya:

Adapun sarana yang kita gunakan secara umum adalah memberikan kekuatan dan menyebarkan dakwah dengan pelbagai sarana, sehingga boleh dipahami oleh masyarakat umum dan disokong atas dasar aqidah dan iman. Kemudian menapis unsur-unsur yang baik untuk menjadi penyokong dakwah yang kukuh sebagai idea pembaharuan. Juga perjuangan secara konstitusional agar suara dakwah ini bergema di pemerintahan dan di sokong oleh kekuatan eksekutif. Dengan dasar ini calon-calon Ikhwan akan maju dan apabila datang waktu yang sesuai akan tampil mewakili umat di dewan rakyat. Percayalah dengan pertolongan Allah, selama tujuan kita adalah mencari ridha Allah” (Abdul Hamid al-Ghazali 2001: 158)

Berbeda dengan Hasan al-Banna, walaupun pada peringkat konsep dan pemahaman M. Natsir mempunyai

kesamaan tentang *syumuliatul Islam* sebagai diin yang lengkap dan utuh, namun dalam pemanfaatan sarana dan pelaksanaan kerja dakwah, lebih menekankan kepada adanya kerja sama dan pembagian tugas. Bagi M. Natsir, dakwah adalah tugas berat yang bebannya tidak mungkin dipikul sendirian oleh DDII sebagai sebuah gerakan dakwah, apalagi oleh beliau secara perseorangan. Misalnya untuk pendidikan dan sosial, DDII menyerahkan penanganannya kepada Muhammadiyah yang mempunyai sekolah dari peringkat tadika sampai perguruan tinggi, hospital, panti asuhan dan ramai lagi yayasan sosial (Sohirin Solihin 2001). Walaupun seperti DDII hanya mengkhususkan bergerak di bidang dakwah, namun bukan berarti tidak peduli terhadap masalah-masalah lainnya, bagi M. Natsir biarlah itu semua dikerjakan oleh orang atau organisasi yang sudah sedia ada, "Kemudian mereka kami bantu," katanya (M. Natsir 1998: 22). Dalam koridor pemikiran seperti inilah, M. Natsir sebagai pimpinan Dewan Dakwah pada awal tahun 1980-an telah mengeluarkan gagasan perlunya hubungan dan kerjasama yang harmoni antara sumber kekuatan umat Islam yaitu masjid, pesantren dan kampus. Sesuai dengan namanya dewan (majelis) maka Dewan Dakwah dapat mengundang Badan Kerjasama Pondok Pesantren (BKSP), Ikatan Masjid Indonesia (IKMI), tokoh-tokoh kampus, lembaga dakwah, eksponen bekas organisasi semacam Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Pelajar Islam Indonesia (PII) untuk membicarakan persepektif, tugas dan tanggung jawab Dewan Dakwah di masa hadapan (Suara Masjid 1993: 6).

Selain alasan diatas, menurut analisa penulis boleh jadi pembatasan gerakan dakwah melalui DDII yang dilakukan oleh

M. Natsir juga disebabkan oleh trauma masa lalu. Setelah lama beliau mandalami dunia politik, bahkan sampai menjadi Perdana Menteri, telah banyak memberinya pengalaman yang boleh diambil hikmah dan dijadikan pelajaran. Terutama peristiwa benturan-benturan dengan pemerintah, baik pada masa pemerintahan Soekarno yang menyebabkan beliau pernah dipenjara, ataupun dengan pemerintahan Orde Baru Soeharto yang juga telah membatasi gerakannya akibat peristiwa 'Petisi 50'. Semua itu menjadi pelajaran berharga bagi M. Natsir sehingga seolah-olah membatasi gerakannya di bidang dakwah, walaupun tidak pernah bermaksud mengecilkan arti dan peranan dakwah berbanding bidang lainnya. Apa dan bagaimanapun bentuk dan keadaannya, peranan perjuangan dakwah M. Natsir melalui DDII, sangatlah besar pengaruhnya terutama terhadap perkembangan dakwah di Indonesia.

Pembentukan Kader Dan Pemimpin

Salah satu yang menjadi penyebab mengapa M. Natsir lebih produktif dalam karya tulis atau buku-buku dari Hasan al-Banna, ternyata pemahaman dalam konsep membentuk kader inilah menurut analisa penulis yang menyebabkan akhirnya mereka berbeda. Ketika Hasan al-Banna ditanya mengapa beliau tidak menulis kitab atau ketika para sahabatnya meminta beliau menyusun tafsir dan pelbagai disiplin ilmu keislaman lainnya, maka beliau menjawab kepada mereka:

Hindarkan aku dari menyusun buku. Sebuah buku dapat memuat berbagai pandangan dan pemikiran. Tetapi semua itu tetap terjepit oleh dua sampulnya dan terbelenggu oleh lembaran-lembarannya. Sehingga ia ditemukan oleh pembaca yang dapat memahami dan

mengambil manfaat darinya. Tetapi sangat jarang buku-buku yang mendapatkan pembaca seperti ini. Kebanyakan orang tidak mempunyai waktu untuk membaca dan mengkaji buku. Adapun orang yang mengoleksi buku, kebanyakan hanya untuk memperindah interior rumahnya. Perpustakaan Islam telah penuh dengan buku dari berbagai-bagai disiplin ilmu. Tetapi buku tidak akan dapat berbuat apa-apa apabila optimisme umat telah hilang, harapan telah musnah, berkubang dalam kemalasan, bersenang-senang dan berfoya-foya sehingga mudah di perhamba oleh musuh-musuhnya dari pelbagai arah. Karena itu, waktu yang saya gunakan untuk menyusun buku, saya gunakan untuk menyusun seratus pemuda muslim. Setiap orang dari mereka akan menjadi sebuah buku yang berbicara dengan bahasa amal yang membuahkkan hasil. Dengan demikian saya dapat mentarbiyah sebuah negeri. Selanjutnya dari mereka akan tersusun banyak buku (Mahmud Abdul Halim 1981: 345).

Hasan al-Banna memandang bahwa penyadaran umum saja tidak cukup untuk memperbaiki umat dan mengubah nasibnya dan tidak ada jalan lain kecuali harus melalui usaha bersama, pembinaan dan pembangunan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Ia juga memandang perlunya mengikuti metode Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam hal ini, bahwa beliau selama masa hidupnya di Makkah berusaha keras membentuk generasi rabbani dan Qur'ani pertama melalui interaksi terus menerus, perhubungan intensif dan penjagaan positif (Yusuf Qaradhawi 1999: 163). Lebih khas lagi Abdul

Halim Hamid (1996) memberi komentar, "Ia menumpukan perhatiannya pada pembentukan *rijal* (kader) dakwah yang tangguh. Dipenuhinya perpustakaan dengan karya-karyanya yang menyuarakan kebangkitan dan dinamika umat."

Disini jelas terlihat bagaimana pemikiran dan pemahaman Hasan al-Banna tentang pembentukan sebuah generasi, bahwa beliau lebih mementingkan pembinaan sebuah generasi melalui tarbiyah, yang darinya nanti akan lahir jundi-jundi yang akan lebih banyak lagi melahirkan karya dan peninggalan, baik dalam bentuk tulisan ataupun karya yang hidup. Dunia akhirnya dapat melihat kebenaran ijtihadnya dalam pembentukan generasi dan perbaikan umat. Sejarah mencatat lahirnya suatu generasi seperti Sayyid Qutb, Mohammad al-Ghazali, Mustafa Masyhur, Ali Abdul Halim Mahmud, Yusuf al-Qaradhawi dan ramai lagi lainnya yang merupakan generasi yang dibina melalui sistem tarbiyah Ikhwanul Muslimin. Mereka telah mewarnai perkembangan dakwah dunia Islam baik dalam bentuk pemikiran, amal nyata, keteladanan dan juga karya berupa buku-buku.

Ternyata faktor inilah menurut Sohirin Solihin (2002), yang menyebabkan Ikhwanul Muslimin terlihat lebih solid dan kuat pada sisi rekrutmen dan pengkaderan, sehingga tidaklah mengherankan kalau sampai saat ini dakwah Ikhwanul Muslimin telah menyebar pada 70 negara Islam di dunia. Ungkapan ini sejalan dengan apa yang ditulis oleh Yusuf al-Qaradhawi (1999) yang menyatakan:

Al-Husaini mengemukakan penilaian secara objektif bahwa Al-Ikhwan merupakan gerakan Islam moden terbesar. Kebenaran statemennya ini terbukti bahwa

eksistensi gerakan ini semakin meluas dengan jumlah anggota dan pendukung gerakan ini bertambah di berbagai-bagai belahan dunia Islam dan Arab. Bahkan juga di luar negara-negara Islam seperti Eropa, Amerika, Asia Timur dan negara-negara lainnya (di lebih 70 negara di 5 benua).

Berbeda dengan Hasan al-Banna, ketika M. Natsir ditanya apakah sudah menyiapkan kader pengganti sebagai pemimpin umat setelah beliau meninggal nanti. Dalam pidato tasyakur 80 tahun Mohammad Natsir, dengan judul 'Zaman Beredar, Musim Berganti,' M. Natsir menyatakan, "Terkadang saya dihujani oleh pertanyaan-pertanyaan dari pelbagai pihak, terutama dari generasi muda, 'Siapakah yang telah dipersiapkan untuk alih generasi pemimpin, sesudah kami tidak ada lagi?' M. Natsir mengakui secara implicit bahwa beliau memang tidak secara langsung pernah menyiapkan kader atau pemimpin pengganti setelah beliau nanti, namun menyatakan optimis dan secara tidak langsung akan terjadi seleksi alam yang akan melahirkan pemimpin-pemimpin masa hadapan. Beliau menyatakan, "Tetapi tidak usahlah kita terlampau pesimistis. Sebenarnya, tiap seseorang yang merasa khawatir seperti yang tersebut tadi itu, sudah mulai mempunyai bibit untuk tumbuh sebagai pemimpin. Mereka yang bertanya: 'Mana pemimpin kita?', bukanlah kelompok yang berdiam diri sambil berpeluk tangan melihat orang lain, bukan! Di antara mereka ada yang sudah mempunyai kedudukan, atau masih menuntut ilmu pada Universitas, tapi mereka menyediakan waktu untuk turun ke lapangan. Lapangan itu adalah ruang kuliah yang membina calon pemimpin" (Lukman Fathullah Rais 1989: 68). Pada halaman yang lain beliau

menunjukkan rasa optimisnya dengan menyatakan, "Kita percaya, bila sudah datang masanya, mereka akan tampil. Tampil dengan ilmunya, dengan pemikiran dan kecepatannya. Iman dan akhlak karimahnya. Insya-Allah" (Ibid: 69).

Demikianlah pemikiran dan keyakinan M. Natsir tentang pembinaan kader dan pemimpin. Pemahaman beliau yang seperti ini terlihat lebih jelas ketika memberi tanggapan tentang pembinaan sebuah sekolah pengkaderan pemimpin bernama Taman Madya Taruna Nusantara, M. Natsir memberi komentar singkat, "Tidak ada percetakan yang boleh mencetak pemimpin" (Suara Masjid April 1993: 14). Lebih lanjut beliau menyatakan, "Dimana-mana tak ada kursus pemimpin, Universitas pemimpin, ijazah pemimpin. Pemimpin tidak boleh ditauliahkan. Pemimpin itu tumbuh di lapangan yaitu setelah berinteraksi dengan tantangan di masyarakat. Bila seorang memang berbakat menjadi pemimpin, dan mendapat cabaran ia akan menggunakan seluruh kemampuannya yang ada dan ilmu yang dikuasai untuk menghadapi cabaran itu" (Ibid: 14).

Dari fakta diatas, mesti diakui bahwa dalam pembentukan kader pemimpin, M. Natsir kurang menekankan aspek ini dibanding Hasan al-Banna yang jelas-jelas menjadikannya sebagai salah satu dari proses tarbiyah dan manhaj dakwah, walaupun tidak dapat dikatakan bahwa beliau sama sekali tidak berbuat atau memikirkan aspek ini. Analisa penulis, walaupun terdapat perbedaan dari kedua tokoh ini dalam konsep dan pemikiran tentang pembentukan kader dan calon pemimpin, namun masing-masing ada kekhasannya, dengan pengartian bahwa adanya kelebihan dan kekurangan ini adalah sesuatu yang fitrah dan alamiyah, dan semua ini pada

akhirnya juga berpengaruh kepada perkembangan pemikiran dan jamaah yang mereka bina.

Tentang Pelaksanaan Pendidikan

Walaupun kedua tokoh ini mempunyai persepsi dan konsep pemikiran yang sama tentang pentingnya pendidikan sebagai salah satu wasilah dakwah, namun dalam pelaksanaannya tetap ada perbedaan yang lebih banyak dipengaruhi oleh keadaan lapangan atau geografis yang berbeda.

Pada pemikiran Hasan al-Banna, pendidikan dalam Ikhwanul Muslimin merupakan bagian dari sistem jamaah itu sendiri. Karenanya dalam pelaksanaannya, Hasan al-Banna memanfaatkan semua kemampuan yang ada secara maksimal dan optimal, baik melalui pendidikan formal ataupun nonformal.

Kalau dalam pendidikan nonformal yang dilaksanakan Hasan al-Banna melalui Ikhwanul Muslimin-nya, jelas menjadikan tarbiyah sebagai ujung tombak dalam membina umat, demikian juga dengan *ta'lim* yang biasa diadakan setiap Selasa malam yang kemudian dikenal dengan '*Hadisu al-Thulatha*', juga pemanfaatan tarbiyah melalui penerbitan, maka pemanfaatan wasilah dakwah melalui pendidikan formal, Ikhwan membentuk sebuah divisi pendidikan di pejabat pusat, diketuai oleh Abdul Hamid Mathar. Diantara tugas divisi ini adalah mendirikan sekolah-sekolah (mulai tadika sehingga sekolah menengah) dengan tujuan mendidik generasi baru yang militan terhadap agama dan melaksanakan ajaran-ajaran Tuhannya serta membawa umat kepada kebangkitan yang diharapkan (Utsman Abdul Muiz Ruslan 2000: 199).

Contoh nyata dari pelaksanaan pendidikan formal, boleh dilihat dari pembangunan sekolah untuk anak laki-laki yaitu *Ma^had Hira' al-Islami* (Sekolah Islam al-Hira'), sekolah untuk anak-anak perempuan yaitu *Ma^had Ummahatul Mu'minin* (Sekolah Ibu Kaum Mu'minin), kelab sukan dan kelompok rihlah (Ibid: 186). Mengenai sekolah pertama (*Ma^had Hira' al-Islami*) yang didirikan oleh Ikhwan, Imam Shahid menulis dalam memoarnya:

Akhirnya Allah mentakdirkan pembangunan madrasah ini boleh selesai, disamping selesai juga pembangunan masjid Ikhwan. Saya ketika itu baru saja mempelajari idealisme pendidikan dan tenaga pendidiknya. Bentuk-bentuk pengajaran modern masih segar dalam ingatanku. Akan tetapi kami laksanakan sesuai dengan trend Islami serta harapan-harapan Islam (Hasan al-Banna 1999: 159).

Utsman Abdul Mu'iz Ruslan (2000) mengungkapkan tentang penekanan konsep pendidikan Ikhwan yang sejalan dengan pentingnya *tarbiyah ruhiyah* bagi pembinaan sebuah generasi. Beliau menulis: "Selain itu Ikhwan juga mendirikan sekolah-sekolah Jum'at, yaitu sekolah yang dilaksanakan dua jam sebelum sholat Jum'at yang fokusnya adalah pendidikan spiritual dan moral sebagai usaha menutupi kekurangan pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah."

Ini semua membuktikan terhadap bersepadunya pemikiran Hasan al-Banna dalam melaksanakan pendidikan, sebagai usaha pembinaan terhadap umat ini. Artinya, sebagai bagian dari sistem, maka pemanfaatan pendidikan sebagai salah

satu wasilah dakwah mestilah benar-benar dilaksanakan mengikut kuantiti dan kualitasnya.

Berbeda dengan Hasan al-Banna, dalam konsep dakwah M. Natsir yang sifatnya koordinatif, lebih terlihat pentingnya kerjasama atau adanya distribusi kerja dalam pelaksanaan kerja dakwah. Pemahaman inilah yang juga beliau laksanakan didalam menerajui kepemimpinan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII). Khususnya yang berhubungkait dengan pendidikan secara formal, dengan jelas M. Natsir menyerahkan kerja ini kepada Muhammadiyah, Persis ataupun pesantren-pesantren. Karena itu sampai akhir hayat beliau dan akhir kepemimpinannya sebagai ketua DDII, tidak ada satupun lembaga pendidikan formal yang dikelola, baik yang dilakukan secara peribadi oleh M. Natsir ataupun oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) sebagai sebuah gerakan dakwah. Pernyataan beliau yang sangat jelas dan menyokong tentang adanya kesimpulan seperti ini adalah:

Sebagai seorang ustadz berpendidikan Barat, dan terjun ke politik, akhirnya sekarang saya 'lari' kepada dakwah. Pendidikan sudah dilakukan oleh banyak orang. Dulu kan saya mendirikan sekolah, kalau saya buat sekolah, hanya satu sekolah yang boleh saya urus. Habis waktu dari pagi sampai malam untuk satu sekolah. Makanya, lebih baik sekolah itu diserahkan kepada orang yang buat sekolah seperti pesantren-pesantren, Muhammadiyah. Kemudian mereka kami bantu (M. Natsir 1998: 22).

Dari kenyataan ini dapatlah difahami bahwa walaupun antara keduanya mempunyai kesamaan dalam konsep yang ideal tentang nilai pendidikan, namun tidaklah sama dalam pelaksanaan atau prakteknya. Hasan al-Banna dengan kekuatan semangatnya tetap mempertahankan idealisme sebuah pemahaman sehingga tetap berpegang pada pentingnya pelaksanaan konsep yang sempurna. Sedangkan M. Natsir lebih melihat kepada adanya skala priroti atau keutamaan, yang juga memperhatikan kepada efektifitas waktu dan keterbatasan kemampuan yang ada.

Perbandingan Manhaj Dakwah Hasan al-Banna dengan Mohammad Natsir

Membahas tentang kaitan antara manhaj dakwah Hasan al-Banna dan Mohammad Natsir merupakan kelaziman dari sebuah penelitian komparatif, setelah diungkapkan antara persamaan dan perbedaannya. Penulis menilai bahwa kaitan antara manhaj dakwah kedua tokoh ini adalah keterkaitan aqidah, berangkat dari asal dan sumber yang sama yaitu Allah sebagai Tuhan yang memerintahkan untuk menyebarkan risalahnya melalui para nabi dan rasul-Nya. Juga keterkaitan misi dan tujuan yang hendak dicapai yaitu *li 'ila i kalamatillah*, menegakkan kalimah Allah, memperbaiki keadaan umat agar selalu menjadi umat yang terbaik, umat yang melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi larangan-Nya.

Secara garis besar, antara Hasan al-Banna dan Mohammad Natsir mempunyai banyak kesamaan baik dari segi konsep, idea dan pemikiran. Namun dalam pelaksanaannya, banyak dijumpai perbedaan-perbedaan yang sifatnya praktek atau karena pengaruh politik yang berbeda dan juga adanya

perbedaan kondisi sosial dan geografis. Penulis menilai ini bukanlah menunjukkan kelebihan pada satu sisi atau kelemahan pada sisi yang lain. Tetapi menunjukkan beragamnya ijtihad dari masing-masing individu dalam berdakwah dan juga dalam menghadapi persoalan umat.

Dalam persepsi Hasan al-Banna, yang memandang Islam sebagai agama yang lengkap dan sempurna, menjadikan semua sarana dan wasilah sebagai kekuatan untuk berdakwah, akan tetapi M. Natsir lebih melihat kepada skala prioritas atau keutamaan dalam melaksanakan program dakwah. Boleh jadi keterbatasan waktu, tenaga dan pertimbangan konstelasi politik yang menyebabkan M. Natsir berpandangan tentang perlunya koordinasi atau pembagian tugas dengan jamaah atau organisasi dakwah yang lain. Selain itu menurut Sohirin Solihin (2001), M. Natsir memandang bahwa kerja dakwah adalah kerja besar yang tidak mungkin dipikul oleh satu orang atau satu jamaah, sehingga memerlukan kerja sama dan koordinasi yang baik antara semua komponen masyarakat yang ada. Sikap *tasammuh* atau lapang dada M. Natsir menunjukkan kebesarannya sebagai seorang dai dan pemimpin, yang berpendirian bahwa walaupun secara dasarnya antara DDII dan Ikhwanul Muslimin mempunyai banyak kesamaan, namun diakui bahwa Dewan Dakwah perlu belajar dari idea dan pemikiran Ikhwan, kalau memang ada kelebihan yang tidak dimiliki oleh Dewan Dakwah. M. Natsir menyatakan, "Kita sama dengan Ikhwan, walaupun ada kekurangan maka kita perlu belajar dari mereka." Bukti yang menyokong pernyataannya ini, masih menurut Sohirin Solihin (2002) adalah bahwa M. Natsir termasuk diantara orang pertama di Indonesia yang menggalakkan perterjemahan karya tokoh-tokoh Ikhwan

kedalam Bahasa Indonesia, seperti tafsir '*Fi Zilali al-Qur'an*' karya Sayyid Qutb dll.

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan tentang adanya kaitan yang sangat rapat antara manhaj dakwah Hasan al-Banna dan Mohammad Natsir, baik dalam kesamaan visi dan misi, objektif ataupun metodologi dakwah, yang walaupun terdapat perbedaan, tidaklah bersifat mendasar, tetapi disebabkan oleh faktor-faktor yang sifatnya praktek, dan pada akhirnya menunjukkan kekayaan dinamika dalam berdakwah dan pemikiran.

BAB IV

KAJIAN EMPIRIS PEMIKIRAN POLITIK ISLAM HASAN AL-BANNA DAN MOHAMMAD NATSIR

Politik Islam Dalam Pandangan Hasan al-Banna

Awal abad kedupuluh merupakan kemuncak daripada penjajahan dunia Barat terhadap negara-negara Islam atau negara yang penduduknya majoriti Muslim. Penjajahan yang dilakukan dunia Barat ini, tidak hanya mengambil harta yang ada di negara jajahan, lebih daripada itu, para penjajah melakukan pengrusakan moral, tamadun, ekonomi dan juga agama. Runtuhnya khilafah Islamiyah di Turki akibat penjahan ini adalah sebagian yang menyebabkan kesedihan Hasan al-Banna terhadap keadaan umat Islam pada masa itu. Khilafah Usmaniyah bukan setakat dianggap sebagai kekhilafahan terakhir umat Islam, tetapi juga dianggap sebagai simbol pemersatu bagi seluruh umat Islam di dunia. Kerana itu Hasan al-Banna menyatakan bahwa:.... "Sesungguhnya kami adalah ahli politik dalam erti bahwa kami memberikan perhatian kepada persoalan-persoalan bangsa dan kami bekerja dalam usaha mewujudkan kebebasan sepenuhnya..." (Hasan al-Banna t.th. h. 29). Kesempurnaan Islam sebagai agama Islam yang tinggi tidak boleh ditutupi oleh fahaman yang sempit daripada ummatnya. Sebagai sebuah agama yang lengkap dan sempurna, merupakan pandangan yang salah kalau mengurangkan satu bahagian dan melebihkan bahagian yang lain. *Syumuliah* Islam dalam pemikiran Hasan al-Banna terungkap sebagaimana

dalam risalah Mukhtar Kelima pada pada tajuk 'Ke-Islaman Ikhwanul Muslimin' menyatakan sebagai,

حن نعتقد أن أحكام الإسلام و تعاليمه شاملة تنظم شؤون الناس في الدنيا و الآخرة , و أن الذين يظنون أن هذه التعاليم إنما تتناول الناحية العبادية أو الروحية دون غيرها من النواحي مخطئون في هذا الظن , فالإسلام عقيدة و عبادة , و وطن و جنسية , و دين و دولة , و روحانية و عمل , و مصحف و سيف Hasan al-Banna (1965), *op.cit.* ,h. 269

Maksudnya: "Kami meyakini bahwa hukum-hukum dan ajaran Islam itu menyeluruh, mengatur semua urusan manusia di dunia dan di akhirat. Sungguh salah orang yang menyangka bahwa ajaran Islam hanya menyentuh bahagian ibadah ritual atau kerohanian, tanpa memperhatikan bahagian-bahagian lainnya. Sebab Islam adalah aqidah dan ibadah, tanah air dan kewarganegaraan, agama dan negara, spiritualism dan amal nyata serta mushaf dan pedang."

Demikian juga pandangan Hasan al-Banna tentang politik sebagai bahagian yang tidak boleh terpisahkan daripada Islam. Beliau menyatakan dengan jelas, "Sesungguhnya seorang muslim belum sempurna keislamannya kecuali jika ia menjadi seorang ahli politik, mempunyai pandangan jauh ke depan dan memberikan perhatian penuh kepada persoalan bangsanya. Keislaman seseorang menuntutnya untuk memberikan perhatian kepada persoalan-persoalan bangsanya" (Hasan al-Banna (t.th.), *Ilā al-Tullab.* h. 8-10).

Hasan al-Banna menjelaskan dengan berbagai-bagai bukti yang kuat bahwa Islam datang dengan membawa ajaran politik untuk membahagiakan umat manusia secara

keseluruhan. Hasan al-Banna menjelaskan bahwa pemisahan agama daripada politik adalah virus yang dikirim daripada negara Barat, mereka telah menyebarkannya kepada para pemimpin dunia Islam (Abu Faris, 2003: 33).

Mengenai kaitan antara Islam dengan politik dan bagaimana sikap seorang muslim terhadapnya beliau berpendapat bahwa, "Politik adalah sesuatu hal memikirkan tentang persoalan-persoalan dalaman maupun luaran ummat" (Ruslan, 2000: 74) Makna daripada dalaman politik beliau menjelaskan, "Mengurus persoalan kenegaraan, menjelaskan fungsinya, membentangkan kewajipan dan hak-haknya, melakukan pengawasan terhadap para penguasa yang kemudian ditaati apabila melaksanakan kebaikan dan dikritik atau diperbetulkan jika melakukan kesalahan."

Maksud eksternal politik adalah, "Memelihara kemerdekaan dan kebebasan bangsa, mengantarkannya memperoleh tujuan yang akan menempatkan kedudukannya di tengah-tengah bangsa lain serta membebaskannya daripada penindasan dan campur tangan lain-lain pihak dalam urusannya" (Al-Banna, t.th, *Ilā al-Tullab*: h. 10).

Daripada konsep pemikiran diatas, jelas menunjukkan arah pemikiran Hasan al-Banna yang utuh dan universal tentang Islam dan politik. Hal ini selari dengan apa yang pernah disampaikan oleh penerusnya, "Dalam kitab-kitab feqah, masalah hukum dan pemerintahan termasuk dalam bidang kajian yang utama, bukan masalah cawangan. Islam adalah hukum sekali dengan pelaksanaannya, sebagaimana ia adalah syariat dan pengajaran, serta undang-undang dan peradilan, yang satu tidak boleh dipisahkan daripada yang lain" (Mahmud, 1999: 118).

Daripada semua kenyataan ini, menunjukkan bahwa Hasan al-Banna adalah orang yang berusaha meletakkan fungsi politik yang bersih dan benar sesuai dengan ajaran Islam. Bahwa politik bukanlah sesuatu yang kotor dan menghinakan sebagaimana ajaran yang diwariskan daripada Machiavelli, sehingga Robert Jackson menilai positif Hasan al-Banna dengan menyatakan, "Dia berkeras memadukan akhlak dan politik, meski sentiasa diserang oleh orang-orang bahwa politik dan akhlak tidak mungkin dipersatukan" (Jackson, 1977: 130).

Yūsuf al- Qaradhāwī menyatakan bahwa, al-Banna telah mengalami keletihan dan penderitaan dalam usahanya memfahamkan masyarakat bahwa Islam memberi perhatian pada politik, masyarakat, ummat dan negara sebagaimana perhatian pada ibadah, bahwa seorang muslim tidak dibenarkan hanya menyibukkan diri dengan shalat dan puasa serta ibadah-ibadah *mahdhah* lainnya sahaja tetapi mengabaikan permasalahan ummatnya di Timur dan Barat, sebab orang-orang mukmin adalah bersaudara dan umat Islam adalah satu ummat (Al-Qaradhawi, 1999: 142). Kenyataan inilah yang terjadi pada semua umat Islam di seluruh dunia setelah hilangnya masa kejayaan tamadun Islam. Usaha terbesar Hasan al-Banna untuk menjelaskan keadaan inilah yang menjadi halatuju perjuangannya melalui Ikhwanul Muslimin.

Ketika membahas mengenai konsep politik Islam, ramai yang mempertanyakan mengenai konsep sebenar daripada politik Islam. Sebagian mempertanyakan bahkan menafikan keberadaan konsep Islam mengenai politik. Sebagian ahli yang lain berpendapat bahwa di dalam Islam hanya ada pandangan secara umum mengenai politik tetapi tidak mempunyai secara khusus teori dalam politik sebagaimana konsep yang ada pada

para pemikir Greek. Mesti diakui bahwa lahirnya konsep politik Islam secara teori ada jauh setelah Rasulullah SAW meninggal. Tetapi itu tidak berarti bahwa Islam tidak mempunyai konsep politik yang jelas, sebab secara praktikal Rasulullah dan para Khulafaur Rasyidin sudah mengamalkan dan mencontohkan dalam sistem pemerintahan yang ada pada masa itu.

Hasan al-Banna berusaha membuktikan bahwa *syumuliyah* dalam Islam bukan terhad dalam masalah ibadah dan feqah, tetapi juga dalam *mu'amalah* bahkan politik dan pemerintahan. Dalam risalah '*Nahwa al-Nūr*' (Menuju Cahaya) yang berupa surat kepada para pemimpin dan raja di negara-negara Arab, Hasan al-Banna menyampaikan pemikirannya yang berupa konsep politik Islam secara praktikal yang menulis sebagai:

1. Menghancurkan fanatisme kelompok dan mengarahkan potensi umat secara politik dalam usaha menciptakan kesamaan orientasi dan kesatuan barisan.
2. Perbaiki undang-undang sehingga sesuai tuntutan syari'at Islam dan setiap bagiannya.
3. Meningkatkan kekuatan tentera, memperbanyak kelompok pemuda dan membangkitkan semangat mereka berasaskan prinsip-prinsip jihad Islam.
4. Memperkuat ikatan antara negara-negara Islam khususnya negara-negara Arab sebagai permulaan untuk memikirkan secara serius dan sungguh-sungguh menuju tegaknya kembali khilafah yang telah hilang.
5. Membangkitkan semangat ke-Islaman dalam setiap pejabat kerajaan, sehingga semua kakitangan merasa memerlukan Islam.

6. Melakukan pengawasan terhadap perilaku peribadi dan tidak memisahkan antara kepentingan sendiri dan pekerjaan.
7. Memajukan jam kerja pada setiap jabatan agar dapat membantu para kakitangan untuk melaksanakan kewajiban dan meninggalkan kerja overtime pada malam hari.
8. Membanteras korupsi dan nepotism serta hanya berharap daripada kemampuan kerja dan peraturan yang sebenarnya.
9. Menimbang setiap aktiviti kerajaan dengan timbangan hukum dan ajaran Islam sehingga peraturan-peraturang yang dibuat dalam setiap pertemuan, undangan, mesyuarat, acara-acara rasmi di penjara mahupun hospital dan lain-lain, tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Pembagian kerja hendaknya diatur agar tidak bertembung dengan waktu-waktu shalat.
10. Memasukkan orang-orang daripada Al-Azhar dalam pekerjaan militer dan administrasi (Al-Banna, 1965: 192-193).

Dari konsep yang ditulis dan dikirimkan Hasan al-Banna kepada para pemimpin Mesir dan negara-negara Arab ini, jelas terlihat bahwa pemahaman konsep politik Islam bukan terhadap kepada konsep secara umum tetapi juga menyentuh kepada praktikal secara langsung yang mesti dilaksanakan oleh pemerintahan Islam pada waktu itu. Bahkan sampai kepada bagaimana politik Islam bekerja untuk perbaikan umat yang mesti dilakukan oleh kerajaan secara praktikal, Hasan al-Banna menyatakan langkahnya adalah:

1. Menyatakan dirinya sebagai kerajaan Islam yang mencerminkan pemikiran Islam dalam wacana antarabangsa dan forum-forum rasmi.
2. Menghormati kewajiban-kewajiban agama Islam dan syiar-syiarinya. Mengharuskan kepada setiap kakitangan dan pejabat kerajaan untuk menjalankan kewajiban tersebut dan mengharuskan kepada para pejabat tinggi kerajaan agar menjadi tauladan yang baik kepada yang lain.
3. Mengharamkan larangan yang diharamkan oleh agama Islam seperti khamr dan sejenisnya, perjudian dan usaha yang haram. Kerajaan dalam hal ini mesti menjadi tauladan. Kerajaan jangan sampai mengizinkan sedikitpun daripada kegiatan terlarang ini, tidak melindunginya melalui kekuasaan undang-undang dan tidak berhubungan dengan rakyatnya berdasarkan larangan-larangan tersebut.
4. Memperbaharui sistem-sistem pendidikan agar sesuai dengan sistem pendidikan Islam dan kebangsaan. Memperhatikan dengan sungguh-sungguh penggunaan bahasa Arab, sejarah kebangsaan serta jiwa-jiwa murid dengan ajaran Islam dan membekali pemikiran mereka dengan hukum dan hikmahnya.
5. Menjadikan syari'at Islam sebagai sumber hukum utama bagi perundang-undangan negara.
6. Mengharuskan kepada setiap kerajaan agar mengikuti petunjuk agama Islam dalam setiap keputusannya (Faris, 2003: 38).

Meskipun secara praktikal Hasan al-Banna belum pernah menjadi ahli politik dengan pengertian tidak pernah menjadi wakil rakyat ataupun menjadi ahli parlimen, namun daripada konsep yang disampaikan menunjukkan luasnya

pengetahuan dan pemahaman Hasan al-Banna terhadap politik Islam secara ideologi dan bagaimana cara pelaksanaannya.

Negara dan Khilafah Dalam Persepektif Hasan al-Banna

Hasan al-Banna sebagai seorang tokoh dan pemikir ulung, sejak awal telah menolak idea atau konsep pemisahan antara agama dengan negara, ataupun konsep pemisahan antara politik dengan pemerintahan. Sikap ini tercermin dari ungkapannya bahwa,

فالإسلام ، والفروع الفقهيات من لا والأصول العقائد من الفقهية كتبنا ن معدود والحكم
الآخر عن منا واحد لاينفك ، وقضاء قانون هو كما ، وتعليم تشريع هو كما وتنفيذ حكم

Maksudnya: "Dalam kitab-kitab feqah, masalah hukum dan pemerintahan termasuk dalam bidang kajian yang utama, bukan masalah cawangan. Islam adalah hukum sekali dengan pelaksanaannya, sebagaimana ia adalah syariat dan pengajaran, serta undang-undang dan peradilan, yang satu tidak boleh dipisahkan daripada yang lain" (Mahmud, 1999: 119).

Konsep seperti ini juga dipegang dengan kuat oleh para pengikutnya seperti Abdul Qadir Audah (t,th: 77-79) dan Hasan al-Hudaibi (1977: 8-9) yang menyebutnya sebagai sebuah konsep yang seakan-akan sudah menjadi aksioma, atau masalah besar agama yang mesti benar-benar difahami. Lebih lanjut para tokoh ini yang telah menyuarakan pemikirannya melalui jamaah Ikhwanul Muslimin bahwa pemerintahan mesti ditegakkan di atas syariat yang Allah SWT turunkan. Allah SWT memerintahkan agar manusia berhukum dengan hukum Allah dan memperingatkan agar mereka tidak meninggalkan

syariat yang diturunkan. Allah SWT menganggap orang yang tidak berhukum dengan syariat yang diturunkan-Nya sebagai kafir, zalim dan fasik (Al-Ma'idah: 44, 45 & 47). Semua itu menegaskan bahwa Allah SWT mewajibkan kepada seluruh umat manusia agar "tidak berhukum dengan yang lain". Kerana itu tidak ada makna lain yang dapat diertikan selain bahwa "hukum adalah asas universal dalam Islam" ('Audah, *op.cit*: 78). Lebih khusus Hasan al-Banna menyatakan

الإخوان أن ذلك بيان و , بها يتصل ما و الخلافة من السلمين الإخوان لموقف أعرض أن إنها و , الإسلام أم بين الارتباط مظهر و , الإسلامية الوحدة رمز الخلافة أن يعتقدون مناط الخليفة و , بشأنها الاهتمام و أمرها في التفكير المسلمين على يجب إسلامية شعيرة الله دين في الأحكام من كثير

Maksudnya: "Saya ingin mengungkapkan mengenai sikap Ikhwanul Muslimin mengenai khilafah dan yang berkaitan dengannya. Sebagai penjelasan, Ikhwan berkeyakinan bahwa khilafah adalah lambang kesatuan Islam dan bentuk rasmi daripada ikatan diantara bangsa Muslim. Ianya merupakan identiti Islam yang mana kaum muslimin wajib memikirkan dan mengambil berat dalam melaksanakannya. Khalifah adalah tempat rujukan bagi pemberlakuan hukum-hukum dalam agama Allah" (Al- Banna, 1965: 141).

Mengenai pernyataan Hasan al-Banna ini Yūsuf al-Qaradhāwī menulis sebagai,

"Imam al-Banna memandang membangun kembali eksistensi khilafah merupakan pandangan yang realistik.

Tapi khilafah bukan perkara yang mudah, yang boleh diwujudkan dengan setakat deklarasi dan bukan setakat memberi mandat khalifah kepada seseorang. Melainkan mesti dengan langkah demi langkah pemikiran, ilmu dan amal yang telah dirancang” (Al- Qaradhāwī , 2007: 89).

Selanjutnya Hasan al-Banna memperkuat alasannya mengenai *imamah* (kepemimpinan) dengan menyatakan:

ما تفصيل و الإمامة أحكام بيان و , الإمام نصب وجوب في وردت التي الأحاديث و
أمر في بالتفكير يهتموا أن المسلمين واجب من أن في للشك مجالا تدع لا , بها يتعلق
يجعلون لهذا المسلمون والإخوان. الآن إلى بتاتا ألغيت ثم منهاجها عن حورت منذ خلافتهم
إلى يحتاج ذلك أن يعتقدون هذا مع هم و , منهاجهم رأس في لإعادتها والعمل الخلافة فكرة
تسبقها أن لابد الخلافة لإعادة المباشرة الخطوة أن و , منها لابد التي التمهيدات من كثير
خطوات

Maksudnya: "Banyak hadis yang menyebutkan wajibnya mengangkat seorang Imam atau pemimpin, juga penjelasan mengenai hukum-hukum *imamah* (kepemimpinan) serta penjelasannya. Benda itu menjadi bukti kuat bahwa umat Islam mesti betul-betul memikirkan masalah pemimpin atau khilafah yang telah hilang daripada agenda perjuangannya mereka dan hampir hilang sama sekali pada masa ini. Oleh kerana itu, menjadikan agenda pemikiran tentang khilafah dan usaha mengembalikan keberadaannya menjadi tujuan utama dalam perjuangannya. Walaupun demikian al-Ikhwan juga meyakini bahwa semua itu memerlukan banyak persiapan yang mesti dilakukan. Sebab langkah untuk mewujudkan kembali keberadaan khilafah

memang mesti didahului oleh perancangan yang baik” (Al-Banna, 1965: 143-144).

Atas asas pemikiran inilah Hasan al-Banna pernah mengutus surat kepada Raja Farouk yang menyatakan bahwa bagi Mesir hanya ada dua pilihan dalam mengharungi kehidupan politik, mengikuti aturan Barat atau mengikuti aturan perundang-undangan Islam.

Dalam pandangan Hasan al-Banna, negara Islam adalah negara yang merdeka, yang tertegak diatas syariat Islam, bekerja dalam rangka melaksanakan sistem sosialnya, mengiklankan prinsip-prinsipnya yang lurus dan menyampaikan dakwahnya yang bijak kepada semua umat manusia (Al-Ghazali, 2001: 2016). Pelaksanaan nilai-nilai Islam bagi Hasan al-Banna tidak boleh diwujudkan kecuali melalui negara Islam atau lebih dikenal dengan istilah 'Daulah Islam' kerana, "Negara adalah representasi daripada pemikiran. Ianya tertegak diatas asas pemikiran itu dan menjadi tanggung jawab atas tercapainya tujuan di masyarakat secara khas, juga sampainya pemikiran itu kepada seluruh umat manusia. Ianya adalah daulah Islam yang bebas, yang berjalan diatas hukum-hukum Islam, menerapkan sistem sosialnya, melaungkan prinsip-prinsip bangsanya dan menyampaikan dakwahnya yang bijak kepada semua umat manusia" (Al-Wa'iy: 2003: 42-43). Pemikiran ini selari dengan apa yang pernah diteorikan oleh Al-Mawardi, Syaikh Rasyid Ridha dan hampir semua ulama salafus shalih yang hanif. Lebih tegas lagi beliau menyatakan, "...Sesungguhnya tuntutan untuk menerapkan syariat Islam untuk menggantikan undang-undang ciptaan manusia bukanlah merupakan konspirasi. Itu merupakan suara

hati nurani yang sentiasa menggelora dalam jiwa setiap muslim. Adalah cita-cita tertinggi dan mulia di kalangan rakyat Mesir, juga kewajiban yang tidak boleh dipertikaikan lagi. Apabila syariat Islam belum tertegak, maka semua orang telah melakukan dosa besar, keamanan terganggu, akan terjadi kerosalan moral di dunia..." (Jundi, 1978: 84). Ayat al-Qur'an yang sering disampaikan Hasan al-Banna mengenai kewajiban untuk berhukum dengan perintah Allah sebagaimana dipetik oleh Yūṣuf al-Qaradhāwī (2007: 14) adalah

اللَّهُ أَنْزَلَ مَا بَعْضُ عَنِ يَفْتُنُوكَ أَنْ وَاحِدَهُمْ أَهْوَاءَهُمْ تَتَّبِعُ وَلَا اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَا بَيْنَهُمْ أَحْكَمَ وَأَنْ لَفَاسِقُونَ النَّاسِ مِنْ كَثِيرًا وَإِنْ ذُنُوبِهِمْ بِنَعْصِ يُصِيبُهُمْ أَنْ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْتُمْ فَاعْلَمُوا تَوْلُوا فَإِنَّ إِلَيْكَ

Maksudnya: "Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling, ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik". Sūrah al-Ma'idah (5) : 49.

Mitchell (2005: 319) menyatakan tujuan tertinggi gerakan Ikhwanul Muslimin adalah menciptakan 'tatanan Islam' (*nizām islām* atau *an islamic order*). Dalam praktikalnya istilah ini dipergunakan secara longgar untuk memaksudkan sebuah negara Islam.

Mitchell yang berusaha membedakan analisisnya dengan penulis yang lain, menyatakan adanya Perbedaan istilah *nizām islām* dengan negara Islam. Dia melihat Ikhwanul Muslimin sebagai gerakan reaksioner fanatik yang berujung menegakkan kembali tatanan politik abad ketujuh, yang pada akhirnya juga sampai pada kesimpulan bahwa pelaksanaan syariat tetap menjadi ukuran bagi penegakan *nizām islām* ataupun negara Islam yang benar (*ibid*).

Mengikuti Hasan al-Banna menegakkan negara Islam adalah sebuah kewajiban. Selama negara Islam belum tertegak, maka seluruh kaum muslimin adalah berdosa. Mereka bertanggung jawab di hadapan Allah kerana mengabaikan untuk menegakkan dan mendirikan khilafah ataupun negara. Sebab tugas negara Islam diisyaratkan untuk berperanan aktif dan positif dalam menyebarkan Islam dan melaksanakan idea-idea Islam. Hasan al-Banna mengistilahkan bahwa negara Islam akan menjadi agensi untuk memperkenalkan Islam. Dalam kes ini beliau memberi contoh negara Komunis di Rusia yang menggunakan wasilah negaranya untuk mempromosikan ideologinya (Al-Ghazali, 2001, 245-255).

Dalam ungkapan yang lain bagi Hasan al-Banna pemerintahan merupakan salah satu dari rukun agama Islam. Kata 'rukun' adalah sesuatu yang menjadi sandaran bagi sesuatu yang lain. Rukun adalah bahagian yang masuk dalam substansi dan substansi itu tidak ada jika tidak adanya rukun ini. Artinya Islam tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diinginkan oleh Allah SWT kecuali jika ada pemerintahan atau daulah yang melaksanakan hukum-hukumnya dalam semua bidang kehidupan politik, ekonomi, peradilan, hubungan internasional mahupun yang lain (Faris, 2003: 39).

Pandangan Hasan al-Banna mengenai khilafah, dalam risalahnya *'Musykilatunā ad-dakhiliyyah fi dhai an-nidzām al-Islāmiy'* (Problematika internal kita dalam sorotan Islam) menyatakan sebagai, "Agama Islam yang hanif mewajibkan tegaknya kaidah sistem sosial yang dibawa oleh agama ini kepada manusia. Islam tidak mengakui terjadinya sistem kacau dan tidak membenarkan jamaah umat Islam tidak memiliki seorang imam (pemimpin) (Al-Banna, t.th, *Majmu'ah Rasail*: 40). Kerana itu khilafah yang diartikan sebagai kekuasaan umum yang paling tinggi dalam Islam dan orang yang menjabatnya disebut sebagai khalifah, mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Oleh sebab itu tugas utama khilafah mengikut Hasan al-Banna adalah :

عندها، للأمة كخادم مهمتها تؤدي وبذلك بحق، اسلامية تكون حتي الحكومة اصلاح
لفرائض مؤدين مسلمين اعضاؤها كان ما اسلامية والحكومة مصلحتها، علي وعامل
الاسلام لاحكام منفذة وكانت بعضيان، متجاهرين غير الاسلام

Maksudnya: "Memperbaiki pemerintahan sehingga menjadi pemerintahan Islami seutuhnya, sehingga ianya dapat melaksanakan tugasnya sebagai pelayan umat yang mengusahakan kemaslahatan umat. Pemerintahan Islam yang mempunyai anggota kaum Muslimin yang melaksanakan kewajiban-kewajiban Islam dan tidak terang-terangan melakukan maksiat serta pemerintah yang melaksanakan hukum-hukum Islam dan nilai ajarannya (Qaradhawi, 2007: 60-61).

Selain itu mengikut Hasan al-Banna khilafah adalah syiar Islam yang mesti dipikirkan oleh setiap Muslim untuk menegakkannya kembali. Penegakan kembali ini memerlukan

usaha atau jihad yang panjang dan langkah-langkah yang banyak (Ibid: 58). Kemudian mengenai pengertian Khilafah Islam, Hasan al-Banna menyatakan,

Ikhwan berkeyakinan bahwa khilafah adalah lambang persatuan Islam dan fenomena ikatan antarabangsa Muslim. Ia adalah simbol Islam yang kaum Muslimin wajib memikirkan dan menaruh perhatian untuk mewujudkannya. Khilafah adalah pijakan bagi pemberlakuan hukum Islam, kerana itu para sahabat lebih mendahulukan urusan ini daripada urusan pemakaman jenazah Rasulullah SAW, hingga mereka menyelesaikan urusan itu dengan tuntas...Dengan itu, Ikhwanul Muslimin menjadikan pemikiran khilafah dan usaha untuk mengembalikan eksistensinya sebagai agenda utama dalam manhajnya. Bersamaan dengan itu Ikhwan juga meyakini bahwa ia memerlukan banyak pengantar yang mesti diwujudkan (Al-Ghazali, 2001: 285-286).

Tahapan pembentukan khilafah dijelaskan oleh Hasan al-Banna dalam salah satu rukun baiat yaitu '*amal*' atau bekerja disebutkan tingkatan-tingkatan ama yang dimulai dengan '*Ishlāh al-afrad*' (memperbaiki diri sendiri), '*Takwīn al-bait al-Muslim*' (membentuk keluarga Muslim), '*takwīn al-mujtama' al-Muslim*' (membentuk masyarakat Muslim), '*tahrīr al-wathan*' (membebaskan negara-negara Islam daripada kekuasaan asing), '*ishlāh al-hukūmah*' (bekerja untuk memperbaiki pemerintahan sehingga menjadi pemerintahan Islami) dan terakhir '*iqāmatu al-daulah*' (menegakkan kembali Daulah Islamiyah) (Faris, 2003: 59).

Hasan al-Banna mulai mentarbiyah generasi Islam atas asas kebangkitan yang beliau cadangkan. Beliau menghendaki pembentukan daulah Islamiyah dan pelaksanaan Daulah Islam secara benar. Untuk mencapai tujuan itu beliau menempuh satu-satunya jalan tarbiyah Islamiyah (Al-Mash, 1995: 103). Tarbiyah yang baik akan melahirkan masyarakat yang baik pula. Masyarakat yang baik adalah mereka yang sedar akan hukum-hukum Allah dan akan sentiasa menegakkan syariat Allah dengan mendirikan daulah yang berasaskan kepada syariat Allah. Inilah konsep sebuah daulah yang dicita-citakan oleh Hasan al-Banna yang tidak seorangpun boleh menjangkakan bila akan tercapai cita-cita mulia ini.

Demokrasi Dalam Pandangan Hasan al-Banna

Demokrasi yang secara konsep dikatakan berasal daripada Barat, sering menjadi pertanyaan para pemikir bagaimana Islam menerima konsep ini. Apakah Islam mempunyai alternatif konsep lain jika tidak menerima demokrasi sebagai bahagian daripada sistem pemerintahan. Atau mungkinkah sebenarnya Nabi Muhammad dan para khalifah penggantinya, sebagai peletak asas konsep politik Islam, telah melaksanakan demokrasi walaupun belum diteorikan sebagai sebuah disiplin ilmu. Dalam sejarah, disiplin keilmuan Islam ada jauh setelah Rasulullah wafat. Bukan hanya ilmu politik yang masuk dalam kelompok ilmu baru, penulisan al-Qur'an baru dimulai pada masa khalifah Umar bin Khattab dan selesai pada masa khalifah Utsman bin Affan. Demikian pula dengan ilmu Hadis dan yang lainnya, bukan berarti ilmu tersebut tidak ada, kerana pada kenyataannya sudah dilaksanakan dan dicontohkan oleh Rasulullah secara praktikal

hanya saja belum diteorikan dalam sebuah disiplin ilmu. Demikian pula dengan ilmu politik Islam yang didalamnya juga termasuk perbincangan mengenai demokrasi.

Dalam pandangan Hasan al-Banna, Islam sebagai sebuah agama dan ideology memiliki konsep yang lengkap dan sempurna dan dalam pelaksanaannya sudah dicontohkan dengan baik oleh Rasul melalui sunnah dan diikuti oleh para sahabat sebagai khalifah penerusnya. Islam sebagai ideology mempunyai prinsip-prinsip sendiri dalam sistem politik dan pemerintahannya iaitu: *syūrā* (mesyuarat), *hurriyah* (kebebasan), *musāwah* (persamaan), *'adl* (keadilan), *thā'ah* (kepatuhan) dan *amar ma'ruf nahi munkar* (Ruslan, 2000: 324). Apakah prinsip-prinsip tersebut termasuk kedalam amalan demokrasi atautkah justru sebaliknya bahwa demokrasi hanyalah sebagian daripada luas dan lengkapnya prinsip-prinsip politik Islam. Berkaitan dengan *syūrā* Taufiq Yusuf al-Wa'iy menulis sebagai,

Jika *syūrā* (mesyuarat) mempunyai maknanya yang khusus dalam Islam, maka ia sesungguhnya bertemu dalam substansi dengan sistem demokrasi, iaitu sistem yang meletakkan semua persoalan di tangan majoriti tanpa mengabaikan hak-hak minoriti dengan berbagai-bagai ragamnya untuk memberi pendapat dan sikap yang berbeda, sekaligus memberi hak legal untuk mempertahankan pendapatnya dan mengajak pihak lain kepada sikapnya (Yusuf Al-Wa'iy, 2003: 44).

Hasan al-Banna menilai bahwa beberapa prinsip demokrasi boleh diterima dan sesuai dengan Islam, tetapi ada juga sebagian yang tidak oleh diterima dan tidak sesuai dengan

ajaran Islam. Prinsip demokrasi yang meletakkan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat ataupun suara terbanyak dengan konsepnya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, adalah tidak sesuai dengan prinsip Islam yang menjadikan syariat dan hukum Allah sebagai asas tertinggi. Bahkan bukan sesuatu yang kontradiktif jika Hasan al-Banna menyatakan secara terbuka bahwa "Bila negara Soviet mengangkat komunisme sebagai landasan negara mereka, dan pemerintahan Anglo-Amerika membangun negaranya atas asas demokrasi, maka setiap negara Islam memiliki hak untuk membangun bangsa atas dasar Islamisme" (Mitchell, 2005 *op.cit.*, : 329).

Ada tiga pembahasan penting mengenai demokrasi dalam pandangan Hasan al-Banna yaitu mengenai kelompok minority, peranan kaum perempuan dalam parti politik dan hak azasi manusia (Furqan, 2004: 70). Ketika membahas mengenai negara Islam, ramai yang salah menilai mengenai konsep Islam terhadap keberadaan kelompok minority. Menjadikan Islam sebagai *the way of life* tidak bererti menafikan keberadaan kelompok minority non muslim dalam masyarakat Islam. Menurut Hasan al-Banna, keberadaan kelompok non muslim adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan dalam menyambut kebangkitan umat abad ini (Al-Ghazali, 2001: 218). Mengenai hak kelompok minority non Muslim, lebih jauh al-Ghazali menjelaskan pemikiran Hasan al-Banna yang menyatakan bahwa kedudukan kelompok non Muslim di dunia Arab telah jelas, lama dan dikenali. Mereka mendapatkan apa yang kaum Muslimin dapatkan...Mereka adalah partner di negeri ini. Saudara dalam rangka membela tanah air ini. Mereka memiliki hak-hak kewarganegaraan, baik hak materi maupun non materi, baik hak sipil maupun militer (Ibid: 219-220).

Mengenai peranan politik kaum perempuan Hasan al-Banna berpendapat bahwa secara umum perempuan bukanlah mahluk yang lebih rendah dari pada laki-laki. Kelompok perempuan mempunyai hak mengikuti dalam pilihan raya dan hak dipilih menjadi wakil rakyat di parlimen, baik di pusat mahupun di daerah (Ibid: 221). Selain itu Hasan al-Banna memberi pendapatnya yang lebih memberi pembelaan terhadap kaum perempuan dengan pernyataannya sebagai, "Perempuan juga berhak untuk memegang jawatan keanggotaan di majelis itu (parlimen), juga untuk memegang kepimpinan selain *imāmah kubrā* (*khalifah*). Adapun yang berkaitan dengan jawatan kehakiman, persoalan ini masih terbuka pintu untuk ijtihad" (Ibid: 222).

Pembahasan mengenai hak asasi manusia, Hasan al-Banna berpendapat bahwa Islam tidak hanya mengurus masalah ibadah sahaja, tetapi juga menempatkan manusia pada posisi yang sangat terhormat. Penghormatan terhadap manusia dalam Islam tidak parsial, tetapi lintas bahasa dan suku bangsa. Sejak awal Islam telah melindungi darah dan kehormatan, harta dan maruah dan menjadikannya sesuatu yang suci (Ibid: 227-228).

Dari pemaparan diatas penulis sampai pada kesimpulan bahwa *syumūliyyah* ajaran Islam telah menjadikan Islamisme sebagai sebuah asas sendiri dalam konsep politik Islam, melebihi komunisme yang dimiliki negara-negara Sosialis dan juga demokrasi yang dimiliki negara-negara Liberal. Demokrasi hanyalah sebagian dari luas dan lengkapnya prinsip-prinsip politik Islam yang sebagiannya boleh diterima ketika sesuai dengan Islam, tetapi ada juga sebagian yang tidak oleh diterima ketika tidak sesuai dengan ajaran Islam. Islam sebagai ideology

mempunyai prinsip-prinsip sendiri dalam sistem politik dan pemerintahannya iaitu: *syūrā* (mesyuarat), *hurriyah* (kebebasan), *musāwah* (persamaan), *'adl* (keadilan), *thā'ah* (kepatuhan) dan *amar ma'ruf nahi munkar*.

Parti Politik Dalam Pandangan Hasan al-Banna

Secara politik Hasan al-Banna tidak pernah setuju terhadap sistem parti ataupun multiparti sebagaimana yang berlaku di Mesir pada masa itu. Beliau menyatakan:

اعتقد ... الناس علي افرضها ان احب لا و خاصة لي هي اراء السياسية الحزبية في لي وان لا فهي البلدان، بعض في الظروف بعض في جازت ان السياسية الحزبية ان السادة، ايها ...أبدا مصر في تجوز لا وهي كلها، في تجوز

Maksudnya: “Mengenai parti politik, saya punya pendapat sendiri. Saya tidak ingin memaksakannya kepada orang lain...Wahai para pemimpin, saya yakin bahwa pada keadaan tertentu, parti politik di sebagian Negara dibolehkan, itu tidak bererti bahwa parti politik boleh ada pada seluruh Negara. Parti politik tidak boleh ada di Mesir selamanya (Al-Banna, 1965: 178-181).

Hujjah yang diberikan Hasan al-Banna mengenai penolakannya terhadap sistem parti politik disampaikan dalam Risalah Mukhtamar Kelima yang menyatakan:

و الإخوان المسلمون يعتقدون أن الأحزاب السياسية المصرية جميعا قد وجدت في ظروف خاصة , و لدواع أكثرها شخصي لا مصلحي ويعتقد الإخوان كذلك أن هذه الحزبية قد أفسدت على الناس كل مرافق حياتهم وعطلت مصالحهم , وأتلفت أخلاقهم , ومزقت روابطهم , وكان لها في حياتهم العامة والخاصة أسوأ الأثر

(Al-Banna, 1965, *op.cit.*: 200).

Maksudnya: "Al-Ikhwan al-Muslimun berkeyakinan bahwa parti-parti Mesir seluruhnya didirikan pada masa kondisi khusus, yang didorong oleh beberapa sebab, sebagian besarnya adalah faktor individu, bukan kepentingan umum...Al-Ikhwan al-Muslimun juga berkeyakinan sistem kepartian ini telah merosakkan seluruh prasarana kehidupan masyarakat, mengabaikan kemaslahatan mereka dan menceraikan ikatan-ikatan mereka. Sistem parti masih lagi mempunyai akibat lain yang lebih buruk dalam kehidupan mereka secara umum dan khusus."

Ketidaksukaan Hasan al-Banna terhadap sistem parti politik diungkapkan dengan jelas dalam pernyataannya sebagai, "Bahwa kami adalah para ahli politik, itu benar. Kami sama sekali tidak keberatan. Adapun bahwa kami adalah orang-orang parti politik, maka itu salah" (Ibid: 178). Dalam ungkapan yang lain Hasan al-Banna mempertanyakan kepentingan adanya parti politik yang menurutnya tidak mempunyai program dan manhaj yang jelas. Hasan al-Banna menulis sebagai:

Ikhwan juga berkeyakinan bahwa parti-parti yang ada, hingga kini belum dapat menentukan program dan manhajnya secara pasti. Semua mengaku akan berjuang demi kemaslahatan umat dalam segala aspeknya. Akan tetapi, bagaimana perincian kerjanya serta apa pula sarana dan prasarana yang mereka siapkan kearah perwujudannya? ...Jawaban keatas semua pertanyaan itu tidak akan kita peroleh daripada para pimpinan parti.

Mereka menyedari akan kekosongan ini sebagaimana mereka jga sepakat dalam hal lain iaitu sangat berkeinginan untuk merebut kepimpinan negara, melakukan berbagai-bagai kempen parti, penghalalan secala cara untuk mencapai tujuan, dan mencela lawan-lawan politik yang tidak berhasil mencapai tujuannya (Al-Banna, 1997: 314).

Menurut Yūsuf al- Qaradhāwī, dengan melihat realiti parti politik yang ada di Mesir pada masa itu, Hasan al-Banna telah sampai pada kesimpulan bahwa Islam tidak membolehkan parti politik. Dalam risalahnya Hasan al-Banna menyatakan:

Wahai para pemimpin, setelah pemaparan ini semua, saya berkeyakinan bahwa Islam –yang merupakan agama persatuan, kelapangan dada, kesucian hati, persaudaraan yang tulus dan kerjasama yang jujur antara anak cucu manusia seluruhnya, lebih-lebih antara satu umat atau satu bangsa- tidak membolehkan sistem parti, tidak meridhai dan tidak menyetujuinya (Ibid: 183).

Pendapat inilah yang kemudian dikritik oleh Yūsuf al-Qaradhāwī dan dianggap sebagai ijtihad politik yang salah daripada Hasan al-Banna. Yūsuf al- Qaradhāwī menulis sebagai:

Seandainya kritikan Ustadz Hasan al-Banna hanya ditujukan pada parti-parti dan para pimpinannya, hingga mesti diganti dengan yang lebih baik tanpa harus menghapus sistem multipartai –kerana itu merupakan utama yang tidak boleh diganti- maka kami tidak akan

berbeda pendapat dengannya. Akan tetapi yang berbahaya daripada pendapatnya adalah seruan untuk menghilangkan sistem parti itu sendiri dan ketidaksetujuannya dengan sistem multiparti dan anggapan bahwa itu berlawanan dengan Islam (Al-Qaradhāwī, 2007, *op.cit.*,: 188).

Alasan kritik dan Perbedaan pendapat yang diungkapkan Yūsuf al-Qaradāwī, adalah pengalaman sejarah yang terjadi di Mesir iaitu Revolusi 23 Julai. Yūsuf al-Qaradāwī menulis:

Kami yakin bahwa pendapat Ustadz al-Banna ini mempengaruhi para pelaku revolusi 23 Julai, juga oleh Gamal Abdun Nasir. Mereka telah menghilangkan parti-parti dan sistem kepartian di Mesir dengan menghimpun semua rakyat di bawah jargon 'persatuan nasionalism' kemudian 'persatuan komunism'. Peristiwa inilah yang membawa Mesir pada penguasa diktator yang memerintah dengan besi dan api...Al-Ustadz Hasan al-Banna tidak menginginkan hal itu, pasti. Tapi diakui atau tidak, pendapat inilah yang melatarbelakangi peristiwa penghapusan multiparti... Itulah ijtiḥad dari Ustaz Hasan al-Banna. Ia mendapat pahala daripada ijtiḥadnya tersebut. Hanya saja perjalanan hari membuktikan kekeliruan hasil ijtiḥadnya dan bahwa yang benar adalah multiparti. Itulah yang sesuai dengan hukum alam seluruhnya (Ibid: 188-189).

Ijtihad Hasan al-Banna yang anti kepada sistem parti dan multiparti sangat dipengaruhi oleh keadaan yang terjadi di Mesir pada masa itu. Perpecahan yang terjadi pada umat Islam diakibatkan adanya banyak parti politik pada masa itu menyebabkannya berpendapat bahwa sistem parti politiklah yang menyebabkan keadaan umat Islam di Mesir berpecah belah. Hasan al-Banna tidak pernah menyangka bahwa ketika pendapatnya ini disalahertikan oleh orang yang pernah menjadi pengikutnya iaitu Gamal Abdun Nasir, akan menimbulkan bencana yang besar bagi Mesir pada masa itu. Semestinya kesalahan yang terjadi di Mesir yang dilakukan oleh para pelaku dalam melaksanakan sistem parti politik adalah kesalahan orang-orang yang melaksanakannya, bukan kemudian menyalahkan sistem parti politiknya yang sebenarnya mempunyai fungsi kontrol atau pengawasan terhadap kerajaan ataupun pemerintahan. Sebab sistem satu parti yang kemudian dilaksanakan oleh pemerintahan Gamal Abdun Nasir menyebabkan kesalahan yang sangat besar dengan hilangnya fungsi kontrol terhadap kerajaan dengan membungkam mulut orang-orang yang menjadi pembangkang dalam pemerintahannya. Tanpa adanya parti pembangkang yang fungsinya sebagai kontrol dan penyeimbang dalam kerajaan, pemerintahan Gamal Abdun Nasir telah menjadi penguasa diktator yang menyeret siapa sahaja yang berani berkata 'tidak' kedalam penjara, bahkan ke tali gantungan dan hukuman mati.

Perjuangan Politik Hasan al-Banna Dalam Ikhwanul Muslimin

Perjuangan politik Hasan al-Banna secara praktikal dinilai oleh Carl Brown telah mewarnai dan mempengaruhi kekuatan politik di Mesir. Beliau menulis sebagai, "Dengan demikian, pada akhir tahun 1930-an dan selama tahun 1940-an Ikhwanul Muslimun telah menjadi kekuatan politik di Mesir. Organisasi ini meluas keluar Mesir, ke Suriah pada pertengahan tahun 1930-an, ke kalangan bangsa Palestina dan Jordan beberapa tahun kemudian, ke sebelah selatan hingga mencapai Sudan pada pertengahan tahun 1940-an, selain juga pengaruh besar di seluruh bahagian dunia muslim" (Brown, 2003).

Selanjutnya penulis nukilkan beberapa fakta sejarah yang berhubungkait dengan kegiatan politik Hasan al-Banna melalui gerakan Ikhwanul Muslimin yang menunjukkan tentang utuhnya pemahaman beliau dalam memandang ajaran Islam. Usman Abdul Mu'iz Ruslan memaparkan daripada berbagai-bagai sumber dalam risalah sarjananya antara lain menyatakan, "Dalam aktiviti politik, Ikhwan mempunyai peranan besar pada masa itu, iaitu mengangkat masalah Palestina sejak ia tercetus pada tahun 1936, dengan perlawanan rakyatnya kepada Inggris dan Yahudi. Mereka ikut memberi sokongan pemikiran dan pelaksanaan dengan membela Palestina serta mempublikasikan berita-berita yang berkaitan dengannya pada surat kabar-surat kabar mereka (Ruslan, 2000: 193)."

Pada halaman yang lain dinyatakan, "Ikhwan mengadakan muktamar politik untuk mahasiswa-mahasiswa mereka pada bulan Muharram 1357 di gedung Pemuda. Dalam pertemuan ini, Al-Banna menyampaikan pidato tentang sikap Islam terhadap politik dan parti. Para peserta mukamar

memutuskan menuntut pembubaran semua parti politik dan menggantinya dengan sebuah forum bersama yang menggunakan konsep Islam dalam sebuah aspek kebangkitan” (Ibid: 194).

Mengenai kegiatan politik yang secara praktikal pernah dilaksanakan oleh Hasan al-Banna, Ali Abdul Halim Mahmud menulis sebagai, “Pada tahun 1942, Imam Hasan al-Banna mengajukan borang pencalonan untuk menjadi ahli parlimen. Tetapi Al-Nahas Pasha memanggil dan memintanya untuk mengundurkan diri daripada pencalonan atas perintah Kerajaan Britain. Saat itu terjadi perbincangan antara Imam Hasan al-Banna dan Al-Nahas Pasha. Akhirnya Imam Hasan menarik pencalonannya dengan imbalan bahwa pemerintah melonggarkan tekanan kepada jamaah dan memberinya izin untuk melakukan kegiatan dakwah seperti dulu (Mahmud, 1997: 36-37).

Pada tahun 1945 M dimasa pemerintahan Ahmad Mahir Basya, Ikhwanul Muslimin kembali mencalonkan Hasan al-Banna untuk kedua kalinya sebagai wakil rakyat daripada Ismailiah. Namun kabinet baru ini menggunakan strategi baru untuk memerangi calon-calon yang tidak dikehendaki oleh pihak British, iaitu dengan memanipulasi pilihan raya sehingga ketika hasil pemilihan diumumkan, pihak mursyid Ikhwan sangat dirugikan. Mursyid tidak tinggal diam terhadap penipuan ini, bahkan beliau menulis memorandum kepada Perdana Menteri yang berisi kecaman terhadap upaya penipuan dan tindakan agresif aparat keamanan terhadap Ikhwan (Al-Wakil, 2001: 139). Inilah realiti sejarah yang menunjukkan orientasi pemikiran dan wawasan politik Islam Hasan al-Banna yang komprehensif dan universal. Bahwa politik juga

merupakan bahagian daripada ajaran Islam dan juga boleh dijadikan dalam usaha menyedarkan dan memperbaiki keadaan ummat Islam.

Pandangan Politik Islam Mohammad Natsir

Politik dalam Islam bagi M. Natsir adalah suatu kemestian. Konsep-konsep politiknya yang mula-mula diungkapkan pada awal 1930, memperlihatkan ciri-ciri pemikiran Islam modernis (Saefudin, 1991: 141) di Indonesia. Misi politik Islam yang diperjuangkannya adalah menentang berbagai-bagai aliran pemikiran yang berusaha untuk merosakkan Islam samaada daripada kaum orientalis Belanda, mahupun pemikiran tokoh-tokoh nasionalis yang mengarah kepada pemikiran sekular. Mengikut M. Natsir, Islam bukan semata-mata religi, iaitu agama dalam pengertian ruhaniah sahaja. Islam mengatur hubungan antara manusia dan Allah ada antara sesama manusia. Islam merupakan pedoman dan falsafah hidup yang tidak mengenal pemisahan agama dari politik. M. Natsir berusaha menjelaskan tentang hakikat politik dalam Islam. Bahwa Islam bukanlah setakat ibadah *mahdhah* sahaja. Beliau menyatakan dalam sebuah wawancara:

Banyak sekali masalah kontemporer yang dihadapi Islam sebagai kelanjutan daripada proses yang telah berlangsung sebelumnya, terutama masalah-masalah yang berlanjutan setelah konstituante. Perlu diketahui bahwa Islam adalah agama mayoriti penduduk di negara kita, tetapi banyak sekali umat Islam yang belum memahami Islam, atau yang memahami Islam daripada sudut pandang lain yang dipengaruhi oleh konsepsi-konsepsi

(pemahaman) Barat. Dalam konteks pemahaman yang sering dilukiskan sebagai kehidupan duniawi dan kehidupan spiritual misalnya, Islam tidak mengenal dikotomi (pemisahan) ini. Islam memandang kehidupan manusiawi di dunia ini secara komprehensif, tidak ada pemisahan kehidupan, termasuk dalam hubungan antara orang sebagai peribadi, sebagai warga masyarakat dan sebagai warga negara (Natsir, 1959: 59-60).

M. Natsir menggunakan istilah pemodenan politik Islam yang mengandung erti sebagai sikap dan pandangan yang berusaha untuk melaksanakan ajaran dan nilai-nilai ruhiyah, sosial dan politik Islam yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi dan menyesuaikannya dengan perkembangan-perkembangan semasa dalam sejarah tamadun umat manusia (Haryono, 1995: 126-127). Dalam ungkapan yang lebih spesifik lagi mengenai kaitan politik dengan Islam, M. Natsir menyatakan, "Sebagai seorang muslim, kita tidak boleh melepaskan diri daripada politik. Sebagai seorang politik, kita tidak boleh melepaskan diri daripada ideologi kita, iaitu ideologi Islam. Bagi kita, menegakkan Islam itu tidak boleh dilepaskan daripada menegakkan masyarakat, menegakkan negara dan menegakkan kemerdekaan (Natsir, 1958: 157). Bahkan dalam salah satu tulisannya mengatakan bahwa Islam adalah filsafat hidup, satu *levens filosofie* atau satu ideologi...Ideologi ini menjadi pedoman bagi umat Islam dan tak boleh dilepaskan daripada politik. Dengan kata lain dalam berpolitik tak boleh melepaskan diri dari ideologi Islam. Sesuai dengan tuntunan Islam maka hidup bermasyarakat, bernegara, menegakkan kemerdekaan tak dapat dilepaskan dari menegakkan Islam (Ibid: 7).

Negara Dalam Pandangan Mohammad Natsir

Untuk meneliti mengenai pandangan M. Natsir mengenai negara, menurut Ahmad Suhelmi ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, keadaan sosial politik pada masa terjadinya polemik yang berkaitan dengan pertarungan ideologi antara kelompok nasionalis Islam dengan nasionalis sekular. Dilihat daripada hal ini, timbulnya pemikiran M. Natsir merupakan usaha untuk memperkuat ikatan ideologi diantara kelompok nasionalis Islam. Kedua, lahirnya pemikiran M. Natsir ini juga dianggap sebagai reaksi terhadap pemikiran sekular Soekarno (Suhelmi, 1999: 73). Deliar Noer menilai bahwa pertentangan pemikiran keduanya (M. Natsir dan Soekarno) sebagai mewakili pertentangan dua kelompok penting di Indonesia yaitu kelompok nasionalis Islam dan kelompok nasionalis yang tidak berasas agama (Noer, 1996: 315).

Negara Islam bagi M Natsir adalah suatu badan yang merupakan alat untuk melaksanakan syariat Allah. Beliau menulis sebagai, "Negara bagi kita bukan tujuan, tetapi alat. Urusan kenegaraan pada intinya dan pada dasarnya adalah satu bahagian yang tak dapat dipisahkan, satu '*intergreerend deel*' dari Islam. Yang menjadi tujuan ialah kesempurnaan berlakunya undang-undang Ilahi, baik yang berkaitan dengan perikehidupan manusia sendiri (sebagai individu), ataupun sebagai anggota masyarakat. Baik yang berkaitan dengan kehidupan dunia yang fana ini, ataupun yang berkaitan dengan kehidupan kelak di alam baka" (Natsir, 1954: 442). Dalam bahasa yang lain M. Natsir mengkiaskan bahwa al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang merupakan petunjuk dan hukum hakam yang telah disyariatkan bagi umat manusia, tidak mempunyai kaki dan tangan untuk menjaga supaya

peraturan-peraturan di dalamnya dapat tetap dijalankan oleh manusia. Oleh sebab itu menurutnya, “Untuk menjaga supaya aturan-aturan dan ketetapan-ketetapan itu dapat berlaku dan berjalan sebagaimana mestinya, perlu dan tidak boleh tidak, mesti ada suatu kekuatan dalam pergaulan hidup berupa kekuasaan dalam negara, sebagaimana telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW kepada kaum Muslimin sebagai, ‘Sesungguhnya Allah memegang dengan kekuasaan penguasa, yang tidak dapat dipelihara dan dipegang oleh Al-Qur’an itu’ (H.R. Ibnu Katsir) (Natsir, 1954: 437).

Ada dua alasan mengapa M. Natsir memperjuangkan untuk menjadikan Islam sebagai asas negara. Pertama, Islam sebagai agama yang dianut majoriti rakyat Indonesia cukup punya akar dalam masyarakat dan kerana itu punya hujjah yang kuat untuk dijadikan asas negara. Kedua, bahwa ajaran Islam bersifat sempurna bagi kehidupan negara dan masyarakat serta boleh menjamin keragaman hidup antara berbagai-bagai kelompok dalam negara dengan penuh toleransi (Natsir, 2000: 11). Mengenai Islam sebagai agama toleransi M. Natsir berpendapat:

Toleransi yang diajarkan oleh Islam itu, dalam kehidupan antar-agama bukanlah suatu toleransi pasif. Ia itu aktif, aktif dalam menghargai dan menghormati keyakinan orang lain. Aktif dan bersedia sentiasa untuk mencari persamaan antara bermacam-macam Perbedaan...Kemerdekaan beragama bagi seorang Muslim adalah suatu nilai hidup yang lebih tinggi daripada jiwanya sendiri. Apabila kemerdekaan agama terancam dan tertindas, walau kemerdekaan agama bagi

bukan orang beragama Islam, maka seorang diwajibkan untuk melindungi kemerdekaan ahli agama tersebut agar manusia umumnya merdeka untuk menyembah Tuhan mengikut agamanya masing-masing, dan dimana perlu dengan mempertahankan jiwanya (Natsir, 1995: 219).

Mengikut Thohir Luth ada tiga alasan mengapa M. Natsir bersama parti politik Islam lainnya mengusulkan Islam sebagai asas negara. Pertama, adanya kenyataan sosiologis, iaitu komuniti masyarakat di Indonesia ini majoriti Muslim. Kedua, adanya kenyataan normatif yang telah memperlihatkan bahwa sebelum Pancasila lahir, umat Islam di Indonesia telah menjadikan Islam dan mengamalkan Islam dalam kehidupannya sehari-hari. Ketiga, adanya komitmen yang sangat tentang Islam pada diri M. Natsir yang terbukti dengan pernyataannya tentang Islam sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat (Luth, 1999: 105).

Pemikiran M Natsir mengenai negara tidaklah selari dengan pendapat Ibn Khaldun yang mengatakan bahwa adanya negara tidak bergantung kepada ada-tidaknya nabi atau *nubuwwah* (kenabian). Natsir mengakui bahwa Nabi tidak memerintahkan untuk mendirikan negara dan adanya negara tidak bergantung kepada ada-tidaknya Islam. Tetapi, Nabi mengajarkan pedoman khas untuk melaksanakan pemerintahan agar negara menjadi kuat dan sejahtera sehingga rakyatnya mudah memperolehi tujuan hidup ini (Noer, 2000: 135). Konsep yang diungkapkan oleh M. Natsir ini lebih mempunyai tujuan untuk menjelaskan bahwa di dalam Islam tidak ada istilah 'kependetaan,' iaitu pemisahan antara gereja dengan erti suatu badan yang bekerja sama tetapi berdiri sendiri dan terpisah

daripada negara atau kerajaan. M. Natsir memberi penekanan bahwa samaada kehidupan peribadi mahupun hubungkait seseorang dalam masyarakat dan negara dalam Islam tidak boleh dipisahkan daripada keislamannya.

Demokrasi Dalam Pandangan Mohammad Natsir

Sistem Demokrasi mengikut M. Natsir adalah baik, akan tetapi sistem kenegaraan Islam tidak menggantungkan semua urusan kepada kerahiman *instelling-instelling* demokrasi. Perjalanan demokrasi, menurutnya, dari abad ke abad telah memperlihatkan beberapa sifatnya yang baik. Akan tetapi lanjutnya ia tidak pula sunyi daripada pelbagai sifat yang berbahaya (Natsir, 1954: 439). Kerananya mengikut Natsir, 'Islam tak usah demokrasi 100%, bukan pada otokrasi 100%, Islam itu...yah Islam' (Ibid: 453).

Pernyataan M. Natsir yang menyokong sistem demokrasi adalah, 'Islam bersifat demokratis, dengan erti bahwa Islam itu anti *istibdad*, anti absolutisme, anti sewenang-wenang' (Ibid: 452). Kerananya, 'Pengertian demokrasi dalam Islam memberikan hak kepada rakyat supaya mengeritik, memperbetulkan pemerintahan yang zalim. Kalau tidak memberi hak kepada rakyat untuk menghilangkan kezaliman itu dengan kekuatan dan kekerasan jikalau perlu' (Ibid: 439). Lebih jelas lagi mengenai sokongannya kepada demokrasi, M. Natsir menyatakan, "...sejauh menyangkut Islam, demokrasi adalah hal yang pertama, sebab Islam hanyalah mungkin berhasil dalam sistem demokratis" (Kahin, 1978: 333).

Selain pernyataannya yang menyokong sistem demokrasi, M. Natsir juga memberikan kritik terhadap sistem demokrasi yang mendasarkan keputusan kepada suara

terbanyak. Hal ini, sebagaimana ditulis Yusril, disebabkan kerana politik tidaklah semata-mata harus didasarkan kepada kemauan majoriti ahli parlimen. Keputusan itu tidak dapat melampaui hudud (batas-batas) yang telah ditetapkan oleh Tuhan (Mahendra, 1994: 79).

Dari beberapa perbezaan diatas, penulis menyimpulkan bahwa M. Natsir menyetujui sebagian daripada sistem demokrasi, tetapi juga menolak sebagiannya yang tidak sesuai dengan Islam. Dalam sidang Konstituante tahun 1957, M. Natsir menyatakan pendapatnya dengan memperkenalkan demokrasi dalam Islam dengan istilah '*Theistic Democracy*', iaitu demokrasi yang diasaskan kepada nilai-nilai ketuhanan (Kamaruzzaman, 2000: 40). Maksudnya keputusan majoriti rakyat berpedoman kepada ketuhanan. Keputusan majoriti rakyat berpedoman kepada nilai-nilai ketuhanan itu, mengikut Natsir boleh dianggap sebagai *ijma'* kaum muslimin yang mengikat untuk tempat dan zaman tertentu (Mahendra, 1996: 67).

Dengan pendapatnya ini, boleh dikatakan M. Natsir menerima sebagian prinsip demokrasi yang sesuai dengan Islam dan menolaknya yang tidak sesuai dengan prinsip Islam. Islam sebagai agama yang lengkap dan sempurna mempunyai sistem politik sendiri seperti prinsip-prinsip *syūrā* (mesyuarat), *hurriyah* (kebebasan), *musāwah* (persamaan), *'adl* (keadilan), *thā'ah* (kepatuhan) dan *amar ma'ruf nahi munkar*. Sistem demokrasi yang nilai-nilainya sesuai dengan prinsip Islam hanyalah sebagian daripada luasnya sistem politik dalam Islam.

Perjuangan Politik Islam Mohammad Natsir Dalam Masyumi

M. Natsir sebelum terkenal sebagai seorang pemimpin Islam di dunia Islam Antarabangsa, telah lebih dulu dikenali

sebagai seorang ahli politik. Keberadaan M. Natsir dalam Masyumi telah membawa nuansa baru bagi perjuangan umat Islam Indonesia terhadap kepentingan agama, politik, ekonomi dan sosial. Kerana Masyumi merupakan organisasi kesatuan, maka anggota-anggotanya memiliki bermacam-macam pandangan keagamaan, politik, ekonomi dan sosial (Luth, 1999: 41).

Dalam Masyumi M. Natsir banyak memperjuangkan kepentingan Islam melalui parlimen. Contoh yang sangat jelas adalah pembelaannya ketika terjadi Perbedaan pendapat yang tajam mengenai Pancasila atau Islam sebagai dasar negara pada tahun 1956. Pada saat itu, Presiden Soekarno lebih terlihat aktif dalam melakukan intervensi politik. Pancasila ditampilkan oleh Soekarno sebagai pengganti konsep Islam. Bahkan sebelumnya pada tahun 1953, Presiden Soekarno menyatakan sikapnya mengenai negara Islam. Ia menyatakan dalam salah satu pidatonya di Amuntai, Kalimantan bahwa apabila kita mendirikan negara berdasarkan Islam maka beberapa daerah yang penduduknya bukan Islam akan memisahkan diri (Mughni, 1994: 109). M. Natsir memberi kritikan yang tajam atas pernyataan tersebut. Dalam sebuah pidato yang bertajuk 'Islam Sebagai Dasar Negara', beliau menyatakan bahwa untuk dasar negara, Indonesia hanya mempunyai dua pilihan iaitu sekularisme (*lā dīniyyah*) atau fahaman agama (*dīn*) (Natsir, 1957: 12). Bahkan dalam kritikan yang lebih keras lagi M. Natsir mengatakan, "Pancasila tidak patut dijadikan ideologi negara, kerana sila-sila itu semuanya relatif, samaada sila-sila itu sendiri mahupun hubungan satu dengan lainnya. Berbeda dengan Pancasila, Islam mempunyai hukum hakam yang diberikan kepada manusia oleh Tuhan melalui wahyu yang memberikan

ukuran mutlak untuk mengatur persoalan-persoalan manusia” (Natsir, 1958: 144-145).

Sesuatu yang patut dicatat oleh sejarah adalah, sikap M. Natsir yang mengagumkan ketika beliau berusaha mencari jalan tengah dengan mengajak berdamai kepada para penyokong Pancasila (kelompok nasionalis sekuler) dengan memberikan argumentasi yang kuat apabila mereka menerima Islam sebagai dasar negara. Dalam Sidang Pleno Konstituante tanggal 12 Nopember 1957 beliau menyatakan, “Saya ingin menyampaikan seruan yang sungguh-sungguh kepada saudara-saudara yang menyokong pancasila. Sila-sila yang saudara-saudara maksud ada terdapat dalam Islam. Bukan sebagai ‘*pure concept*’ yang steril tetapi sebagai nilai-nilai hidup yang nyata dan terang. Dengan menerima Islam sebagai falsafah negara, saudara-saudara pembela pancasila tidak dirugikan apa-apa. Samaada sebagai penyokong pancasila atau sebagai orang yang beragama. Malah akan memperoleh satu *state phyloshopy* yang hidup berjiwa, berisi tegas dan mengandung kekuatan. Tak ada satupun daripada lima sila yang terumus dalam pancasila itu akan gugur apabila saudara-saudara menerima Islam sebagai dasar negara (Natsir, 2000: 85).

George Mc. T. Kahin seorang Profesor daripada Universiti Cornell (AS) yang dikenal sebagai Ahli Studi Indonesia, memberikan penilaian positif tentang perjuangan politik M. Natsir selama ini. Beliau menyatakan, “Tetapi menurut pikiran saya sumbangan yang paling besar daripada Bung Natsir terhadap tanah airnya adalah discussnya mengenai pengaruh aliran reformis dalam Islam dan cara-cara dimana dia dan para pemimpin Islam lainnya berusaha untuk mempergunakan konsep-konsep Islam pada realiti-realiti

daripada masyarakat Indonesia (Suara Masjid (1993), Kiat Menjadi Pemimpin. April: 14, h. 17).

Khususnya mengenai Masyumi, dia menambahkan : Bertalian dengan peranan politik Mohammad Natsir, ada beberapa hal penting yang saya anggap masih belum jelas kebanyakan para pengamat menilai. Teranglah sudah bahwa salah satu daripada sumbangannya yang paling bererti dapat dilihat dalam lamanya masa ia menjadi ketua umum daripada parti politik Masyumi. Pengaruhnya dalam kepemimpinan parti selalu kuat, dan saya percaya bahwa ia mesti dibanggakan sebagai telah berbuat banyak dalam memajukan cita-cita progresif dalam penentuan arah politik parti. Ia mempunyai pengaruh besar atas pendirian Masyumi dalam soal-soal Luar Negera sebagaimana dalam hal-hal Dalam Negera, dan ini kadangkala adalah bersifat menentukan dalam mempertahankan bantuannya yang terus menerus bagi suatu politik Luar Negera yang bebas dan non-blok (tidak berpihak) (Ibid: 20).

M. Natsir memimpin Masyumi sebagai ketua umum sejak 1949 sampai 1958, dua tahun sebelum dibubarkan. Sembilan tahun, M. Natsir memainkan peranannya dalam Masyumi sebagai parti terbesar dalam percaturan politik di Indonesia. Sebagai pemimpin politik islam, M. Natsir secara maksimal telah memberikan seluruh tenaga dan buah pemikirannya bagi kepentingan ummat Islam di Indonesia dan seluruh bangsa Indonesia. Hal tersebut secara sederhana dapat

dibuktikan melalui apa yang disebut 'Mosi Integral M. Natsir (Ibid: 42).

Inilah beberapa catatan dan fakta sejarah yang terungkap tentang peranan besar M. Natsir dalam memperjuangkan politik Islam di Indonesia melalui Partai Politik Islam Masyumi. Kepimpinan beliau sampai dibubarkannya Masyumi oleh pemerintahan Orde Lama Soekarno telah membuktikan kegigihannya dalam memperjuangkan asas Islam melalui Parlimen.

Persamaan Pemikiran Politik Islam Hasan al-Banna dan Mohammad Natsir.

Sebagaimana dijelaskan pada awal bab ini, mengenai wawasan politik Islam Hasan al-Banna, yang memandang bahwa politik merupakan bahagian yang tidak terpisahkan daripada Islam sebagai agama yang lengkap dan sempurna. Beliau menyatakan dengan jelas, "Sesungguhnya seorang muslim belum sempurna keislamannya kecuali jika ia menjadi seorang ahli politik, mempunyai pandangan jauh ke depan dan memberikan perhatian penuh kepada permasalahan bangsanya. Keislaman seseorang menuntutnya untuk memberikan perhatian kepada persoalan-persoalan bangsanya..."(Al-Banna, t.th. *Ila al-Tullab*: 8-10).

Selanjutnya dalam risalah yang lain beliau menyatakan, "Sesungguhnya kami adalah ahli politik dalam erti bahwa kami memberikan perhatian kepada persoalan-persoalan bangsa dan kami bekerja dalam usaha mewujudkan kebebasan sepenuhnya..."(Ibid: 29). Mengenai kaitan antara Islam dengan politik dan bagaimana sikap seorang muslim terhadapnya beliau berpendapat bahwa, politik adalah sesuatu hal

memikirkan tentang persoalan-persoalan dalaman ataupun luaran umat. Kerana itu menurut Ikhwan politik juga memberikan perhatian dan bekerja demi kebaikan umat seluruhnya. Ianya berkaitan dengan aqidah dan akhlak dan bertujuan untuk melakukan perubahan (Ruslan, 2000: 74).

Pemahaman seperti inilah yang juga ada pada diri M. Natsir, bahwa Islam dan politik bukanlah sesuatu yang terpisah. Beliau menyatakan, "Sebagai seorang muslim, kita tidak boleh melepaskan diri daripada politik. Sebagai seorang ahli politik, kita tidak boleh melepaskan diri daripada ideologi kita, iaitu ideologi Islam. Bagi kita, menegakkan Islam itu tidak boleh dilepaskan daripada menegakkan masyarakat, menegakkan negara dan menegakkan kemerdekaan" (Natsir, 1958: 157).

Bagi M. Natsir, sama sekali tidak dikenal dalam Islam adanya pemisahan antara urusan dunia (seperti politik) dan akhirat. Beliau menulis:

Dalam konteks pemahaman yang sering dilukiskan sebagai kehidupan duniawi dan kehidupan spiritual misalnya, Islam tidak mengenal dikotomi (pemisahan) ini. Islam memandang kehidupan manusiawi di dunia ini secara komprehensif, tidak ada pemisahan kehidupan, termasuk dalam hubungan antara orang sebagai peribadi, sebagai warga masyarakat dan sebagai warga negara (Natsir, 1989: 59-60).

Yang perlu menjadi perhatian daripada kedua tokoh ini adalah, adanya kesamaan pemikiran dan pemahaman tentang politik bahwa ianya tidaklah terpisah daripada Islam. Selain itu keduanya mempunyai kesamaan misi dan objektif untuk

menjelaskan terhadap masyarakat dan seluruh umat Islam mengenai fungsi politik yang bersih dan benar sesuai dengan ajaran Islam. Bahwa politik bukanlah sesuatu yang kotor dan menghinakan sebagaimana ajaran yang diwariskan oleh Machiavelli. Bahkan lebih daripada itu keduanya bukan hanya setakat mengeluarkan konsep atau teori yang baik mengenai politik Islam, tetapi keduanya telah membuktikan dengan menjadi ahli-ahli politik yang digeruni oleh lawan dan kawan. Keduanya berhasil memadukan antara keahlian berpolitik dengan keindahan nilai-nilai akhlak dalam Islam.

Secara konsep yang lebih khas, Hasan al-Banna dan Mohammad Natsir mempunyai kesamaan bahwa dalam mendirikan sebuah negara, hanya ada dua pilihan iaitu Islam atau sekular. Hasan al-Banna mengutus surat kepada Raja Farouk yang menyatakan bahwa hanya ada dua pilihan bagi kehidupan politik di Mesir, mengikuti aturan Barat atau mengikuti aturan Islam, Dalam konteks mengikuti aturan Islam, al-Banna menawarkan konsep mengenai negara Islam yang akan dijalani ketika Mesir memilih Islam sebagai jalan hidup. Menurut Hasan al-Banna, “Negara Islam adalah negara yang merdeka, yang tertegak diatas syariat Islam, bekerja dalam dalam usaha melaksanakan sistem sosialnya, memproklamirkan prinsip-prinsipnya yang lurus dan mneyampaikan dakwahnya yang bijak kepada semua umat manusia” (Al-Ghazali, 2000: 216).

Demikian juga dengan apa yang dilakukan oleh M. Natsir, dalam sidang pleno Konstituante tanggal 12 Nopember 1957 beliau menyatakan, “Saya ingin menyampaikan seruan yang sungguh-sungguh kepada saudara-saudara yang menyokong pancasila. Sila-sila yang saudara-saudara maksud ada terdapat dalam Islam. Bukan sebagai ‘*pure concept*’ yang

steril tetapi sebagai nilai-nilai hidup yang nyata dan terang. Dengan menerima Islam sebagai falsafah negara, saudara-saudara pembela pancasila tidak dirugikan apa-apa. Samaada sebagai penyokong pancasila atau sebagai orang yang beragama. Malah akan memperolehi satu *state phyloshopy* yang hidup berjiwa, berisi tegas dan mengandungi kekuatan. Tak ada satupun daripada lima sila yang terumus dalam pancasila itu akan gugur apabila saudara-saudara menerima Islam sebagai dasar negara (Natsir, 2000: 85). Selanjutnya dalam sebuah pidatonya yang bertajuk 'Islam Sebagai Dasar Negara', beliau menyatakan bahwa untuk dasar negara, Indonesia hanya mempunyai dua pilihan iaitu sekularisme (*la diniyah*) atau fahaman agama (*din*) (Natsir, 1957: 12). Bahkan dalam kritikan yang lebih keras lagi M. Natsir mengatakan, "Pancasila tidak patut dijadikan ideologi negara, kerana sila-sila itu semuanya relatif, samaada sila-sila itu sendiri mahupun hubungan satu dengan lainnya. Berbeda dengan pancasila, Islam mempunyai hukum hakam yang diberikan kepada manusia oleh Tuhan melalui wahyu yang memberikan ukuran mutlak untuk mengatur persoalan-persoalan manusia (Natsir, 1958: 144-145)."

Dalam sistem demokrasi, Hasan al-Banna mempunyai kesamaan pemikiran dengan Mohammad Natsir bahwa keduanya menerima sebagian prinsip demokrasi yang sesuai dengan Islam dan menolaknya yang tidak sesuai dengan prinsip Islam. Prinsip demokrasi yang meletakkan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat ataupun suara terbanyak dengan konsepnya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, adalah tidak sesuai dengan prinsip Islam yang menjadikan syariat dan hukum Allah sebagai asas tertinggi. Kalau M. Natsir mengungkapkan demokrasi dalam Islam dengan istilah '*Theistic*

Democracy', iaitu demokrasi yang diasaskan kepada nilai-nilai ketuhanan, maka Hasan al-Banna menyebutnya sebagai Islamism. Islam sebagai agama yang lengkap dan sempurna mempunyai sistem politik sendiri seperti prinsip-prinsip *syūrā* (mesyuarat), *hurriyah* (kebebasan), *musawah* (persamaan), *'adl* (keadilan), *tha'ah* (kepatuhan) dan *amar ma'ruf nahi munkar*. Keduanya sampai pada kesimpulan yang sama bahwa sistem demokrasi yang nilai-nilainya sesuai dengan prinsip Islam hanyalah sebagian daripada luasnya sistem politik dalam Islam.

Kesimpulan yang boleh dipetik daripada kesamaan kedua pemikir ini adalah bahwa negara ataupun daulah mestilah ditegakkan atas asas syariat Islam. Tidak ada tempat bagi keduanya adanya pemisahan antara agama dan politik, antara Islam dan sistem pemerintahan dan juga antara urusan dunia dan akhirat.

Perbedaan Pemikiran Politik Islam Hasan al-Banna dan Mohammad Natsir

Setelah membahas tentang persamaan pemikiran politik Islam antara Hasan al-Banna dengan Mohammad Natsir, sebagai langkah komparatif adalah perlu juga membahas tentang Perbedaan-Perbedaannya. Walaupun secara umum antara Hasan al-Banna dan Mohammad Natsir mempunyai banyak kesamaan sama ada dari segi konsep, idea dan pemikiran, namun tidaklah dinafikan dalam pelaksanaannya akan banyak dijumpai Perbedaan-Perbedaan yang sifatnya praktikal atau kerana pengaruh keadaan politik yang berbeda. Pada bahagian ini penulis membagi kepada beberapa subsection iaitu: pengalaman politik, pelaksanaan syariat Islam, pendidikan politik dan parti politik.

Dari segi pengalaman, M. Natsir adalah seorang praktisi ataupun ahli politik, sedangkan Hasan al-Banna tidak pernah terjun langsung dalam politik praktis bahkan tidak pernah menjadi ahli politik. Pengalaman yang berbeda seperti inilah yang menyebabkan Perbedaan dalam konsep politik Islam. Perbedaan yang jelas terlihat daripada konsep politik Islam keduanya adalah universalitas perjuangannya. Kalau Mohammad Natsir dengan skala lokalnya lebih terfokus kepada perjuangan politik di Indonesia, tetapi tidak dengan Hasan al-Banna yang bersifat antarabangsa. Fadhlullah Jamil menulis sebagai, "Sehubungan dengan ini, seyugialah diketahui bahwa kemerdekaan dan kebebasan yang diperjuangkan Ikhwan dari dulu hingga kini adalah semata-mata bagi mendaulatkan syariat Allah di muka bumi ini, termasuk Mesir dan bukan atas dasar bangsa, daerah serta perhitungan duniawi yang lainnya. Segala prinsip perjuangan mereka yang luas dan bersifat sepadu itu di dalam rangka memenuhi tuntutan Islam, telah disampaikan secara lisan dan tulisan " (Jamil, 2000: 233). Selain itu Usman Abdul Mu'iz Ruslan merakamkan hasil-hasil penting yang menyatakan tentang sikap Ikhwan terhadap permasalahan umat Islam yang ada di negara lain antaranya, peristiwa Konfrensi Meja Bundar yang terjadi antara pemerintah Indonesia dengan Kerajaan Belanda, pembentukan tim khusus untuk mengkaji kes Tripoli di Libia dan juga terbitnya selebaran yang menegaskan seruan untuk membela Palestin dan ajakan kepada rakyat Mesir untuk mengumpulkan bantuan bagi Palestina (Ruslan, 2000: 194). Pandangan universal Hasan al-Banna terhadap dunia Islam juga terlihat dengan jelas daripada pernyataannya, "Tanah air Islam paling luas adalah daripada lautan ke lautan, daripada pantai ke lautan Atlantik, daripada

Indonesia dan sekitarnya di Timur hingga ke Maroko di Barat” (Al-Qaradhawi, 2007: 32).

Selanjutnya mengenai pelaksanaan sistem atau syariat Islam dalam sebuah negara bagi M Natsir adalah suatu kemestian. Demikian pula dengan asas ideologi bagi seorang muslim adalah menjadikan Islam sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itulah M Natsir memperjuangkan penerimaan Islam sebagai asas bagi negara Indonesia dan bukannya Pancasila sebagaimana dikehendaki oleh Soekarno dan kawan-kawannya daripada kelompok nasionalis sekular. Pada saat itu, Presiden Soekarno lebih terlihat aktif dalam melakukan intervensi politik. Pancasila ditampilkan oleh Soekarno sebagai pengganti konsep Islam. Bahkan sebelumnya pada tahun 1953, Presiden Soekarno menyatakan sikapnya mengenai negara Islam. Ia menyatakan dalam salah satu pidatonya di Amuntai, Kalimantan bahwa apabila kita mendirikan negara berdasarkan Islam maka beberapa daerah yang penduduknya bukan Islam akan memisahkan diri (Mughni, 1994: 109).

M. Natsir memberi kritikan yang tajam atas pernyataan tersebut. Dalam sebuah pidato yang bertajuk ‘Islam Sebagai Dasar Negara’, beliau menyatakan bahwa untuk dasar negara, Indonesia hanya mempunyai dua pilihan iaitu sekularisme (la diniyah) atau fahaman agama (diin) (Natsir, 1957: 12). Bahkan dalam kritikan yang lebih keras lagi M. Natsir mengatakan, “Pancasila tidak patut dijadikan ideologi negara, kerana sila-sila itu semuanya relatif, samaada sila-sila itu sendiri maupun hubungan satu dengan lainnya. Berbeda dengan pancasila, Islam mempunyai hukum hakam yang diberikan kepada manusia oleh Tuhan melalui wahyu yang memberikan ukuran

mutlak untuk mengatur persoalan-persoalan manusia” (Natsir, 1958: 144-145).

Sesuatu yang patut dicatat oleh sejarah adalah, sikap M. Natsir yang mengagumkan ketika beliau berusaha mencari jalan tengah dengan mengajak berdamai kepada para penyokong pancasila (kaum nasionalis sekuler) dengan memberikan argumentasi yang kuat apabila mereka menerima Islam sebagai dasar negara. Dalam sidang pleno Konstituante tanggal 12 Nopember 1957 beliau menyatakan, “Saya ingin menyampaikan seruan yang sungguh-sungguh kepada saudara-saudara yang menyokong pancasila. Sila-sila yang saudara-saudara maksud ada terdapat dalam Islam. Bukan sebagai ‘*pure concept*’ yang steril tetapi sebagai nilai-nilai hidup yang nyata dan terang. Dengan menerima Islam sebagai falsafah negara, saudara-saudara pembela pancasila tidak dirugikan apa-apa. Samaada sebagai penyokong pancasila atau sebagai orang yang beragama. Malah akan memperolehi satu *state phyloshopy* yang hidup berjiwa, berisi tegas dan mengandungi kekuatan. Tak ada satupun daripada lima sila yang terumus dalam pancasila itu akan gugur apabila saudara-saudara menerima Islam sebagai dasar negara (Natsir, 2000: 85).

Dari fakta sejarah ini boleh disimpulkan bahwa simbol-simbol ideologi samaada berupa nama ataupun asas Islam dalam sebuah negara bagi M Natsir adalah sebuah kemestian yang akan menentukan langkah perjalanan ke depan sebuah bangsa. Kerana itu bagi M. Natsir, negara adalah merupakan alat untuk melaksanakan syariat Islam, maka menjadikan Islam sebagai asas negara adalah suatu kemestian. Walaupun pada pelaksanaannya nanti masih memerlukan ijtihad. Kalaupun kemudian Islam tidak dapat dijadikan sebagai asas negara,

Natsir masih berpendapat yang terpenting adalah terlaksananya syariat atau hukum Allah dimuka bumi.

Tetapi tidak dengan Hasan al-Banna yang berpandangan bahwa simbol dan asas Islam sahaja tidak cukup untuk memperjuangkan kepentingan politik Islam. Sebuah aturan atau syariat Islam tidak akan dapat dilaksanakan tanpa adanya pemahaman yang baik daripada masyarakatnya dan juga tanpa adanya daulah yang dapat menopangnya. Kerana itu bagi Hasan al-Banna menetapkan asas Islam dan simbol keislaman lainnya mesti dilaksanakan bersamaan dengan proses perbaikan pemahaman umat Islam dan tarbiah yang merupakan penyiapan kondisi masyarakat adalah suatu kemestian. Ketika Hasan al-Banna ditanya mengapa beliau tidak menulis kitab atau ketika para sahabatnya meminta beliau menyusun tafsir dan pelbagai disiplin ilmu keislaman lainnya, maka beliau menjawab kepada mereka:

Hindarkan aku daripada menyusun buku. Sebuah buku dapat memuat pelbagai pandangan dan pemikiran. Tetapi semua itu tetap terjepit oleh dua sampulnya dan terbelenggu oleh lembaran-lembarannya. Sehingga ia ditemukan oleh pembaca yang dapat memahami dan mengambil manfaat daripadanya. Tetapi sangat jarang buku-buku yang mendapatkan pembaca seperti ini. Kebanyakan orang tidak mempunyai waktu untuk membaca dan mengkaji buku. Adapun orang yang mengoleksi buku, kebanyakan hanya untuk memperindah interior rumahnya. Perpustakaan Islam telah penuh dengan buku daripada berbagai-bagai disiplin ilmu. Tetapi buku tidak akan dapat berbuat apa-

apa apabila optimisme umat telah hilang, harapan telah musnah, berkubang dalam kemalasan, bersenang-senang dan berfoya-foya sehingga mudah diperhamba oleh musuh-musuhnya daripada pelbagai arah. Kerana itu, waktu yang saya gunakan untuk menyusun buku, saya gunakan untuk menyusun seratus pemuda muslim. Setiap orang daripada mereka akan menjadi sebuah buku yang berbicara dengan bahasa amal yang membuahkan hasil. Dengan demikian saya dapat mentarbiyah sebuah negeri. Selanjutnya daripada mereka akan tersusun banyak buku (Mahmud, 1981: 345).

Hasan al-Banna memandang bahwa penyadaran umum sahaja tidak cukup untuk memperbaiki umat dan mengubah nasibnya dan tidak ada jalan lain kecuali harus melalui usaha bersama, pembinaan dan pembangunan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Ia juga memandang perlunya mengikuti metode Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam hal ini, bahwa beliau selama masa hidupnya di Makkah berusaha keras membentuk generasi *rabbani* dan *Qur'ani* pertama melalui interaksi terus menerus, perhubungan intensif dan penjagaan positif (Al-Qaradhāwī, 1999: 163). Lebih khas lagi Abdul Halim Hamid (1996) memberi komen, "Ia menumpukan perhatiannya pada pembentukan *rijal* (kader) yang tangguh. Dipenuhinya perpustakaan dengan karya-karyanya yang menyuarakan kebangkitan dan dinamika umat." Atas konsep pemikiran seperti inilah Hasan al-Banna mulai men-*tarbiyah* generasi Islam, iaitu atas asas kebangkitan yang beliau cadangkan. Beliau menghendaki pembentukan *Daulah Islamiyah* dan pelaksanaan *Daulah* Islam secara benar. Untuk mencapai tujuan itu beliau

menempuh satu-satunya jalan *tarbiyah Islamiyah* (Al-Mash, 1995: 103).

Dari konsep ini jelas terlihat bagaimana pemahaman dan konsep pendidikan politik Hasan al-Banna tentang pembentukan sebuah generasi, bahwa tertegaknya syariat Islam baru boleh dilaksanakan kalau adanya sebuah *daulah* dan kesiapan masyarakat untuk menerima dan mengamalkannya. Oleh sebab itulah beliau lebih mementingkan pembinaan sebuah generasi melalui *tarbiyah*, yang walaupun memerlukan banyak pengorbanan, waktu yang panjang namun darinya nanti akan lahir pejuang ataupun generasi yang akan lebih banyak lagi melahirkan karya dan peninggalan, sama ada dalam bentuk tulisan ataupun karya yang hidup. Tarbiyah yang baik akan menjadikan proses pembinaan umat akan lebih terarah dan bersepadu dan nantinya akan menghasilkan suatu generasi ataupun umat Islam yang siap memperjuangkan dan melaksanakan syariat Islam di muka bumi ini.

Berbeda dengan Hasan al-Banna, proses pendidikan politik M Natsir yang lebih bersifat lokal, semasa dan praktikal membuatnya meyakini bahwa, penyadaran politik umat adalah melalui peran aktif masyarakat ataupun umat Islam dalam pilihan raya. Sikap ini beliau contohkan melalui sikap politik Natsir yang paling akhir menjelang wafatnya, ialah dukungannya kepada Parti Persatuan Pembangunan (PPP) dalam Pilihan Raya 1992. Natsir menganggap, parti politik perlu mendapatkan kursi yang lebih banyak di DPR, agar demokrasi tidak tenggelam dalam pemusatan kuasa salah satu kekuatan sosial-politik, yang dapat membuka peluang lumpuhnya fungsi kontrol dari lembaga perwakilan rakyat itu (Anwar Haryono, 1995: 125). Bahkan dalam contoh yang lebih

keras dalam usaha memberikan pendidikan politik kepada umat adalah peristiwa “Petisi 50” yang ditulis oleh Anwar Haryono sebagai, “Walaupun di masa tua Natsir tidak ingin lagi melibatkan diri dalam pertarungan politik secara langsung, dia tidak tinggal diam dalam menghadapi berbagai peristiwa politik. Sebagai salah seorang yang dihormati, kadang-kadang ia masih juga menggunakan pengaruh pribadinya untuk menumbuhkan suasana kehidupan politik yang lebih baik dan lebih demokratik, sesuai dengan konstitusi di negeri ini. Maka tidak hairan ia ikut serta menandatangani “Pernyataan Keprihatinan” yang kemudian lebih populer dengan sebutan “Petisi 50” (Anwar Haryono, 1995: 123). Melalui cara inilah secara tidak langsung memberikan pendidikan politik kepada masyarakat untuk memahami hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Perbedaan yang juga ada antara kedua tokoh ini adalah pandangannya mengenai parti politik. Kalau M Natsir dengan jelas mengakui dan membenarkan adanya sistem parti politik, bahkan terlibat langsung dalam parti politik Masyumi yang didalamnya memperjuangkan aspirasi politik umat Islam, berbeda dengan Hasan al-Banna yang setelah melihat perpecahan umat yang disebabkan adanya sistem parti dan multiparti di Mesir, berpendapat bahwa parti politik dan multiparti dilarang dan tercela dalam Islam.

BAB V

PENUTUP

Kajian ini menekankan pada komparatif loretatur tentang konsep dakwah dan pemikiran Islam. Sedangkan kajian empiris, lebih menekankan pada perbandingan konsep dakwah dan pemikiran politik Islam Hasan al-Banna dan Mohammad Natsir sebagaimana dalam karya terdahulu. Kaitan antara manhaj dakwah Hasan al-Banna dan Mohammad Natsir merupakan kelaziman dari sebuah penelitian komparatif, setelah diungkapkan antara persamaan dan perbedaannya. Penulis menilai bahwa kaitan antara manhaj dakwah kedua tokoh ini adalah keterkaitan aqidah, berangkat dari asal dan sumber yang sama yaitu Allah sebagai Tuhan yang memerintahkan untuk menyebarkan risalahnya melalui para nabi dan rasul-Nya. Juga keterkaitan misi dan tujuan yang hendak dicapai yaitu *li 'ila i kalamatillah*, menegakkan kalimah Allah, memperbaiki keadaan umat agar selalu menjadi umat yang terbaik, umat yang melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi larangan-Nya.

Secara garis besar, antara Hasan al-Banna dan Mohammad Natsir mempunyai banyak kesamaan baik dari segi konsep, idea dan pemikiran. Namun dalam pelaksanaannya, banyak dijumpai perbedaan-perbedaan yang sifatnya praktek atau karena pengaruh politik yang berbeda dan juga adanya perbedaan kondisi sosial dan geografis. Penulis menilai ini bukanlah menunjukkan kelebihan pada satu sisi atau kelemahan pada sisi yang lain. Tetapi menunjukkan beragamnya

ijtihad dari masing-masing individu dalam berdakwah dan juga dalam menghadapi persoalan umat.

Dalam persepsi Hasan al-Banna, yang memandang Islam sebagai agama yang lengkap dan sempurna, menjadikan semua sarana dan wasilah sebagai kekuatan untuk berdakwah, akan tetapi M. Natsir lebih melihat kepada skala prioritas atau keutamaan dalam melaksanakan program dakwah. Boleh jadi keterbatasan waktu, tenaga dan pertimbangan konstelasi politik yang menyebabkan M. Natsir berpandangan tentang perlunya koordinasi atau pembagian tugas dengan jamaah atau organisasi dakwah yang lain. Selain itu menurut Sohirin Solihin (2001), M. Natsir memandang bahwa kerja dakwah adalah kerja besar yang tidak mungkin dipikul oleh satu orang atau satu jamaah, sehingga memerlukan kerja sama dan koordinasi yang baik antara semua komponen masyarakat yang ada. Sikap *tasammuh* atau lapang dada M. Natsir menunjukkan kebesarannya sebagai seorang dai dan pemimpin, yang berpendirian bahwa walaupun secara dasarnya antara DDII dan Ikhwanul Muslimin mempunyai banyak kesamaan, namun diakui bahwa Dewan Dakwah perlu belajar dari idea dan pemikiran Ikhwan, kalau memang ada kelebihan yang tidak dimiliki oleh Dewan Dakwah. M. Natsir menyatakan, "Kita sama dengan Ikhwan, walaupun ada kekurangan maka kita perlu belajar dari mereka." Bukti yang menyokong pernyataannya ini, masih menurut Sohirin Solihin (2002) adalah bahwa M. Natsir termasuk diantara orang pertama di Indonesia yang menggalakkan perterjemahan karya tokoh-tokoh Ikhwan kedalam Bahasa Indonesia, seperti tafsir '*Fi Zilali al-Qur'an*' karya Sayyid Qutb dll.

Walaupun secara umum antara Hasan al-Banna dan Mohammad Natsir mempunyai banyak kesamaan sama ada dari segi konsep, idea dan pemikiran, namun tidaklah dinafikan dalam pelaksanaannya akan banyak dijumpai Perbedaan-Perbedaan yang sifatnya praktikal atau kerana pengaruh keadaan politik yang berbeda. Pada bahagian ini penulis membagi kepada beberapa subsection iaitu: pengalaman politik, pelaksanaan syariat Islam, pendidikan politik dan parti politik.

Dari huraian di atas dapatlah disimpulkan tentang adanya kaitan yang sangat rapat antara manhaj dakwah Hasan al-Banna dan Mohammad Natsir, baik dalam kesamaan visi dan misi, objektif ataupun metodologi dakwah, yang walaupun terdapat perbedaan, tidaklah bersifat mendasar, tetapi disebabkan oleh faktor-faktor yang sifatnya praktek, dan pada akhirnya menunjukkan kekayaan dinamika dalam berdakwah dan pemikiran. Kesimpulan yang lain dari huraian di atas adalah, adanya kaitan yang sangat rapat antara konsep politik Islam Hasan al-Banna dan Mohammad Natsir, iaitu adanya kesamaan pemikiran dan pemahaman tentang politik bahwa ianya tidaklah terpisah dari Islam, bahwa negara ataupun daulah mestilah ditegakkan atas asas syariat Islam. Tidak ada tempat bagi keduanya adanya pemisahan antara agama dan politik, antara Islam dan sistem pemerintahan. Selain itu keduanya mempunyai kesamaan misi dan objektif untuk menjelaskan terbatasp masyarakat dan seluruh umat Islam mengenai fungsi politik yang bersih dan benar sesuai dengan ajaran Islam.

Walaupun secara umum antara Hasan al-Banna dan Mohammad Natsir mempunyai banyak kesamaan sama ada dari segi konsep, idea dan pemikiran, namun tidaklah dinafikan

dalam pelaksanaannya akan banyak dijumpai perbedaan-perbedaan yang sifatnya praktis atau kerana pengaruh keadaan politik yang berbeda yang terbagi atas pengalaman politik, pelaksanaan syariat Islam, pendidikan politik dan sistem parti politik dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Abdul Rahim, Imaduddin. 1996. *M. Natsir Tentang Dakwah dan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Abd Nasir, Gamal. 1999. *Mohammad Natsir: Pendidik Ummah, Kajian atas Fikiran-fikirannya Tentang Pendidikan Islam di Indonesia*. Tesis Dr. Fal. University Kebangsaan Malaysia.

Abu Bakar, Hasanuddin. 2000. *Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Visi & Misi*. Jakarta: Penerbit Dewan Dakwah.

Abu Faris, Muhammad Abdul Qadir (2003), *Fiqih Politik Hasan al-Banna*, Odie al-Faeda (terj.). Solo: Media Insani Press.

Akhmed, Azis S., 1993. *Posmodernisme, Bahaya Dan Harapan Bagi Islam*. Bandung: Mizan. Bandung.

Abu Faris, Muhammad Abdul Qadir (2003), *Fiqih Politik Hasan al-Banna*, Odie al-Faeda (terj.). Solo: Media Insani Press.

Ali Abdul Halim Mahmud (1420H/1999), *Perangkat-Perangkat Tarbiyah Ikhwanul Muslimin*, Wahid Ahmadi (terj.). Solo: Era Intermedia.

Ali 'Abdul Halim Mahmud (1997), *Ikhwanul Muslimin Konsep Gerakan Terpadu*, Syafril Halim (terj.), J. 1. Jakarta: Gema Insani Press, h. 36-37.

Anwar Jundi (1978), *Hasan al-Banna, al-Dā'iyyah al-Imām wa al-Mujāhid al-Syahīd*. Beirut: Dār al-Qalam.

Anwar Haryono *et al.* (1416H/1995), *M. Natsir Sumbangan dan Pemikirannya Untuk Indonesia*. Jakarta: Media Dakwah.

Anwar Haryono (1416H/1995), *Indonesia Kita: Pemikiran Berwawasan Iman-Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.

Abdul Hamid al-Ghazali (1422H/2001), *Merentas Jalan Kebangkitan Islam: Peta Pemikiran Hasan al-Banna, Wahid Ahmadi & Jasiman* (terj.). Solo: Era Intermedia.

Abdul Qadir Audah (t.t.), *Al-Islām wa Audhā'unā al-Siyāsiyyah*. Kaherah: Al-Mukhtār al-Islāmiy.

Ali Abdul Halim Mahmud (1981), *Al-Ikhwān al-Muslimūn: Ahdāth Syanā'a al-Tarīkh, Ru'yah min al-Dākhil*, J. 2. Iskandaria: Dār al-Da'wah, h. 345.

Al-Butiyy, Muhammad Sa'id Ramadan., 1997. *Rahsia Dakwah Yang Berkesan*. Selangor: Pustaka Ilmi.

Al-Ghazali, Abdul Hamid., 1422H/2001. *Merentas Jalan Kebangkitan Islam: Peta Pemikiran Hasan al-Banna*. Terj. Wahid Ahmadi & Jasiman. Solo: Era Intermedia.

Al-Hajjaji, Anas., 1983. *Otobiografi Hasan al-Banna*. Terj. Bahrūn Abu Bakar & Anwar Rasydi. Bandung: Risalah Bandung.

Al-Hudaibi, Hasan Isma'il., 1984. *Du'at...La Qudat. Ikhwanul Muslimin Mengajak Bukan Menghakimi*. Terj: Afif Mohammad. Bandung: Penerbit Pustaka.

Al-Husaini, Ishaq Musa., 1952. *Al-Ikhwan al-Muslimin Kubra al-Harakat al-Islamiyyah al-Hadithah*. Beyrut: Dar Beyrut Li al-Thiba'ah Wa al-Nashr.

Ali Yahya Ahmad, Faishal., 1987. *Methodode Kaderisasi Rasulullah (s.a.w)*. Terj. Salim Wahid. Solo: CV Pustaka Mantiq.

Al-Mash, Badr Abdurrazzaq., 1416H/1995. *Manhaj Dakwah Hasan al-Banna*. Terj. Abu Zaid. Solo: Citra Islami Press.

Dahlan Iskan. 2013. *Dakwah bil Hal: Korporatisasi Usaha Individu Umat Menuju Indonesia Modern*. Materi Orasi Ilmiah Dahlan Iskan untuk Promosi Gelar DR HC dari IAIN Walisongo <http://thedahlaniskanway.wordpress.com/2013/07/08/dakwah-bil-hal-korporatisasi-usaha-individu-umat-menuju-indonesia-modern/> . Diakses tanggal 2 Sept 2013.

Fadhilullah Jamil (2000), *Islam di Asia Barat Moden: Sejarah Penjajahan & Pergolakan*, Selangor Darul Ehsan: Thinker's Librarys SDN BHD, h. 233.

Hasan Isma'il al-Hudaibi (1977), *Dustūruna*. Kaherah: Dār al-Anshar.

Hasan al-Banna (1965), *Majmu'ah al-Rasail*. Beirut: Dār al-Andalus.

Hasan al-Banna (1965), *Majmū'ah Rasāil*. Beirut: Dār al-Andalūs.

Hasan al-Banna (1965), *Majmu'ah al-Rasail*. Beirut: Dār al-Andalus, h. 141.

Moh Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2015).

Muhammad 'Abdul Halim Hamid (1996), *Di Medan Dakwah Bersama Dua Imam, Ibnu Taimiyah dan Hasan al-Banna, Wahid Ahmadi (terj.)*. Solo: Era Intermedia.

M. Natsir (1989), *Politik Melalui Jalur Dakwah*, Jakarta: PT Abadi, h. 59-60.

M. Natsir (1958), *Agama dan Politik Capita Selecta*, J. 2, Jakarta: Pustaka Pendis, h. 157.

Muhammad Sayyid al-Wakil (2001), *Pergerakan Islam Terbesar Abad ke 14 H: studi analisis terhadap manhaj gerakan Ikhwanul Muslimin.*, Fachruddin (terj.), Bandung: Al-Syamil Press & Grafika.

L Carl Brown (2003), *Wajah Islam Politik, Pergulatan Agama dan Negara Sepanjang Sejarah Umat*, Abdullah Ali (terj.). Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.

Rachmad Faisal Harahap. 2013. *Dahlan Iskan Ungkap Sejarah Dakwah bil Hal*, <http://kampus.okezone.com/read/2013/07/08/373/833606/dahlan-iskan-ungkap-sejarah-dakwah-bil-hal>. Diakses tanggal 2 Sept 2013.

Razzag, Abur, 2009

Robert Jackson (1977), *Hasan al-Banna al-Rijāl al-Qur'āniy*, Anwar Jundi (terj.). Kaherah: Al Mukhtar al-Islami.

Syafiq A Mughni (1994), *Hassan Bandung pemimpin Islam Radikal*. Surabaya: PT Bina Ilmu, h. 109.

Taufiq Yusuf Al-Wa'iy (2003), *Pemikiran Politik Kontemporer al-Ikhwan al-Muslimun Study Analitis, Observatif, Dokumentatif*, Wahid Ahmadi & Arwani Amin (terj.). Solo: Era Intermedia.

Utsman Abdul Mu'iz Ruslan (2000), *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin Studi Analisis Evaluatif Terhadap Proses Pendidikan Politik 'Ikwān' Untuk Para Anggota Khususnya dan Seluruh Masyarakat Mesir Umumnya, Dari Tahun 1928 Hingga 1954*, Salafuddin Abu Sayyid (terj.). Solo: Era Intermedia.

Yūsuf al- Qaradāwī (2007), *Tarbiyah Politik Hasan al-Banna Referensi Gerakan Dakwah di Kancah Politik*, M. Lili Nur Aulia (terj.). Jakarta: Arah Press.

Yusuf al- Qaradhāwī (1999), *70 tahun al-Ikhwan al-Muslimun Kilas Balik Dakwah, Tarbiyah dan Jihad.*, Mustolah Maufur & Abdurrahman Husain (terj.). Jakarta: Pustaka al-Kautsar, h. 163.